

MESIN-MESIN PEMBUNUH PENDIDIKAN

Ardhie Raditya¹ dan Farid Pribadi²

¹Departemen Sosiologi, FISH, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Surabaya, 60231, dan Sekolah Pascasarjana Program Doktorat Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknik Utara, Pogung Kidul, Yogyakarta, 55281
E-mail: diditz.kristina@gmail.com

²Departemen Sosiologi, FISH, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Surabaya, 60231
E-mail: faridpribadi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai ketika masyarakat kehilangan makna kemanusiaannya ketika berhadapan dengan teknologi. Penelitian ini penting karena melacak hal-hal apa saja yang dapat memertahankan sisi kemanusiaan masyarakat di era gempuran teknologi hari ini. Salah satu hal yang paling dicermati dalam penelitian ini adalah pendidikan. Pendidikan sebagai unsur utama pembentuk kemanusiaan tidak lepas dari gempuran teknologi. Dengan memahami korelasi antara pendidikan dan kebudayaan akan ditemukan cara untuk memertahankan kemanusiaan di hadapan teknologi.

Kata Kunci: Masyarakat teknologi, Kemanusiaan, Pendidikan, Postmodernisme.

Hantu-Hantu Masyarakat Teknologis

Pidato Sosiolog Kritis dari UGM, Heru Nugroho, dkk. (2019) beberapa waktu lalu sebaiknya kita renungkan bersama karena sangat berkaitan dengan masa depan manusia Indonesia, khususnya pendidikan di negeri kita sebagai lembaga pembentuk manusia paripurna. Menurutnya, di tengah hantaman budaya digital yang ditopang kekuatan algoritmatis matematis sebagai bagian dari ideologi positivistik telah menciptakan subjek-subjek delusional yang mencerabut kapasitas keberadaan eksistensi manusia sebagai mahluk yang paling unggul daripada mahluk lainnya efek kecemasan dari kekuatan governmentalitas atau pengontrolan mentalitas sekaligus pengendalian perayaan kesadaran subjek manusia seutuhnya.

Budaya digital sebagai daya algoritmatis ini merupakan iblis baru di era modernitas yang posisinya menggantikan uang (dollar) sebagai sumber kejahatan dunia yang dengan mantranya, "Annuit Coeptus" (simbol mata satu pada bangunan segi tiga iluminasi) berhasil merayu atau menggoda manusia modern terjerumus ke dalam mesin penaklukan alam semesta beserta isinya (Jensen dan Draffan, 2004: 12). Di dalam masyarakat teknotronik, tehnologis, atau mega mesin ini menguatkan harapan akan kemajuan dan perubahan kehidupan yang lebih baik walaupun harapan palsu ini mengarahkan jalan menuju ke rute kehampaan karena mesin-mesin mutakhir berhasil membantu kerja-kerja mereka sekaligus memanipulasi emosi dan akal sehat, kekurangan sentuhan spiritualitas, kehilangan privasi, serta ketidakmampuan mengkoordinasikan warga negara

ketika kita masuk dalam rumah elektronik (Fromm, 1968; Mumford, 1970). Krisis demi krisis akan menghantui kehidupan masa depan kita karena gelombang keterkejutan tiada henti datang silih berganti berkat hilangnya ruang-ruang psikologis, Sosiologis, Biologis, Antropologis, termasuk, kentiman keluarga batih, kualitas dunia pendidikan, negara-bangsa, kehidupan cinta yang nyata dan politik kerakyatan yang kita idam-idamkan bersama (Toffler, 1980: 26-27).

Dengan demikian, dunia yang kita tinggali hari ini adalah dunia yang menyusut nyaris tidak terkendali. Kesadaran kita terhadap dunia yang semula padat, utuh, dan tunggal kini berubah menjadi semakin terfragmentasi, terserak-serak, dan kompleks sebagai konsekuensi logis dari tumbunya teknologi global yang menghancurkan batas-batas teritorial (Edwards dan Usher, 2000). Teknologi komunikasi dan paket-paket informasi sebagai fenomena globalisasi yang keberadaannya berkembang pesat belakangan ini menandai kebangkitan zaman digitalisasi kehidupan sehari-hari dan mendorong tumbunya generasi digital, generasi milenial, generasi Net, atau generasi virtual lainnya.

Inilah zaman yang tidak terduga, karena diliputi oleh janji kebebasan sekaligus ketakutan namun, disambut bergairah oleh kaum muda di seluruh dunia (Heryanto, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Milward Brown, misalnya, salah satu lembaga survei ternama di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tahun 2014 Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dalam pemakaian telepon pintar. Setiap hari, orang

Indonesia rata-rata menggunakan telepon pintar selama 181 menit. (BBC, 5 Juni 2014).

Hampir dua dekade pasca ambruknya orde baru (orba) jumlah pengguna internet di Indonesia melonjak drastis. Berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) bahwa tahun 2016 dari 250 juta penduduk Indonesia 132,7 juta diantaranya sebagai pengguna internet. Angka ini meningkat berlipat dibandingkan tahun 1998 yang jumlah penggunaannya masih berkisar setengah juta saja. Dari segi usia, kelompok kaum muda ini sangat mendominasi. Yakni, 38,7 juta (29,2%) pengguna internet itu berusia 35-44 tahun, 32,3 juta (24,4%) berusia 25-34 tahun, 24,4 juta (18,4%) berusia 10-24 tahun, 23,8 juta (18%) berusia 45-54 tahun, dan 13,2 juta (10%) berusia 55 tahun ke atas. Di Indonesia, *Youtube* (49%) tergolong media sosial terpopuler dikalangan para pengguna internet, selain *Facebook* (48%), *Instagram* (39%), *Twitter* (38%), dan *Whatsapp* (38%) (Global Web Index, 2017).

Pendidikan Berbasis Kajian Budaya: Melampaui Kertas-Kertas Pendidikan

Maraknya penggunaan perangkat teknologi digital di kalangan kaum muda Indonesia pada perkembangannya membawa nuansa baru dalam proses penyelenggaraan pendidikan kita. Sebagai contoh aktualnya, dalam sejarah pendidikan nasional tampaknya baru kali saja sistem ujian nasional dirancang berbasis komputer (UNBK). Berdasarkan data kemendikbud, setidaknya terdapat 2.712 SMP, 2.941 SMA, dan 4.919 SMK yang menjadi pelaksana UNBK. Pertama, UNBK mempercepat pengerjaan penilaian hasilnya daripada ujian berbasis kertas. Kedua, ujian berbasis komputer akan mengurangi bencana ekologis. Sebab, ujian berbasis kertas membutuhkan banyak pohon untuk ditebang sebagai bahan baku pembuatan kertas.

Pada tahun 2017, berdasarkan data resmi direktorat industri agro bahwa kebutuhan kertas nasional mencapai 10 juta ton. Padahal, untuk 1 rim kertas paling tidak rata-rata dibutuhkan kira-kira 1 pohon berusia lima tahun ke atas. Lantas, berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk memproduksi jutaan ton kertas untuk memenuhi proses pendidikan kita ?. Sementara, dalam rangka mengantisipasi ancaman pemanasan global dan krisis lingkungan, program menanam pohon dan penyelamatan hutan tengah gencar dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai bentuk kesepakatan global dan gerakan “*go green*” dan “*save our earth*”.

Kehadiran internet sebagai penopang kekuatan masyarakat teknotronik di Indonesia sejak

awal acapkali menimbulkan ketakutan bagi sebagian besar kalangan. Internet memiliki kekebalan dan kemampuan membelah diri ketika ia hendak dikontrol maupun dikendalikan dengan beragam cara. Dibandingkan radio dan televisi, internet menjadi kekuatan terselubung dalam proses jatuhnya rezim orde baru (orba). Tidak bisa disangkal bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintahan Soeharto, internet digunakan secara intensif oleh kaum oposisi kelas menengah perkotaan untuk menghindari sensor media siaran yang diterapkan rezim orba (Sen dan Hill, 2007).

Ironisnya, hari-hari ini bangsa Indonesia mengalami ancaman luar biasa di tengah maraknya penggunaan internet dan media sosial. Demokrasi yang mengisyaratkan kedewasaan cara pandang dalam pembelahan pilihan politik justru dicerai oleh derasnya arus informasi yang terutilitasikan secara sentimental sehingga mampu memporak-porandakan emosi dan perasaan massa mengambang di rumah elektronik.

Isu-isu SARA dan ujaran kebencian secepat kilat menyebar dalam dunia siber dan ruang media sosial. Masing-masing pendukung calon kepala negara dan daerah, misalnya, begitu mudah terlibat saling serang menggunakan dekoding kebudayaan dengan mengkomodifikasikan isu agama dan mensignifikasi identitas personal keagamaan mereka melalui rekayasa audio-visual.

Dekoding kebudayaan tersebut perlahan-lahan menghancurkan esensi politik dari seni menata kehidupan berbangsa menjadi siasat mengelabui massa. Maka, dalam situasi dekoding kebudayaan ini terjadilah kondisi apa yang disebut Hall (1980) sebagai dominasi hegemonik yang memproduksi sikap oposisional dan bertumpu pada labeling bermacam-macam. Sehingga, masing-masing pihak yang bertikai terjebak situasi balas dendam terselubung dan tragisnya figur teladan politik mengajarkan generasi mudanya justru bersikap acuh terhadap kemungkinan situasi perdamaian.

Kurikulum multikultural yang memuat komitmen moral tentang nilai-nilai menghargai sekaligus menghormati perbedaan kebudayaan tampak tidak memberikan daya dobrak reflektif sekaligus praksis bagi upaya menemukan jalur keluar. Karena itu, pendidikan di tengah abad teknologis yang menjadikan mesin elektronik sebagai tiang utama suatu kehidupan masyarakat super industrial yang membedakannya antara pendidikan dengan sistem pabrik sebagaimana gagasan Toffler (1984: 404) “membutuhkan sistem organisasional yang bertumpu pada masa depan: bubarnya sistem birokrasi yang kaku, rumit, dan memakan banyak korban sosial berganti dengan sistem desentralisasi, interpenetrasi dengan

kehidupan masyarakat setempat, mengutamakan administrasi adhokratis yang memecahkan kebakuan sistem penjadwalan dan pengelompokan. Ketika tujuan ini tercapai maka, institusi pendidikan bukan lagi mirip sistem industri perfabrikan”.

Kurikulum pendidikan yang melampaui sistem industrial (super industrial) tersebut akhirnya tidak lagi membutuhkan banyak gedung fisik persekolahan dan perkuliahan karena sistem adhokratis mengubah organisasi formal yang birokratis menjadi organisasi informal yang interaktif, non tekstual, dan imajinatif (Toffler, 1980 dan 1984). Karena itulah, di masa mendatang pendidikan berbasis kajian budaya (*cultural studies*) menjadi pendidikan strategis. Pengetahuan bukan hanya dibentuk atas dasar interaksi sehari-hari, melainkan oleh diskursus yang melampaui realitas sosial. Sehingga, budaya masyarakatnya menjadi sarat ideologis dan menyusup ke dalam ruang-ruang teknologi elektronik. Kehidupan sehari-hari melalui media bahasa bukanlah sekedar perayaan kesadaran komunikatif, melainkan terbentuk karena momentum epiphanik (*the epiphanic moment*). Momentum epiphanik didasarkan pada empat (4) hal. Yakni, *uphival* yang terkait dengan perubahan (pergolakan) tragis kehidupan seseorang (misalnya, orang baik yang tiba-tiba membunuh), *kumulatif* yang terkait dengan krisis sosial (misalnya, seseorang yang tiba-tiba pergi/kabur dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya), *iluminatif* terkait dengan hubungan yang penuh kehangatan dan menyenangkan (misalnya, liburan keluarga), dan *relived* yang berhubungan dengan rangkaian ulang makna kehidupan sosial yang sebelumnya ditempa krisis, tragedi, dan pergolakan. Itulah sebabnya, mempelajari kajian budaya dibutuhkan suatu pemahaman konsep yang interdisipliner (Denzin, 2003: 80-84).

Kehadiran kajian budaya sebagai materi kontemporer dalam institusi pendidikan (Sekolah dan Universitas) justru merisaukan dan mencemaskan banyak penentu kebijakan pendidikan, terutama di tempat asalnya, Inggris, mazhab Birmingham. Akhir tahun 1993, di sana terjadi suatu perdebatan sengit antara kelompok politisi konservatif dan liberal kritis.

Kelompok konservatif menganggap kehadiran kajian budaya di dalam pendidikan akan melunturkan nilai budaya nasionalisme dalam pelajaran sejarah dan sastra. Mereka ingin terus melestarikan nilai-nilai budaya nasionalisme yang ada dalam sastra dan sejarah Shakespeare. Mereka tidak ingin para peserta didiknya diajarkan tentang Hamburger, Mcdonald, opera sabun, dan Madonna yang didistribusikan oleh media, karena dapat mematikan/membunuh imajinasi mereka.

Kelompok liberal kritis berpandangan sebaliknya. Di era globalisasi dan teknologi mutakhir ini pengaruh media sangat intensif dan massif bagi peserta didik. Di balik media, tersaji berbagai ideologi sekaligus ketidaksetaraan kelas. Maka, kajian budaya harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agar para peserta didik menjadi lebih kritis.

Tugas mulia para guru dan dosen di berbagai institusi pendidikan harus meneruskan spirit otonomi pembelajaran yang telah muncul pasca perang dunia (*after Margaret Theacher*). Spirit dan kualitas pendidikan mengalami kegagalan apabila para peserta didiknya hanyalah diberi pelajaran tentang penggunaan media dalam pembelajaran (*learning through media*), sementara itu, kajian media dalam kehidupan manusia (*learning about media*) cenderung diabaikan. Melalui kajian budaya berbagai realitas yang tersembunyi (*hidden reality*) dan kesadaran palsu yang dibentuk oleh media sebagai corong utama kapitalisme dan elite politik status quo akan mampu terkuak secara tajam. Dengan demikian, seruan “*Cultural Studies Goes to School*” perlu terus digalakkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (Buckingham & Green, 2005).

Catatan fenomenologis David Oswell (2006) menarik dicermati untuk memahami esensi dasar kajian budaya (‘KB’). Sekitar tahun 1970-an, ada seorang anak muda di daerah selatan Brasil yang dibesarkan dalam budaya arab, berbicara bahasa Lebanon setiap harinya, mendengarkan lagu-lagu klasik, dan rajin ke tempat ibadah. Genre musik kesukaannya adalah Jazz dan Bosa Nova, mahir memainkan tarian samba dan latin, dan mampu menciptakan lagu berbahasa inggris dengan spirit anti rasisme. Inilah tipe manusia petualang budaya (*voyager of culture*). Budaya yang melekat pada dirinya bukanlah tertutup, tapi fleksibel dan mencair, melintasi batas-batas etnisitas dan negara, tanpa sekatan waktu dan ruang.

Dari sosok anak muda itulah, budaya dapat diartikan bukan sebagai sebuah kategori ide-ide tertentu, atau tentang kebiasaan yang diwarisi dalam jangka waktu yang lama, rumit, kompleks, dan berada di daerah pedalaman sebagaimana dalam kaca mata Antropologis. Budaya menjadi sesuatu yang material dan supra material dengan dua alasan. Pertama, praktik material yang dipengaruhi kekuatan teknologi dan ideologi. Kedua, pentingnya budaya yang menjadikan setiap orang sebagai manusia unik sesuai gaya hidupnya masing-masing. Karena itulah, disiplin budaya bukan lagi menjadi hak milik disiplin ilmu tertentu, tetapi bergantung pada pandangan para intelektual di berbagai arena pengetahuan.

Menurut William, konsep budaya yang awalnya bersifat natural (bercocok tanam/kultivasi) mulai berubah setelah terjadinya revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18. Pasca revolusi industri, konsep budaya berkaitan dengan empat hal. Yakni, gagasan umum atau kebiasaan berpikir manusia, pengembangan gagasan intelektual yang didasarkan pada definisi dan cara kerja imajinatif, tentang dunia artistik atau kesenian, serta jalan hidup yang sifatnya material, intelektual, dan spiritual (Oswell, 2006: 3-4). Kehadiran ‘KB’, menurut Stuart Hall, telah berpengaruh terhadap pendefinisian ulang tentang prinsip dasar Sosiologi.

Selama ini, Sosiologi cenderung mengkhususkan dirinya pada komunitas dan kehidupan masyarakat. Sosiologi mengalami keretakan saat ini, karena mengabaikan bahwa masyarakat sekarang berada di posmodernitas, dimana sekat-sekat budaya telah runtuh. Saat ini, masyarakat hidup dalam era poskapitalisme, posindustrial, poskolonial, posrealitas, dan konsumerisme. Masyarakat kontemporer ini diwarnai kehadiran budaya populer yang sifatnya artifisial, dangkal, produksi tanda di mana-mana. Ruang publik dipenuhi gaya hidup anak muda, media massa (cetak, elektronik, dan media sosial), kesadaran palsu efek manipulasi teknologi, serta budaya konsumtif sehingga keberadaannya menjadi rujukan nilai dan pedoman hidup yang baru.

Budaya bukan lagi hak milik kaum elite dan para borjuis, melainkan sudah menjadi bagian dari kelas sosial dan setiap komunitas. Di era posmodernitas, suprastruktur saling berdialektis dengan basis struktur. Ekonomi bukan lagi satu-satunya penentu gerak kehidupan masyarakat karena berelasi tumpang tindih dengan agama, hukum, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Dunia sosial adalah hamparan teks yang memberikan penamaan (*naming*) terhadap apapun yang hadir ke hadapan kita. Media adalah alat produksi tanda yang mendistribusikan makna sarat ideologis ke dalam kehidupan manusia setiap waktu. Media menyusup ke dalam rumah, hingga ke ruang privasi untuk menyajikan berbagai manipulasi politik, ekonomi, agama, pendidikan,

dan komunikasi. Maka, studi media secara kritis menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan dalam disiplin Sosiologi dengan menyertakan bidang ilmu sosial kemanusiaan lintas disiplin lainnya (Hall, 2005: 60-64).

Kehadiran teknologi sebagai “paket kilat” globalisasi telah mengubah cara hidup dan kesadaran manusia tentang tubuhnya (Raditya, 2014). Hampir semua produk yang kita konsumsi merupakan hasil produksi teknologi dan mencengkram secara halus tubuh manusia tanpa kita sadari sepenuhnya.

Teknologi sudah memposisikan dirinya sebagai “maha pencipta”. Dengan teknologi, manusia dapat dikloning. Melalui peran teknologi, tercipta robot pintar mirip manusia. Teknologi membuat manusia menjadi setengah robot. Manusia berubah menjadi organisme sibernetik yang diimajinasikan sebagai manusia super sebagaimana tontonan di media massa (Haraway, 1991). Sehingga, tubuh kita menjadi arena kuasa media, wacana, dan teknologi. Tubuh lantas dengan mudahnya dimodifikasi, dimutilasi, serta disuguhkan kepada khalayak ramai secara “telanjang bulat”. Pakaian yang melekat pada tubuh bukan lagi bertujuan menutup aurat sebagaimana anjuran agama. Kini, pakaian telah berubah sebagai simbol prestisius dan gaya hidup. Pakaian hanyalah kain yang digunakan menutupi badan, tetapi tidak melenyapkan seluruh superioritas maskulinitas laki-laki dan budaya patriarkhi. Tubuh menjadi arena pendidikan karena di dalamnya melekat berbagai nilai, norma, budaya, dan moralitas. Tetapi, unsur pendidikan di balik tubuh mengandung resiko perubahan karena adanya bujuk rayu kenikmatan yang ditawarkan iklan dan libido ekonomis institusi modernitas (Evans dan Davies, 2004).

Peran ‘KB’ sangat diperlukan untuk memasukkan fenomena masyarakat teknologis dan budaya pertubuhan tersebut ke dalam bagian penting pendidikan berbasis kajian budaya masyarakat kontemporer sebagaimana terlihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Kajian Budaya dan Unit Kajiannya

Karakteristik Kajian Budaya	Unit Kajiannya
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menelaah pokok persoalan praktik budaya yang terkait dengan kekuasaan (bagaimana kekuasaan mempengaruhi kebudayaan) ➤ Menganalisis konteks sosial, keruangan dan ranah politik tempat budaya mewujudkan dirinya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya Populer ➤ Semiotika ➤ Ideologi-Hegemoni ➤ Teori Kritis

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya sebagai komoditas (materialisme kultural) ➤ Budaya yang berwajah ganda: pragmatis dan intelektual ➤ Budaya kontemporer di era post-kapitalisme ➤ Interdisipliner (Sosiologi, Antropologi, Filsafat, Agama, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Seni, Pendidikan Kritis, Sejarah, dll) ➤ Komitmen dalam menyingkap struktur dominasi ➤ Meruntuhkan totalitas, anti-pusat, peduli lokalitas dan kelompok pinggiran ➤ Budaya sebagai Tanda ➤ Budaya bersifat Hybrid (lentur, fleksibel, lintas batas, beragam dalam kesatuan, kesatuan dalam keberagaman) ➤ Posstrukturalisme 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Feminisme dan maskulinitas ➤ Teknologi dan Cyborg ➤ Kajian Kritis Media ➤ Musikologi ➤ Budaya Poskolonial ➤ Analisis Wacana ➤ Selera kelas dan Gaya Hidup ➤ Konsumerisme dan Fesyen ➤ Kajian-kajian Intelektualitas dan Intertekstualitas
--	---

Sumber: Sardar-Van Loon, 2005; Babe, 2009; McLennan, 2006; Hall, 2005

Pendidikan Kaum Tertindas: Mesin-Mesin Pembunuh Pendidikan

Pendidikan kaum tertindas meniscayakan adanya harkat dan martabat kemanusiaan yang terampas oleh kaum penindas sehingga secara struktur sosial, ekonomi, dan politik kaum tertindas ini tidak lagi menyadari dirinya sebagai manusia yang hidup berada dan bersama-sama di dunia dengan kata-kata, refleksi, dan aksinya mengubah dunia (Freire, 2008). Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan adalah sebuah proses penyempurnaan semua individu sebagai peserta didik, baik potensi intelektual atau kognitif, mental, rasa, karsa maupun kesadaran martabat kemanusiaannya. Artinya, pendidikan selalu bertujuan untuk membina kepribadian manusia menjadi lebih ‘manusiawi’ dan mengembangkan sekaligus mengutuhkannya potensi kemanusiaannya yang masih terpendam dengan mengedepankan suasana cinta-kasih, kedamaian, keadilan, serta mengesampingkan perilaku yang menindas serta diskriminatif (Murtiningsih, 2004:6-7).

Karena itu, pendidikan kritis hadir, bahkan, sangat dibutuhkan sepanjang praktik kekuasaan sebagai mekanisme dominasi dan penguatan kosa-kata diskriminasi, ketidaksetaraan, serta ketidakadilan kelas, rasial, gender, hingga historis masih bercokol di ruang-ruang kelas kita tanpa memberikan kemungkinan terjadinya budaya demokratis, baik bagi para pendidik dan peserta didiknya (Giroux, 2011). Salah satu mekanisme dominasi dan kosa kata penindasan itu terlihat dari penggunaan seragam di institusi pendidikan formal. Pakaian, meminjam pisau analisis genealogis Foucault (1994 dan 1977) mengandung kedok pengetahuan dan penubuhan yang sengaja ditutup-tutupi oleh rezim kuasa untuk mengendalikan

diskursus kebenaran dalam rentang historis sebagai permainan diskontinuitas pembentukan mentalitas masyarakatnya. Dalam konteks pendidikan, penyeragaman pakaian tersebut bukan seperangkat alat penutup badan, melainkan juga selubung politik mentalitas masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh saksi sejarahnya:

“Setelah tahun 1945 bentuk pakaian Indonesia tidak berubah secara mencolok. Perubahan hanya terjadi pada kualitas bahan yang secara berangsur-angsur membaik. Selama masa Revolusi, pakaian barat tersedia dalam skala terbatas hanya di kota-kota besar yang dikuasai Belanda. Sebagian besar pemimpin Republik mengenakan kemeja dengan leher terbuka. Dasi tidak lagi dikenakan, bahkan, jika seseorang mengenakan jas sekalipun. Jas dan kemeja-kemeja terbuka diadopsi oleh para perwira tentara Republik selama masa Revolusi. Sandalet bertahan lama daripada dasi, namun keberadaannya terhenti sama tiba-tibanya seperti saat permulaan pemakaiannya. Sandalet terkenal di antara para guru dan dosen-dosen selama era Sukarno. Sandalet ini populer terutama karena nyaman, murah, dan sangat cocok bagi iklim tropis yang lembab. Akan tetapi, tiba-tiba setelah kudeta Komunis (30 September 1965), tidak seorang pun berani mengenakannya lagi. Sandalet “dilarang” karena diidentifikasi dengan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan HSI (Himpunan Sarjana Indonesia), keduanya dianggap bersimpati

kepada PKI (Partai Komunis Indonesia)” (Danandjaja, 2005: 372)

Pakaian pada dasarnya mengacu pada stabilitas pola tradisional sebagai regulasi sosial dan definisi identitas etnik dan agama yang tetap sekaligus mapan secara historis, seperti Sari di India, Batik di Jawa, Pésak di Madura, Sarung di kalangan santri di nusantara, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di tangan suatu rezim fasisme, seperti di Italia pada masa kekuasaan Musollini, misalnya, suatu pakaian berubah fungsinya sebagai emansipasi nasionalisme Italia. Sebagaimana dikatakan Paulicelli (2004: 75)

“ide emansipasi berhubungan erat dengan tujuan fasisme untuk memproyeksikan tatanan citra kebangsaan dengan penguatan identitas nasional yang tidak mengizinkan pertentangan karena kekuasaan terbesar melingkupi kekuasaan yang kecil, dan kekuasaan yang kecil menopang kekuasaan tunggal. Emansipasi mode berpakaian ini memiliki dua dampak besar bagi kehidupan suatu bangsa: pertama, tumbuhnya industri tekstil yang bersaing dengan industri luar negeri, dan yang kedua, menciptakan kesadaran gaya khas Italia serta dapat dikagumi oleh bangsa lain di dunia ... Karena bagi Musollini, gaya, keindahan, dan penampilan citrawi merupakan basis sentral suatu proyek fasisme”.

Itulah sebabnya, pakaian di tengah masyarakat modern bukan lagi bernilai guna sebagai awal mula kehadirannya, melainkan bermetamorfosa sebagai tanda dominasi. Menurut Manlow (2009: 7) bahwa “jas dan gaun sebagai mode pakaian Barat adalah prototipe pakaian yang responsif terhadap ide-ide penampilan saat ini dan keinginan akan hal-hal kebaruan, dan dengan demikian sepenuhnya telah menjadi mode arus utama. Dari tipe-tipe dasar ini muncul berbagai bentuk lainnya: rok, celana jins, celana pendek, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya menciptakan trend baru: rok mini, “hot pants”, jins modifikasi dengan harga murah, dan lain-lainnya.

Dalam mode penampilan ini, fesyen mungkin memiliki kemiripan dengan pakaian sehari-hari. Tetapi, fesyen tidak seperti pakaian, karena ia bisa ditafsirkan ulang atas sifat ketidakstabilannya dan kerumitannya dalam mekanisme penandaan industrialisasi”. Sejak ditemukannya mesin pemintal benang dan anyaman kain sebagai produk zaman revolusi industri di Eropa, mesin-mesin produksi pakaian yang bertujuan untuk menciptakan mode

penampilan telah menjadi teknologi konspiratif antara kepentingan manusia dan tekanan teknologis sebagai mesin peradaban Barat yang perkembangannya menginvasi peradaban masyarakat di belahan dunia lainnya. Mumford (1970: 164) mengatakan bahwa “setelah abad ke-16, kepentingan manusia dan dukungan teknologis berkonspirasi mendominasi peradaban Barat. Kemudian, kekuatan-kekuatan ini bersatu padu dalam ketidaksadaran sebagai mitos mesin yang sumber dayanya bisa diisi ulang.

Sebagaimana mitos pada umumnya, transformasi sosial dan teknologi ini dapat dirasionalisasikan sebagai upaya praktis besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kekayaan material. Tetapi, di balik itu semua terdapat dorongan yang sangat subjektif dan cenderung obsesif terhadap penaklukan alam dan pengendalian kehidupan manusia sehingga mempengaruhi semua hal yang sebelumnya tidak mungkin terjamah dan terjangkau umat manusia”.

Mesin penyeragaman pendidikan tidak serta merta keluar dari horizon historis perjalanan bangsa ini. Sekalipun perjalanan historis bangsa ini tampak tercerai-berai, diskontinyu, terserak-serak, dan seakan terpisah ruang dan waktu, mentalitas masyarakatnya sebagai pewaris mentalitas kolonial sewaktu-waktu muncul dalam kehidupan masyarakat pasca kolonial (Lombard, 2000).

Perjumpaan dan hubungan kolonisasi yang pernah menimpa bangsa ini memunculkan ‘kebudayaan indis’ dari aspek kesenian, kesusastraan, hingga pendidikan yang tampil secara tekstual berkat dukungan mesin cetak (Faruk, 2007). Melalui kehidupan masyarakat pasca kolonial ini setidaknya terjadi momen-momen ambivalensi mengenai struktur sosial kaum terjajah yang ditandai oleh transnasional sebagai pemindahan sejarah lintas bangsa dan translasional sebagai lokasi penandaan budaya masyarakat bersangkutan (Bhaba, 1994).

Sebagai gambarannya, kita bisa membaca novel tetralogi pulau buru Pramoedya Ananta Tour yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing, mulai Amerika, Perancis, Jerman, Belanda, hingga Malaysia dan dipelajari oleh peserta didik tingkat persekolahan sebagai pegangan mempelajari sejarah kolonial dan kebangkitan di Indonesia. Dalam konteks penampilan atau mode berpakaian, melalui “Bumi Manusia” terlihat dari tokoh utama Minke, seorang pemuda keturunan bangsawan Jawa dan mengenyam sistem pendidikan model Eropa di Surabaya.

Perkenalannya pada gaya penampilan peradaban Eropa terlihat dari kekaguman Minke selain terhadap ilmu pengetahuan juga terhadap

gambar Sri Ratu Wilhelmina yang terpampang di kamarnya dan di sudut-sudut jalan utama di Surabaya ketika dia naik tahta 7 September 1898 serta menjatuhkannya sebagai kawulanya. Sebagai anak zaman kolonial, dia gemar memakai pakaian ala Eropa, setelah jas berwarna putih dengan sepatu hitam di kaki, baik pada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi, orang Eropa, keturunan Belanda Totok, tidak semuanya menyukai gaya penampilannya.

Momen ketegangan budaya tersebut terjadi ketika Minke berkunjung ke tempat tinggal Annelies di Wonokromo dan ketika sedang melangsungkan tradisi makan malam dengan hidangan Eropa bersama teman serta segenap keluarga Nyai Ontosoroh (ibu Annelies), tiba-tiba:

“...Kuletakkan sendok dan garpu di atas piring, mengikuti contoh Annelies, berdiri memunggungi meja makan. Nyai juga berdiri bersiaga. Bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan, makin lama makin panjang. Langkah sepatu yang terseret semakin jelas. Kemudian muncul seorang lelaki Eropa, tinggi, besar, gendut, terlalu gendut ... Ia melihat ke arah kami. Berhenti sebentar.

“Ayahmu?” bisikku pada Annelies.

“Ya” hampir tak terdengar.

Tanpa mengubah arah pandang Tuan Mellema berjalan menyeret sepatu langsung menuju padaku. Padaku seorang. Ia berhenti di hadapanku. Alisnya tebal, tidak begitu putih, dan wajahnya beku seperti batu kapur. Sekilas pandanganku jatuh pada sepatunya yang berdebu, tanpa tali. Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku: pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara. Buru-buru aku angkat lagi pandanganku dan beruluk tabik:

“Selamat petang, Tuan Mellema!” dalam Belanda dan dengan nada yang cukup sopan.

Ia mengeram seperti seekor kucing. Pakaianya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya. Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis, kuping.

“Siapa kasih kowé ijin datang kemari, monyet!” dengusnya dalam Melayu-pasar, kaku dan kasar, juga isinya.

“Kowé kira, kalo sudah pake pakean Eropa, bersama orang Eropa, bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa? Tetap monyet!”

“Tutup mulut” bentak Nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. “Ia Tamuku”.

“Nyai!” sebut Tuan Mellema

“Eropa gila sama dengan Pribumi gila!” sembur Nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala memancarkan kebencian dan kejiikan. “Tak ada hak apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri!” Nyai menunjuk ke suatu arah. Dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing.

... Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. “Jangan kau anggap aku biadab” katanya terus dalam Belanda yang patut. “Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki memang. Orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini, Minke, orang-orang Eropa sendiri” suaranya minta kepercayaanku. “Tidak disekolahkan, di dalam kehidupan ini.

Aku diam saja. Setiap patah kata dari kata-katanya kupakukan dalam ingatanku: tidak di sekolahkan, di dalam kehidupan! Jangan anggap biadab! Orang Eropa sendiri yang mengajar begini ...” (“Bumi Manusia”, Tour, 2002: 42-44)

Penampilan diri dalam mode berpakaian hingga dekorasi penunjangnya seperti berbahasa dan penanda tatanan keteraturan tindakan yang dilegitimasi secara sosial dibingkai oleh tuntutan budaya kolonial itu menyelinap masuk ke dalam proses pendidikan pada ruang kehidupan sehari-hari hingga sekarang. Jangankan bahasa lisan atau ujaran, dalam bahasa simbolik melalui bahasa tubuh misalnya, begitu kentara sekali terjadinya praktik sosial keseharian yang mengagungkan orang-orang secara hirarkis di lingkungan pendidikan melalui gerakan badani (seperti membungkuk, sikap duduk saat berhadapan, dan tidak menatap mata ketika berbicara). Sehingga, interaksi sosialnya terasa lebih canggung.

Hal ini membuat proses pendidikan seolah kehilangan kelenturan, kecairan, serta suasana keakraban yang santai dan menyenangkan, namun

padat makna. Orang Indonesia sebenarnya tidak suka formalitas, hampir mirip dengan orang Amerika khususnya kaum mudanya. Terlihat dari gaya berpakaian ketika ke kampus. Anehnya, di dalam kegiatan pendidikan lainnya yang bersinggungan langsung dengan atasan, maka waktu acara terasa lebih lama, suasananya jenuh dan membosankan karena praktik formalitasnya dalam serangkaian kegiatannya. Bahkan, formalitas itu juga dilakukan di kala ada kegiatan akademik seperti seminar, bedah buku, kuliah umum, maupun diskusi publik. Budaya mempertahankan hirarki dan simbolisasi anutan yang tidak pernah hilang adalah pidato (kata sambutan) dari pejabatnya. Hal yang kadang begitu aneh adalah adanya banyak deretan nama pejabat penting yang harus disebut satu persatu. Kalau tidak disebut mereka akan bersungut-sungut (Sadtono, 2003: 29-30).

Hasil penelitian Kuntowijoyo (2004) di Solo menunjukkan bahwa di Jawa setidaknya ada tiga kelas sosial budaya yang bersifat hirarkis. Yakni, golongan raja, priyayi, dan kawula gusti. Ketiganya memiliki budaya dan simbol yang berbeda-beda.

Raja merupakan penguasa rakyat dan alam semesta. Raja juga dianggap menjadi wakil Tuhan di bumi. Pakaian yang dipakai dalam menjalani rutinitas sehari-harinya adalah simbol keagungan di mata rakyatnya. Bahkan, pakaian juga menjadi aturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Diceritakan bahwa rakyat biasa yang hendak memasuki istana atau wilayah kerajaan diwajibkan melepaskan bajunya. Mereka yang bertemu raja ataupun keturunan raja diwajibkan memberikan hormat dan sembah.

Kekuasaan raja juga dapat dilihat dari banyaknya istri dan selir-selirnya. Pakubuwono X di Surakarta misalnya memiliki 4 istri resmi dan jumlah selir yang tidak terbatas jumlahnya. Priyayi merupakan penghubung antara raja dan rakyat di daerah. Mereka bertugas mengabdikan dan melayani raja. Loyalitas dan kepercayaan raja terhadap kerja mereka sangat ditentukan oleh kemampuannya mengamankan dan melaksanakan kepentingan raja. Pada masa hindia-belanda, priyayi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pangreh praja (atau aparatus birokrasi modern seperti saat ini). Gaya hidup mereka memang nyaris tidak jauh berbeda dengan lingkungan kerajaan. Tetapi, para priyayi ini diwajibkan memiliki kemampuan literer dan seremonial untuk melayani raja ataupun penguasa hindia-belanda yang sedang berkunjung dan mengadakan acara tertentu.

Para priyayi di kabupaten (yang dipimpin bupati) pada masa tanam paksa dan sesudahnya semakin diperkuat untuk mengawasi sumber-

sumber pemasukan ekonomis hindia-belanda di daerah (seperti candu, rumah gadai, judi, persawahan, dan lain sebagainya). Banyaknya istri sebagai gaya hidup penampilan diri priyayi di daerah juga tidak dipersoalkan selama tidak menikahi putri kerajaan ataupun keturunan Cina yang dapat mengelurkan ongkos mahal untuk membiayai mode penampilan dan gaya hidup mereka (Ong Hok Ham, 2002:16-17).

Sementara itu, kawula gusti atau disebut juga rakyat jelata atau wong cilik adalah kelompok sosial yang tidak memiliki jabatan dan hak istimewa tertentu. Mereka adalah orang-orang yang menggadaiakan dirinya pada penguasa dan simbol kerajaan (Tour, 1994). Kebebasan mereka dibatasi oleh statusnya sebagai rakyat kecil yang berada di kelas budaya paling bawah dari sistem kerajaan dan pemerintahan. Kemiskinan dan kebodohan merupakan penyakit yang tidak pernah kunjung usai diobati oleh rakyat. Pekerjaan mereka tidak pernah lepas dari babu, prajurit, kuli, ataupun pencuri. Mereka juga harus menyerahkan hasil panennya untuk upeti dan menyiapkan kebutuhan tenaga kerja ataupun makanan pada saat ada acara kerajaan, bupati, serta kesultanan. Mereka tidak diperbolehkan mengadopsi gaya hidup priyayi dan raja (Pamberton, 1994).

Pada saat berbicara dengan priyayi dan keturunan raja, rakyat harus menggunakan bahasa *kromo*, simbol bahasa hirarkis dan penghormatan pada penguasa setempat. Bahkan, nama rakyat kecil dengan kalangan priyayi dan raja menunjukkan perbedaan mencolok yang timpang. Priyayi dan raja biasanya namanya sangat panjang dan penuh gelar kebangsawanan (baik yang diberikan oleh kerajaan ataupun kolonial), sementara nama seorang rakyat kecil hanya seadanya. Memanggil nama rakyat kecil cukup dengan namanya saja, seperti Inem, Leman, Ipah, Kusno, dan lainnya. Sementara itu, rakyat kecil harus memanggil nama seorang priyayi dengan panggilan "Ndoro" atau "Bendoro", "Ki Gusti", "Raden Bagus", "Raden Ayu", "Sri Paduka", dan lain sebagainya.

Budaya adiluhung yang melestarikan kastanisasi masyarakat Jawa ini menjadi laku hidup sehari-hari sekalipun gerakan kebangkitan nasional anti rezim kolonial yang cenderung merendahkan golongan Pribumi sedang berkembang dan kaum terpelajar Pribumi sebagai basis pendukungnya telah terdidik secara modern. Melalui adegan dalam "Jejak Langkah", misalnya, seorang dokter Jawa yang bekerja pada Gubernur Belanda merasa resah dengan kampanye boikot yang digalang oleh Minke melalui surat kabarnya, "Medan".

Sekalipun dokter Jawa, Mas Sadikoen, yang bertugas di Kroya (sekarang wilayahnya

bagian dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah) merupakan anggota organisasi pergerakan Boedi Oetomo (B.O), program sosialisasi gerakan boikot terhadap golongan pembesar Pribumi dan Belanda yang disebarluaskan Minke di media cetaknya rupanya membuatnya terancam keluhuran kepriyaiannya. Ketika keduanya bertemu dalam gerbong kelas satu kereta api dalam perjalanannya menuju Yogyakarta untuk menghadiri kongres kedua B.O pada Desember 1908, kita bisa menyimak adegan ambivalensi dan sumber kemarahan dokter Jawa terhadap sikap kritis politik penampilan yang menjadi kehendak pembebasan umum Minke:

“Koranmu memang mengangumkan. Tahukah kau bagaimana di Kroya orang mengancam pembesarnya? Nanti akan sahaya sampaikan pada Bendoro Paduka Tuan Besar Redaktur Kepala ‘Medan’. Dan terbebaslah orang itu dari penganiayaan pembesarnya”

“Syukurlah Hindia mempunyai koran Pribumi,” jawabku. “Setidak-tidaknya keadaan tidak menjadi lebih buruk karena itu”.

“Aku masih terheran-heran dengan tulisanmu tentang boycott itu. Sebagai pengetahuan, ia menjungkirbalikkan pandangan terpelajar selama ini, terutama kaum priyayi. Untuk diketahui umum, apa itu tepat? Kan itu mengajar orang menggunakannya, sekalipun sekarang belum jelas terhadap siapa?”

“Kan Boedi Oetomo memuliakan demokrasi?”

“Kami belum pernah bicara tentang itu”

“Kau sendiri, setuju?” desakku. “Kan organisasi modern lahir karena pilihan dan kesukarelaan yang demokratis?”

“Tentu, dan kita tahu, demokrasi tidak membutuhkan boycott.”

“Demokrasi, dalam arti setiap orang berhak mengetahui semua yang kita ketahui. Kau kuatir orang lain tahu apa yang kau tahu?”

“Bukan itu. Kau memberikan senjata pada orang yang tidak membutuhkan.”

“Kalau orang itu tidak butuh, dia akan menyimpannya. Kalau dia butuh akan menggunakannya.”

“Untuk apa? Untuk melawan Gubernur?” tetaknya.

“Kan kau anak kesayangan Gubernur Jenderal Van Heutsz?” ia menjenguk ke luar jendela.

... Dan begitu ia menarik kembali kepalanya dari jendela, aku bertanya:

“masih ingatkan kau pada Tanca? Ia mengganggu tanpa melihat padaku. Ilmu kedokteran pun tak jarang jatuh pada pribadi tak tepat. Ia tidak menyembuhkan, ada yang membunuh”

Ia menggeragap bangun dari dunia kepriyaiannya. Tapuk matanya terbuka lebar dan dipandangnya aku seperti bawahannya. Perasaan, bahwa seorang priyayi jauh lebih tinggi daripada pekerja bebas, rupanya mulai menyinggung pernya.

“Apa ucapan itu patut pada seorang dokter Gubernur?” ...

“Kau lupa, aku pegawai Gubernur. Anak kesayangan Gubernur Jenderal mestinya lebih tahu bagaimana harus bicara dengan pegawai Gubernur.”

“Baik. Jadi kongres nanti harus dianggap sebagai kongresnya para priyayi Gubernur?”

“Hati-hatilah. Juga para Pengeran, juga wakil Gubernur, akan hadir,” ia semakin bernada priyayi ...

“Priyayi Gubernur dan para Pengeran pun tidak akan lebih tinggi dari setiap orang yang bukan priyayi dan bukan Pangeran”

“Memang pendidikan diperlukan untuk dapat mengenal kemuliaan. Kan kau keluarga bupati? Diajar membedakan antara anak gelandangan sepanjang jalan dari anak sekolah? Kan anak sekolah dididik untuk memuliakan para priyayi, para pejabat, para raja dan keluarganya?” wajahnya sudah mulai kemerah-merahan karena marah.

“Dan apa kemuliaan yang ada pada mereka yang bukan keluarga raja

dan priyayi? Apakah tak ada kemuliannya sama sekali? Hanya comberan?" ...

Dan dengan sengaja aku tutup tutup mataku dan pura-pura menguap. Dari balik bulumataku kulihat ia menggigit bibir, mengambil kembali 'Medan' dari saku dan mulai membaca.

Hati masih resah. Inikah wajah terpelajar Pribumi? Lantas apa guna organisasi kalau bukan bergerak ke arah plus? Kalau Sadikoen, dokter Jawa Gubernur ini mewakili semangat B.O, organisasi ini tinggal jadi perkumpulan kamarbola tanpa kamarbola." ("Jejak Langkah", Tour, 2006: 406-410)

Kegiatan pendidikan yang mengutamakan politik penampilan dan tidak ada kaitannya dengan kualitas pengetahuan dan penopang aksi perubahan sosial itu sekan mirip dengan pusat-pusat kerajaan yang dipenuhi dengan ritual-ritual. Di dalamnya tidak bisa meninggalkan dan mengabaikan begitu saja budaya seremonial dan upacara dengan beragam rupa.

Menurut Geertz (1980) keseluruhan upacara ini memainkan tema-tema utama dalam sebuah negara teater yang dilakukan berulang kali dengan seribu cara untuk memberi gambaran bahwa pusat adalah anutan dan status adalah dasar kekuasaan. Maka, berbagai perayaan perlu dipertontonkan dan dipertunjukkan sebagai penegas dan pengingat tentang berjalannya suatu budaya penghormatan terhadap apapun yang telah disakralkan dan kepada sekelompok figur sentral yang harus "dihormati".

Budaya penghormatan pada kegiatan pendidikan yang dilembagakan melalui proses internalisasi kolonial di masa silam telah menimbulkan rasa gerah dari sebagian masyarakat karena menciptakan jarak sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, bagi sebagian yang lainnya budaya penghormatan sebagai sikap melegitimasi kontradiksi sosial secara hirarkis merupakan jalan penyelamatan diri dari ancaman ketidakstabilan penampilan. Ironisnya, ada pula sejumlah kampus yang tujuan utamanya mendidik generasi mudanya menjadi lebih kritis dan peka terhadap berbagai bentuk pengkhianatan nilai-nilai pembebasan manusia dari tanda dominasi telah dirasuki pendidikan gila hormat ini.

Akhirnya, masyarakat modern memerlukan kegilaan, apabila menganggap dirinya tidak gila, maka mereka akan dimasukkan ke dalam kegilaan dengan bentuk yang lain: karena kegilaan bukan perkara adanya gejala terjangkitnya

gangguan medis, melainkan gangguan terhadap stabilitas rezim penjaga kedigdayaan otoritas (Foucault, 1988). Itulah sebabnya, dalam situasi kegilaan tidak mungkin pendidikan menciptakan peradaban berkemajuan, baik dalam tindakan, mentalitas, maupun produk material seperti perangkat teknologi komunikasi dan media apapun itu bentuknya. Karena di baliknya selalu terkandung tanda dominasi yang diartikulasi melalui pengetahuan, pembiasaan, dan praktik pembahasaan yang secara historis hanya memodifikasi budaya kolonial dalam bentuk yang baru sehingga jurang pemisah antara penguasa dan rakyatnya, pendidik dan peserta didiknya, produsen dan konsumen teknologis, terus terpelihara karenanya apa yang dimaksud dengan kemajuan hanyalah kemajuan semu belaka, kemajuan artifisial yang penuh cacat eksistensial.

Dengan demikian, produk pendidikan, baik manusia terpelajar maupun benda-benda material, baik di dunia nyata maupun di dunia maya sebagai kelanjutan dunia kehidupan dalam masyarakat teknologis, hanyalah tanda-tanda kemajuan yang dibuat-buat untuk membedakan dirinya dari kehidupan masa lalunya, generasi terdahulunya, maupun spesies binatang melata lainnya. Boleh jadi sebagian dari kita seakan merasa bangga dengan adanya perangkungan institusi pendidikan yang sepertinya mengalami peningkatan berdasarkan lembaga pemeringkatan pangkalan data pendidikan berbasis elektronik dan algoritmatis, namun, kita merasa sinis ketika di dalam kehidupan pendidikan persoalan relasi kemanusiaan yang kaku, baku, beku, semena-mena, korup, mekanis, dan cenderung memaksa karena tuntutan kegilaan pembesarnya terus mendera bangsa kita sendiri.

Sebagai bangsa pengekor, kita memang tergolong latah mengikuti jejak kehidupan bangsa maju di dunia Barat dalam hal budaya siber yang telah menyebar luas secara mantap di sana sejak pertengahan dekade 90-an dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tergolong lengkap dibandingkan bangsa kita. Ketika internet atau *world wide web*, aplikasi media sosial berskala global seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapps*, hingga *Youtube*, telah diproduksi massal di negara asalnya, kita justru menjadi konsumen potensial sekaligus loyal menggunakannya belakangan ini, dan semakin semarak penggunaannya pada saat momen-momen politik tiba.

Budaya siber ini memperkuat konsep tentang kekejangan neologis yang berakibat pada ketersebaran dan permutasian tentang diri kita sendiri sebagai subjek yang mobil atau bergerak secara otomatis layaknya virus atau meme sehingga interaksi melalui teknologi baru itu membuat pengalaman keintiman dengan mesin-mesin, seperti

di depan komputer, terkoneksi melalui internet, kenikmatan berselancar dan memencet tombol telepon genggam melalui layar datar sebagai upaya mengunggah kesadaran, menghubungkan kita pada kisah, gagasan, dan citra yang lain di dalam kebebasan informasi, multi media, multi topik, dan multi interaksional sebagai paket kiriman dari keberadaan teknologi media dan informasi (Bell, 2006).

Berbagai institusi pemerintahan, keagamaan, termasuk juga pendidikan yang terkena imbasnya berangsur-angsur membuat program baru berupa pusat atau pangkalan data (*database*) elektronik sebagai bentuk pelayanan jarak jauh dengan harapan memudahkan kerja-kerja birokrasi yang menjangkau semua kalangan dari penjuru daerah. Tetapi, pusat data elektronik merupakan super panoptikon yang memperlancar masuknya subjek ke dalam teknologi kekuasaan dan mikro fisik kekuasaan anonim yang memudahkan diskursus sebagai ekspresi subjek yang berupaya memaknai kehidupannya dari tindakan membaca dan mendengarkan, bergerak dari kata menuju kesadaran, bekerja melalui penyusunan dan pengartikulasian beragam jenis praktik, institusional, pendisiplinan, pertentangan, dan lain sebagainya dengan merayakan kehilangan daya kepemilikan dan arti kepengarangan (Foster, 2006).

Berdasarkan hal itu, tidak mengherankan identitas diri kita sebagai warga negara, anggota organisasi, kependudukan, populasi kependidikan, partisipan politik, konsumen, anggota kemiliteran, peserta jaminan kesehatan, dan lainnya bukan lagi menjadi milik kita sendiri sebagai pemilik pribadi karena siapa saja bisa mengaksesnya dan menggunakan berdasarkan kepentingannya yang lebih luas. Itulah sebabnya, kita terkadang terkejut ketika tiba-tiba menerima pesan singkat program promosi korporasi yang tidak pernah kita ikuti, tagihan kartu kredit yang tidak pernah kita gunakan untuk membeli, pemberian simbol jempol ("*like*") di media sosial kita tanpa pernah kita melakukannya atas dasar pertimbangan diri sendiri, atau jaringan internet mendadak mati hanya karena percakapan di media sosial dianggap mengarah pada upaya mengkritisi janji-janji pemerintah yang hipokrit serta kebijakan yang berbau konspirasi.

Perubahan teknologi ini mewujudkan juga dalam hal yang lebih serius, semisal bocornya rahasia negara, atau serangan siber terhadap kekuatan intelijen dan pertahanan negara pada tingkat tertinggi, seperti yang diperagakan Wikileaks (Heryanto, 2015:13). Secara politik, beberapa waktu lalu kita sempat terperangah melihat suatu peristiwa terjualnya data para pengguna *Facebook* untuk mendukung kandidat Presiden merebut kursi di negara adidaya. Dalam tata kelola pendidikan tinggi, semua dosen

diwajibkan mengisi beban kerjanya berbasiskan elektronik sehingga sempat membuat jebol kapasitas memori perangkat induk pengelolanya, tetapi, beban kerja ini tidak mengurangi kerja akademik mereka karena pada saat proses kenaikan pangkat atau penentuan angka kreditnya para dosen dipaksa memikul beban berlipat ganda karena mereka harus melakukannya secara manual sehingga terkesan pelayanan aparatus birokrasi pada bidang tersebut tidak menjalankan pembagian tugasnya secara prima.

Dengan arti lain, dunia pendidikan atau secara lebih luas lagi dunia kehidupan kita hari ini ibarat 'rumah kaca' yang mengeluarkan aparatus keamanan sebagai mandor pengawas pada masa orba, tetapi, memasukkannya aparatus keamanan baru untuk merehabilitasi kesadaran resistensi sekalipun upaya itu hanya membunuh esensi dasar manusia yang berhati nurani. "Rumah Kaca" setidaknya memberikan kita gambaran tentang momen kejatuhan manusia sejati ini ketika seorang aparatus keamanan kolonial yang karakternya sebagai sosok manusia bermuka dua, Pangemanann, menghancurkan gerakan perlawanan Minke yang ingin membebaskan bangsanya dari penderitaannya:

"Maka kepolisian menjadi sumber penghidupan dan sekaligus kerangkeng. Aku polisi, sekaligus tawanan polisi. Seakan sudah kehilangan kemauan sendiri, buta terhadap ajaran tentang kebajikan, tak tulus terhadap segala didikan Tuan De Cagnie dan istri, terhadap oom dan tante Pengemanann.

Dari buku-buku dan ilmu yang kutimba di Eropa tentang pembebasan manusia dari penindasan badani dan rohani—politik dan ekonomi—aku sepenuhnya mengerti, kekuasaan kolonial di atas bagian bumi mana pun jahat. Aku menyadari, aku jijik terhadap pekerjaanku setelah meningkat jadi Ajung Komisaris, semua kemuliaan yang ada dalam diriku terasa tertindas demi menghidupi keluargaku.

... Pekerjaanku yang baru: meneliti tulisan-tulisan Pribumi yang diumumkan di koran dan majalah, menganalisa, membuat interpiu dengan penulis-penulis itu, membuat perbandingan-perbandingan, dan membuat kesimpulan tentang bobot, kecenderungan dan itikad terhadap Gubernur Hindia Belanda.

... Sejak hari itu aku menjadi tukang cat, yang membikin penulis-penulis itu menjadi berwarna di mata

Gubernur. Pekerjaanku bukan untuk ilmu dan perkembangannya, tetapi untuk kelangsungan kekuasaan Gubernur ...

Untuk keselamatan diri hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh: bermuka dua dan berhati banyak dengan sadar. Setelah terlatih membiasakan diri bermuka dan berhati belah berkeping-keping begini, maka nurani ini sudah cukup kuat untuk melahirkan watak baru bagi manusia Pangemanann ini. Namun, aku selalu saja merindukan manusia Pangemanann yang dulu, yang tulus, yang sederhana, yang percaya pada kebajikan manusia ...

Bukankah sudah jelas? Baik sebagai Inspektur maupun Komisaris Polisi, pekerjaanku tak lain terus mengawasi ketat sebangsaku demi keselamatan dan kelangsungan hidup hidup Gubernur. Semua Pribumi—terutama Pitung-Pitung modern yang mengusik-usik kenyamanan Gubernur—semua telah dan akan kutempatkan dalam sebuah rumah kaca dan kuletakkan di meja kerjaku. Segalanya menjadi jelas terlihat. Itulah pekerjaanku: mengawasi semua gerak-gerik seisi rumah kaca itu ...” (“Rumah Kaca”, Tour, 2006: 95-101)

Penutup

Beragam mode teknologi media informasi dan komunikasi, mulai dari radio, televisi, telepon genggam, internet, media sosial, hingga komputer merupakan produk teks budaya, lebih tepatnya, serangkaian teks, baik itu yang terkandung di dalam perangkat keras maupun perangkat lunak, karenanya ia tertulis (*encoded*) dan dapat terbaca (*decoded*) melalui konteks kultural yang heterogen, sehingga teknologi selalu menciptakan kehidupan ganda (Bell, 2005: 8).

Produk ilmu pengetahuan ini menuntut adanya analisa tentang dampak teknologi terhadap politik, identitas, dan kehidupan kita sehari-hari, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah analisa dampak politik, identitas, dan kehidupan kita sehari-hari terhadap saintifik dan teknologi sebagai komitmen kita terhadap panggilan kebaikan hidup manusia (Best dan Kellner, 2001: 17). Pendidikan sebagai penunjang utama menciptakan manusia paripurna pada perkembangannya tidak mungkin terbebas dari perkembangan teknologi ini. Sehingga, pendidikan ke depan tidak selalu hanya bertumpu pada bangunan fisik sebagai penunjang utamanya, melainkan juga, membutuhkan ruang-ruang non fisik yang menghancurkan batas-batas interaksi tatap muka secara langsung. Tetapi, kultur

warisan kolonial dan diskursus kekuasaan yang sulit ditanggalkan akan menambah beban berlipat ganda mereka yang terlibat di dalamnya karena mesin-mesin pembunuh pendidikan semakin tersebar luas, tidak hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya, sebagai kelanjutan politik (penyeragaman) penampilan dan teknologi efek rumah kaca.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini yang bertumpu pada sumber pustaka dan penelitian lapangan genealogis sangat kami sadari tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan sejumlah pihak. Terima kasih kepada Profesor Faruk H.T, Profesor Heru Nugroho, DR. Wisma Nugraha, DR. Budiawan dan segenap pengajar serta biro pelayanan akademik di Sekolah Pascasarjana UGM, khususnya program pasca sarjana Kajian Budaya dan Media (KBM) yang telah melapangkan jalan untuk mematangkan suatu gagasan penting tentang makna pendidikan yang membebaskan sekaligus mencerahkan. Termasuk, rasa terima kasih ini kami haturkan sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar departemen Sosiologi FISH-Unesa yang belakangan sering disebut-sebut sebagai kampusnya “Bumi Manusia”, sehingga karya yang tidak sempurna ini dapat terselesaikan dan disajikan kepada para pembaca budiman. Tabik!

Daftar Pustaka

- Babe, E., Robert, 2009. *Cultural Studies and Political Economy*, UK: Lexington Books
- Bell, David, 2005. *Science, Technology, and Culture*, England: Open University Press
- Bell, David, 2006. Introduction: approaching cyberculture (hal. 1-10), dalam Bell, David, *Cybercultures: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, Vol. I*, London and New York: Routledge
- Best, S. dan Kellner, D., 2001. *The Postmodern Adventure: Science, Technology, and Cultural Studies at the Third Millennium*, London: Routledge
- Bhaba, K., Homi, 1994. *The Location of Culture*, London: Routledge
- Buckingham, D., dan Green-Sefton, J., (2005). *Cultural Studies Goes to School: Reading and Teaching Popular Media*, UK and USA: Taylor & Francis Inc.

- Danandjaja, James, 2005. Dari Celana Monyet ke Setelan Safari: Catatan Seorang Saksi Mata (hal. 367-380), dalam Nordholt, S., Henk (ed.), *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, Yogyakarta: LKIS
- Denzin, K., Norman, 2003. *Symbolic Interactionism and Cultural Studies*, UK and USA: Blackwell
- Edwards, R., dan Usher, R., 2000. *Globalisation and Pedagogy: Space, Place, and Identity*, London and New York: Routledge
- Evans, J. dan Davies, B., 2004. Sociology, The body dan Health in a risk society (p.35-51), dalam Evans, J., Davies, B., and Wright, J., (ed.) *Body Knowledge and Control*, London and New York: Routledge
- Faruk, 2007. *Belunggu Pasca-Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Foster, Mark, 2006. Databases as discourse, or electronic interpellations (hal. 185-199), dalam Bell, David, *Cybercultures: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, Vol. I*, London and New York: Routledge
- Foucault, Michel, 1977. *Sex and Power*, New York: Pantheon
- Foucault, Michel, 1988. *Madness and Civilization*, New York: Vintage
- Foucault, Michel, 1994. *Power/Knowledge*, New York: Routledge
- Freire, Paulo, 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES
- Fromm, Erich, 1968. *The Revolution of Hope*, New York, Evanston, and London: Harper
- Geertz, Clifford, 1980. *Negara, The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*, USA: Princeton University Press
- Giroux, A., Henry, 2011. *On Critical Pedagogy*, London and New York: The Continuum
- Hall, S., 1980. 'Encoding/decoding', (hal. 117-127), dalam Hall, S., et.all (ed.), *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79*, London and New York: Routledge
- Hall, Stuart (ed.), 2005. *Culture, Media, Language*, London & New York: Routledge
- Haraway, Donna, 1991. Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century (p. 149-181), dalam *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, New York: Routledge
- Heryanto, Ariel, 2015. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, Jakarta: KPG
- Jensen, Derrick, dan Draffan, George, 2004. *Welcome to the Machine*, Canada: Chelsea Green
- Kuntowijoyo, 2004. *Raja, Priyayi dan Kawula*, Yogyakarta: Ombak
- Lombard, Denys, 2000. *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan*, Jakarta: Gramedia
- Manlow, Veronica, 2009. *Designing Clothes*, USA and London: Transaction Publishers
- McLennan, Gregor, 2006. *Sociological Cultural Studies*, London: Palgrave Macmillan
- Mumford, Lewis, 1970. *The Myth of the Machine*, New York: Harcourt
- Murtiningsih, 2004. *Pendidikan Alat Perlawanan Teori Pendidikan Radikal Paulo Fraire*, Yogyakarta: Insist Press
- Nugroho, Heru, dkk., 2019. *Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik Dalam Masyarakat Digital*, Yogyakarta: Panitia Dies Natalis FISIPOL UGM
- Ong Hok Ham, 2002. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong*, Jakarta: Kompas
- Oswell, David, 2006. *Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies*, London: SAGE Publications
- Pamberton, John, 1994. *On the Subject of 'Java'*, Ithaca and London: Cornell University Press
- Paulicelli, Eugenia, 2004. *Fashion Under Fascism*, Oxford and New York: BERG
- Raditya, Ardhie, 2014. *Sosiologi Tubuh*, Yogyakarta: Kaukaba
- Sadar Z.,-Van Loon, B., 2005. *Cultural Studies*, Batam: Scientific Press
- Sadtono, E., 2003. *Setan dan Bahasa: Pemahaman Lintas Budaya*, Semarang: Mascomm Media

- Sen, K., dan Hill, T.D., 2007. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*, Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia
- Toffler, Alvin, 1980. *The Third Wave*, New York: William Morrow and Company
- Toffler, Alvin, 1984. *Future Shock*, USA: Bantam
- Tour, A., Pramoedya, 1994. *Cerita dari Blora*, Jakarta: Hasta Mitra
- Tour, A., Pramoedya, 2002. *Bumi Manusia*, Jakarta: Hasta Mitra
- Tour, A., Pramoedya, 2006. *Jejak Langkah*, Jakarta: Lentera Dipantara
- Tour, A., Pramoedya, 2006. *Rumah Kaca*, Jakarta: Lentera Dipantara

MENGUNGKAP MAKNA TUTURAN *BONET* SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL DALAM MENUTURKAN SEJARAH KAMPUNG AEKA: SALAH SATU STRATEGI PEMERTAHANAN NILAI BUDAYA LOKAL

1. Priskilla Yuniarti, 2. Josua Bire, 3. Labu Djuli
Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111
Email: yuniartipriskilla@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam Tuturan Adat Bonet dalam Menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang NTT. Penelitian ini penting dan menarik karena Bonet merupakan suatu media komunikasi tradisional yang sarat makna, terutama dalam proses penyampaian pesan-pesan moral dan sosial. Media tradisional ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda, oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna penting dibalik tradisi Bonet sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan tradisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makna bonet dalam menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo memiliki lima jenis makna yaitu, 1) makna didaktis, 2) makna sosiologis, 3) makna historis dan 4) makna budaya dan 5. Makna estetis.

Kata Kunci: *Bonet, Makna, linguistik kebudayaan, media komunikasi.*

PENDAHULUAN

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dalam lingkaran kehidupan masyarakat. Masinambow dalam (Cear, 1995: 1995-218) menyebutnya sebagai hubungan yang bersifat koordinatif karena bahasa tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi atau kelompok untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi dan sebagainya tetapi bahasa juga dipandang sebagai sumber daya untuk menyingkap misteri budaya baik itu perilaku berbahasa, identitas dan kehidupan penutur, serta pelestarian nilai-nilai budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistemagama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Whorf melihat bahasa dari sisi struktur bahwa orang akan memandang dunia secara berbeda tergantung pada struktur bahasa yang digunakan (Wardhaugh, 1986: 212-213). Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Keanekaragaman bahasa (multilingualisme) tidak dapat dipisahkan dari keanekaragaman budaya (multikulturalisme). Ditinjau dari segi budaya, bahasa termasuk aspek budaya, kekayaan

bahasa merupakan sesuatu yang menguntungkan. Berbagai bahasa itu akan merefleksikan kekayaan budaya yang ada pada masyarakat pemakainya (multikultural). Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi bahasa, multilingual dapat menimbulkan permasalahan dalam berkomunikasi.

Setiap bangsa memiliki kebudayaan yang tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Sejalan dengan batasan kebudayaan Koentjoroningrat (1989:187) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan berkat akal budi manusia yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan jasmani dan rohaninya. Kebudayaan mencakupi kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kebudayaan identik dengan tuturan adat/ritual adat yang di sebut juga bahasa lisan. Linguistik kebudayaan merupakan salah satu perspektif teoritis dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa dan kebudayaan suatu masyarakat dengan tujuan untuk menyingkap makna budaya yang tersurat dan tersirat dalam bahasa yang mereka gunakan (Palmer, 1996). Salah satu warisan linguistik kebudayaan adalah *Bonet* pada suku Timor Dawan (*atoin meto*) di Pulau Timor NTT.

Bonet adalah jenis tuturan adat berirama atau puisi lisan yang seringkali dilagukan. Tuturan membentuk satuan-satuan berupa penggalan yang ditandai dengan jeda. *Bonet* disebut juga sebagai media tradisional. *Bonet* sudah menjadi tradisi lisan turun temurun dari nenek moyang orang Timor sejak dahulu kala. Lewat *bonet* masyarakat dapat

mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan melalui syair dan pantun pada upacara-upacara adat

Suku Timor Dawan (*atoin meto*) adalah satu di antara suku yang ada di Indonesia tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku ini masih identik dengan kebudayaan yang masih kental. Contohnya setiap pesta diramaikan dengan tarian lingkaran *bonet*, dalam tarian *bonet* memiliki tuturan adat yang disebut tuturan *bonet*. *Bonet* biasanya dilaksanakan pada malam hari. Dalam pesta itu orang-orang Dawan akan menghabiskan waktu pada malam hari hingga siang tanpa tidur sekejappun. Namun berjalannya waktu, *bonet* tidak harus dilakukan di malam hari, untuk melaksanakan *bonet* bisa dilaksanakan pada siang hari.

Masyarakat Timor Dawan memanfaatkan *bonet* sebagai alat berkomunikasi. Melalui tuturan adat *bonet* ini, masyarakat Timor menyelipkan berbagai pesan/informasi terlebih untuk menyampaikan aspirasi dan suara mereka kepada pihak luar seperti pemerintah. Sebagian masyarakat Timor masih sangat setia memegang teguh adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka. Mulai dari cara berpakaian, bersikap, hingga bermasyarakat. Mereka pun masih menggunakan berbagai peninggalan nenek moyang sebagai simbol berinteraksi di dalam masyarakat.

Suku Timor Dawan banyak diwarisi peninggalan budaya leluhur yang dapat mengungkapkan bahwa suku Timor Dawan sejak dahulu kala dihuni oleh sekelompok manusia yang tinggi kebudayaannya. Dengan demikian, godaan kemajuan teknologi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Komunitas ini diperhadapkan pada pilihan antara menjaga keaslian budaya mereka dengan "anti-input luar" di satu sisi dan di sisi lain kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi komunikasi.

Masyarakat Dawan (*atoin meto*) dalam berkomunikasi, sangat berhati-hati dalam memilih, menggunakan bahasa dan tuturan, tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya (*komunikas*). Hal ini dapat terlihat, dimana masyarakat ini masih memegang teguh adat dan kebiasaan budaya Timor. Untuk itulah masyarakat Dawan menggunakan tuturan *bonet*, dimana dalam *bonet* terdapat kata-kata atau ucapan yang bersifat kiasan untuk menyampaikan maksud dan isi hati kepada si penerima pesan.

Bonet maksudnya membungkus atau dibungkus. Kata benda '*bonet*' dalam penggunaan seperti ini berarti tarian. "*Bah bol bonet*" artinya membangun pagar dalam bentuk lingkaran. Kata benda '*bonet*' juga berarti tarian atau menari dalam bentuk lingkaran.

Bonet merupakan salah satu tradisi warisan leluhur yang jarang dilaksanakan oleh suku Timor

di Desa Oemolohal ini dikarenakan sedikit anak-anak muda yang bisa menuturkan *Bonet*, bahkan keberadaan *Bonet* hampir punah di desa tersebut. Menurut tokoh masyarakat Desa Oemolo Bapak Salmun Lopo *Bonet* dilaksanakan terakhir kali di Desa Oemolo pada Tahun 1970an di desa Oemolo tepatnya di kampung Aeka orang-orang tua zaman dulu selalu melakukan *Bonet* pada saat diadakan pasar yaitu minggu malam dan berakhir sampai senin pagi, pada saat itu pasar di kampung Aeka berlangsung setiap hari senin, sehingga untuk meramaikan pasar para orang tua di kampung Aeka melaksanakan *bonet*. Mereka melakukan *Bonet* dengan tujuan untuk menghibur para pengunjung di pasar tersebut.

Bonet tidak semata menghibur, melalui *bonet* masyarakat bisa memprotes pemerintah misalnya jika kondisi jalan yang belum memadai, infrastruktur belum terealisasi dan melalui *bonet* masyarakat juga bisa menuturkan sejarah kampung. Contohnya yang dilakukan oleh masyarakat di Aeka, para orang tua melakukan *bonet* untuk menuturkan sejarah berdirinya kampung Aeka dan menuturkan silsilah kepemimpinan raja di kampung Aeka. Hal ini, untuk mengingatkan kembali para orang tua, anak-anak dan seluruh masyarakat yang belum tahu tentang sejarah kampung Aeka.

Pada umumnya generasi muda yang menetap di perkotaan tidak mengetahui secara rinci tentang tuturan adat *Bonet*. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju kian pesat sehingga mengancam kelestarian budaya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Makna Tuturan *Bonet* Sebagai Media Komunikasi Tradisional dalam Menuturkan Sejarah Kampung Aeka: Sebuah Tinjauan Linguistik Kebudayaan". Penelitian ini dipandang penting dan menarik dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan makna *Bonet* sebagai media Komunikasi Tradisional yang sarat makna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Suku Timor untuk tetap mempertahankan dan menghidupkan tuturan *bonet* di masyarakat Timor, khususnya Desa Oemolo Kabupaten Kupang NTT. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan makna yang terkandung dalam Tuturan Adat *Bonet* dalam Menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang NTT.

Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah teori linguistik kebudayaan dan teori semiotik.

1. Linguistik Kebudayaan

Linguistik kebudayaan merupakan salah satu perspektif teoritis dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa dan kebudayaan suatu masyarakat dengan tujuan untuk menyingkap makna budaya yang tersurat dan tersirat dalam bahasa yang mereka gunakan (Palmer, 1996). Bahasa yang digunakan dalam konteks kehidupan suatu masyarakat berhubungan dengan kebudayaan yang dianut masyarakat karena bahasa dalam penggunaannya sebagai sarana komunikasi dan interaksi merupakan cerminan dan refleksi kebudayaan suatu masyarakat.

Hubungan bahasa dan kebudayaan begitu erat karena bahasa terdapat dalam kebudayaan (*language in culture*) dan kebudayaan terdapat dalam bahasa (*culture in language*) (Hoiyer dalam Duranti 1997). Konsep linguistik kebudayaan digunakan pula oleh Palmer (1996:36) mengemukakan bahwa linguistik kebudayaan adalah sebuah nama yang cenderung mengandung pengertian luas dalam kaitan dengan bahasa dan kebudayaan.

2. Teori Semiotik

Semiotika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *semion*, yang artinya adalah “tanda” Semiotik (*semiotic*) adalah teori tentang pemberian ‘tanda’. Dalam pengertian yang luas semiotik berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda, bagaimana kerjanya, dan apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Menurut Saussure tanda memiliki tiga wajah yaitu tanda itu sendiri (*sign*), aspek material (suara, huruf, bentuk, gambar, gerak) dari tanda yang berfungsi mendakan atau yang dihasilkan oleh aspek material (*signifier*), dan aspek mental atau konseptual yang dibentuk oleh aspek material (*signified*). Hal terpenting yang dilakukan dalam melakukan analisis tentang tanda adalah mengetahui mana aspek material dan aspek mental dari sebuah tanda: karena tanda itu sendiri merupakan kesatuan antara *signifier* dan *signified*. Hubungan antara *signifier* dan *signified* disebut sebagai *signification*. (Saussure 1913, dalam Hidayat, 2002).

Semiotik atau semiologi merupakan *pseudoscientific* yang memfokuskan kajiannya untuk membedah tanda. Terma *pseudo-scientific* dipergunakan sebagai sebuah kompromi pandangan antara kubu yang menyatakan bahwa semiotik merupakan sebuah ilmu sebagaimana dikonstruksi oleh Ferdinand de Saussure, dengan kubu lain yang menyebutkan bahwa semiotik hanya merupakan sudut pandang, metode analisis, atau pendekatan, (Khoirin, 2013:120).

Jika semiotik menggarap semua tanda yang ada, ruang lingkup kajian semiotik menjadi begitu luas. Tanda secara implisit dipandang sebagai sarana komunikatif yang bertempat di antara dua

orang manusia yang bermaksud melakukan komunikasi atau mengekspresikan sesuatu satu sama lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Mencoba menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang telah dikembangkan oleh ilmuwan ilmu sosial dan ilmu budaya. Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan (Saebani, 2008: 90).

Data metode deskriptif dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya, (Sugiyono, 2014:2). Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014: 1). Dengan kata lain, penelitian ini menghasilkan data deskripsi tentang tuturan adat *bonet*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya secara fundamental sangat tergantung pada proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif temuan-temuannya. Tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, (Zuldafril dkk, 2012:2).

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan pemilihan desa tersebut karena di desa tersebut bermukim masyarakat Suku Timor Amanuban dan desa tersebut pula merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang pernah menang dalam perlombaan pertunjukan seni budaya dan merupakan desa yang masih menjaga tradisi peninggalan nenek moyang seperti tarian adat *Bonet*.

Hasil dan Pembahasan

Makna Tuturan Adat Bonet dalam Menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo Kabupaten Kupang

Analisis makna merupakan metode untuk menelusuri kandungan isi di balik bentuk yang dipakai sebagai jembatan yang akan menghubungkan fungsi-fungsi yang diamban

terhadap realitas sosial budaya masyarakat. Makna tidak terlepas dari bentuk yang dicermati melalui teks dan konteks. Upaya menganalisis makna dalam tuturan adat *Bonet* ditempuh dengan tujuan agar dapat menyingkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makna *bonet* dalam menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang memiliki empat jenis makna yaitu, 1) makna didaktis, 2) makna sosiologis, 3) makna historis, dan 4) makna budaya.

a. Makna Didaktis

Secara keseluruhan tuturan *Bonet* mengemban makna didaktis. Dikatakan demikian, karena pada setiap tuturan *Bonet* terkandung sejumlah pengetahuan hukum (norma adat). Dalam analisis makna didaktis ini, peneliti mengkaji tuturan *bonet* yang bertautan dengan pengetahuan hukum. Data pendukung terhadap makna didaktis, dapat dilihat pada data di bawah ini.

Kah kah ma ho hoi ha hana hu e no hana mbi let nonamnais nalalit on kah kah.

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di pohon taduk seperti daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu e nohana mbi let no na ho hoi ha hana nopaf Aekahana mbi let no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di kampung Aeka seperti pohon taduk dan daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di kampung Aeka, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu e no hana mbi non laku hana mbi let no namnaisnalalit on kah kah mbi let no

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di Non Laku seperti pohon taduk yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di Non Laku, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah ma ho hoi hana usif nain kun mbi let no namnais na lalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di tempat yang ditunjukkan Raja seperti pohon taduk yang sudah tua.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah yang sudah Raja tunjukan,

meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Data diatas menggambarkan makna didaktis yang mengemban pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum disini bukanlah hukum tertulis, melainkan norma adat yang tidak tertulis, namun sangat kuat dan mengikat yang diakui oleh masyarakat Aeka sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut akan menderita karena sanksi keras yang secara tidak langsung dikenakan. Makna yang tersingkap di balik data diatas menggambarkan bahwa Raja dan tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu. Dalam hal ini, akan adanya suatu ketentuan norma yang berlaku pada masyarakat Oemolo. Apabila melanggar norma tersebut akan nampak bahwa, kita telah menghinai adat istiadat yang telah menjadi dasar berpijaknya segala aturan yang berlaku pada masyarakat setempat. Oleh karena itu setiap individu maupun kelompok harus tunduk dan patuh kepada segala bentuk norma adat istiadat yang berlaku.

Data tuturan selanjutnya mengandung didikan antara Raja dan tua-tua adat kepada masyarakat. Didikan tersebut mengandung perintah/ajakan kepada masyarakat di kampung Oemolo khususnya kampung Aeka Non Laku Upun Puames untuk selalu bersatu di wilayah yang sudah ditentukan oleh Raja. Karena tanpa perintah masyarakat di Aeka bisa terpecah, sehingga tidak ada kerukunan antar masyarakat. Tuturan tersebut juga mengajak siapapun yang tinggal di Aeka harus menghargai perintah Raja, karena untuk menghindari sanksi keras yang tidak langsung dikenakan.

b. Makna Sosiologis

Makna sosiologis berkaitan dengan hubungan interaksi antar individu maupun kelompok dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, makna sosiologis berfungsi untuk menata perilaku hidup manusia menuju kehidupan yang harmonis. Makna sosiologis berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lain dalam konteks kekerabatan.

Makna sosiologis selalu bertautan dengan hubungan antarindividu dalam kehidupan masyarakat Oemolo. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan manusia tidak terlepas dari orang lain. Interaksi itu terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan serta hubungan sosial masyarakat untuk mencapai kehidupan yang selaras. Di samping itu makna sosiologis merupakan pedoman yang menjadi penuntun dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Makna sosiologis yang terkandung dalam tuturan adat *Bonet* dalam

menuturkan sejarah kampung Aeka adalah sebagai berikut:

Kah kah ma ho hoi ha hana hu e no hana mbi let nonamnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di pohon taduk seperti daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah ma hoi hoi hana hu e no hana buni sufan mbi let no namnais nalali on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di pohon taduk seperti bunga pohon buni dan daun kayu putih sampai tua namun seperti masih muda’.

Putri raja merangkul masyarakat untuk bersatu dalam suatu wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu e nohana mbi let no na ho hoi ha hana nopaf Aekahana mbi let no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di kampung Aeka seperti pohon taduk dan daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di kampung Aeka, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu e no hana mbi non laku hana mbi let no namnaisnalalit on kah kah mbi let no

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di Non Laku seperti pohon taduk yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di Non Laku, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana naimnuke hana mbilet no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul bersama pangeran di pohon taduk seperti daun kayu putih sampai tua jangan tidak tidak’

Pangeran merangkul semua masyarakat.

Ne on kah kah na ho hoi hana puames nain kun mbi let no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di sebuah pohon pinang seperti pohon taduk yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di Puames, meskipun masyarakatnya sudah

ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah ma ho hoi hana usif nain kun mbi let no namnais na lalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di tempat yang ditunjukkan Raja seperti pohon taduk yang sudah tua.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah yang sudah Raja tunjukan, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Satuan kebahasaan yang terdapat pada kata ‘*mbi let no*’ pada data di atas terjemahan bebasnya ‘di pohon taduk’ dan arti harafiahnya ‘bersatu’. Pohon taduk diibaratkan sebagai tempat (kampung Aeka) dan daun pohon taduk diibaratkan masyarakat yang berkumpul di kampung Aeka, artinya masyarakat hidup bersatu di Aeka. Data diatas merupakan perintah karena mengandung ajakan dari Raja dan tua-tua adat untuk hidup bersatu dan damai. Tuturan di atas menyiratkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa berjalan sendiri tetapi membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial.

Data selanjutnya mengandung makna sosial karena tuturan tersebut mengungkapkan anak-anak raja (Buni Sufan dan Naimnuke) merangkul masyarakat untuk bersama-sama hidup rukun di wilayah yang sudah ditentukan Raja. Anak-anak Raja tidak membedakan golongan antara anak bangsawan dan rakyat jelatah, mereka menganggap semua derajat manusia sama dan mereka juga ingin hidup damai bersama rakyat. Anak-anak raja menyadari bahwa kebersamaan antara mereka juga ditandai dengan perbedaan-perbedaan. Dari perbedaan yang ada dimaknai secara positif bahwa perbedaan justru menjadi alasan yang membuat anak-anak raja dan masyarakat saling membutuhkan untuk hidup rukun dan damai.

Bagi masyarakat di kampung Aeka persatuan itu diibaratkan harta yang paling berharga. Demikian juga tuturan ini bertujuan memberikan ajaran kepada kita untuk selalu menjalin hubungan baik secara individu maupun secara kelompok yang berlandaskan asas kekeluargaan sehingga rasa kepedulian dan tanggung jawab sebagai keluarga dapat dipertahankan.

c. Makna Historis

Tuturan yang dilakukan oleh peserta *Bonet* mengandung makna historis. Dikatakan memiliki makna historis karena tuturan tersebut menuturkan sejarah berdirinya kampung Aeka. Kampung Aeka berdiri ketika Raja Daniel Nope

(biasa di panggil Raja Taku) turun di kampung Aeka tahun 1948 (pada waktu itu Aeka belum ada nama), nama Aeka ada setelah Raja Taku bermasalah dengan Babis dan Loemnanu, akhirnya Babis dan Loemnanu meninggalkan wilayah tersebut. Aeka dalam bahasa Indonesia berarti 'berendam', masyarakat setempat sering berendam di bawah pohon jambu yang berdiri di tengah-tengah air. Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama antara Raja Taku dan masyarakat setempat mereka memberi nama kampung tersebut menjadi kampung Aeka. Bersamaan dengan peristiwa tersebut raja Taku membagi wilayah Aeka menjadi tiga yaitu, Aeka, Non Laku, dan Puames. Raja Taku menunjuk Noas Naat (tua adat) untuk memimpin di Non Laku, Noas Nope (tua adat) memimpin di Pua Mes, dan Raja Taku tetap memimpin di Aeka. Akhirnya wilayah kekuasaan Raja Taku Nope tersebut diberi nama Aeka Non Laku Upun Pua Mes. Penggalan tuturannya dapat dilihat di bawah ini.

Ne on kah kah na ho hoi hana hue no

Terjemahan:

seperti tidak tidak mari supaya pohon kayu putihdaun

hana mbi let no uis fam amaf hana mbi let no

Terjemahan:

supaya di pohon taduk daun raja dan tua-tua adat di pohon taduk daun

namnais nalalit on kah kah

tua habis seperti tidak tidak

'Mari berkumpul di pohon taduk seperti daun kayu putih yang sudah tua'.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu eno

Terjemahan:

seperti tidak tidak mari supaya pohon kayu putih daun

hana mbi let nona ho hoihahana nopafAeka

Terjemahan:

supaya di pohon taduk daun mari supaya lingkungan aeka

hana mbi let no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

supaya dipohon taduk daun tua habis seperti tidak tidak

'Mari berkumpul di kampung Aeka seperti pohon taduk dan daun kayu putih yang sudah tua'.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di kampung Aeka, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Neonkahkah na ho hoihanahu e no

Terjemahan:

seperti tidak tidak mari supaya pohon taduk daun

Hanambinon lakuhanambi letnonamnais

Terjemahan:

supaya di daun ubi supaya di pohon taduk daun tua

nalalit on kah kahmbi let no

Terjemahan:

Habis seperti tidak tidak di pohon taduk daun

'Mari berkumpul di Non Laku seperti pohon taduk yang sudah tua'.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di Non Laku, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Neon kah kah na ho hoi hana pua mes nain kun

Terjemahan:

seperti tidak tidak mari supaya pinang satu tinggal sudah

mbi let no namnais nalaliton kah kah

Terjemahan:

Dipohon taduk daun tua habis seperti tidak tidak

'Mari berkumpul di sebuah pohon pinang seperti pohon taduk yang sudah tua'.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di Puames, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Data diatas mengungkapkan pada saat Raja Taku memerintah di Aeka Raja Taku mengajak masyarakat bersatu dan tinggal bersama tua-tua adat yang sudah dibagi di wilayah yang sudah ditentukan oleh raja. Data selanjutnya Raja Taku membagi wilayah Aeka menjadi tiga yaitu, Aeka, Non Laku, dan Puames. Raja Taku menunjuk Noas Naat (tua adat) untuk memimpin di Non Laku, Noas Nope (tua adat) memimpin di Pua Mes, sedangkan Raja Taku sendiri tetap memimpin di Aeka.

d. Makna Budaya

Budaya adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu. Dalam konteks tuturan adat *Bonet*. Kebiasaan masyarakat Timor Dawan selalu menyelenggarakan *Bonet* ketika ada pesta syukuran.

Kah kah ma ho hoi ha hana hu e no hana mbi let nonamnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

'Mari berkumpul di pohon taduk seperti daun kayu putih yang sudah tua'.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah ma hoi hoi hana hu e no hana buni sufan mbi let no namnais nalali on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di pohon taduk seperti bunga pohon buni dan daun kayu putih sampai tua namun seperti masih muda’.

Putri raja merangkul masyarakat untuk bersatu dalam suatu wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana hu e nohana mbi let no na ho hoi ha hana nopaf Aekahana mbi let no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di kampung Aeka seperti pohon taduk dan daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di kampung Aeka, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah na ho hoi hana naimnuke hana mbilet no namnais nalalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul bersama pangeran di pohon taduk yang sudah tua’.

Pangeran merangkul masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Ne on kah kah ma ho hoi hana usif nain kun mbi let no namnais na lalit on kah kah

Terjemahan:

‘Mari berkumpul di tempat yang ditunjukkan Raja seperti pohon taduk yang sudah tua.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah yang sudah Raja tunjukan, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Data diatas mengungkapkan budaya yang diturunkan dari Raja kepada masyarakat bahwa masyarakat harus hidup rukun bersatu. Data selanjutnya mengungkapkan bahwa anak-anak raja juga merangkul masyarakat dan hidup rukun di dalamnya. Budaya tersebut masih dilakukan oleh keturunan raja yang tinggal di Aeka dan sampai saat ini masyarakat di Aeka mempercayai hal itu. Karena mereka telah bersumpah untuk hidup bersatu, jika hal itu dilanggar maka akan ada sanksi keras yang akan menimpa siapa saja yang melanggar perintah raja tersebut.

e. Makna Estetis

Makna Estetis tuturan *Bonet* berkenaan dengan nilai rasa seni yang tidak hanya mengandung nilai kenikmatan bentuk, tetapi juga mengandung nilai inderawi. Seperti tampak pada penggalan tuturan berikut ini:

Ne onkah kahma ho hoi ha hanahu e no

Terjemahan:

seperti tidak tidakmari supayapohon putih daun

hana mbi letnonammaisnalaliton kah kah

Terjemahan:

supaya di pohon taduk daun tuahabissepertitidak tidak

‘Mari berkumpul di pohon taduk seperti daun kayu putih yang sudah tua’.

Tua-tua adat mengajak masyarakat bersatu di wilayah tertentu, meskipun masyarakatnya sudah ada yang tua namun memiliki semangat seperti anak muda.

Data diatas mengandung kenikmatan bentuk dan mengundang kenikmatan inderawi. Karena ditandai dengan pengulangan kalimat yang sama yaitu pada kalimat ‘*on kah kah*’ (seperti tidak-tidak). Kalimat tersebut tidak memiliki arti yang sebenarnya, *on kah kah* pada awal kalimat dipakai untuk membuka tuturan, *on kah kah* pada akhir kalimat dipakai untuk menutup tuturan. Hal ini dituturkan supaya irama tuturan yang peserta *bonet* mendengarkan mengandung nilai keindahan sehingga mampu menghibur pendengar.

Simpulan dan Saran

Upaya menganalisis makna dalam tuturan adat *Bonet* ditempuh dengan tujuan agar dapat menyingkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makna *bonet* dalam menuturkan Sejarah Kampung Aeka di Desa Oemolo Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang memiliki lima jenis makna yaitu, 1) makna didaktis, 2) makna sosiologis, 3) makna historis dan 4) makna budaya dan 5. Makna estetis.

Secara keseluruhan tuturan *Bonet* mengemban makna didaktis. Dikatakan demikian, karena pada setiap tuturan *Bonet* terkandung sejumlah pengetahuan hukum (norma adat). Dalam analisis makna didaktis ini, peneliti mengkaji tuturan *bonet* yang bertautan dengan pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum bukanlah hukum tertulis, melainkan norma adat yang tidak tertulis, namun sangat kuat dan mengikat, yang diakui oleh masyarakat Aeka sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat tersebut akan menderita karena sanksi keras yang secara tidak langsung dikenakan.

Tuturan *Bonet* dalam menuturkan sejarah kampung Aeka juga mengemban makna sosiologis karena dari hasil penelitian tuturan tersebut menyiratkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa berjalan sendiri tetapi membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial.

Tuturan yang dilakukan oleh peserta *Bonet* mengandung makna historis. Dikatakan memiliki makna historis karena tuturan tersebut menuturkan sejarah berdirinya kampung Aeka. Kampung Aeka berdiri ketika Raja Daniel Nope (biasa di panggil Raja Taku) datang ke kampung Aeka tahun 1948 (pada waktu itu Aeka belum ada nama), nama Aeka ada setelah Raja Taku bermasalah dengan Babis dan Loemnanu, akhirnya Babis dan Loemnanu meninggalkan wilayah tersebut. Aeka dalam bahasa Indonesia berarti 'berendam', masyarakat setempat sering berendam di bawah pohon jambu yang tumbuh di tengah-tengah air. Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama antara Raja Taku dan masyarakat setempat mereka memberi nama kampung tersebut menjadi kampung Aeka.

Makna budaya tuturan adat *bonet* dalam menuturkan sejarah kampung Aeka mengungkapkan budaya yang di turunkan dari Raja kepada masyarakat bahwa masyarakat harus hidup rukun bersatu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak raja juga merangkul masyarakat dan hidup rukun di dalamnya. Budaya tersebut masih dilakukan oleh keturunan raja yang tinggal di Aeka dan sampai saat ini masyarakat di Aeka mempercayai hal itu. Terakhir adalah Makna Estetis tuturan *Bonet* berkenaan dengan nilai rasa seni yang tidak hanya mengandung nilai kenikmatan bentuk, tetapi juga mengandung nilai inderawi.

Daftar Rujukan

- Chear, Abdul dan Leonie Agustina, 1995. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Duranti, A. 1997. *Linguistic Antropology*. Cambridge University Press.
- Hidayat, Ahmad, Asep. 2002. *Filsafat Bahasa. Mengungkap Hakikat, Makna dan Tanda*. Bandung. P.T. Remaja Rosdakarya.
- Khoyin, Muhammad. 2013. "*Filsafat Bahasa*". Bandung. Pustaka Setia.
- Koentjoroningrat. 1989. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Palmer, G. B. 1996. *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. Austin, USA: The University of Texas Press.
- Saebani, B.A. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: PustakaSetia.
- Sugiyono.(2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALVABETA.
- Zuldafrial & Lahir, M. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wardhough, 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Basil Blackwell
- Media Massa*
 C:\Users\arman\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\KTK4D7R6\TARIAN_BONET_ATOIN_METO_(ORANG_DAWAN)_-_matatimor.com[1].mhtml dalam judul '*Bonet Orang Dawan*'.

YOUNG GANGSTER COMMUNITY SCHOOL: Attacking Social Exclusion in Jakarta Slum Area

By Daisy Indira Yasmine
Sociology Department, FISIP, Universitas Indonesia
Email: daisy.indira@gmail.com

ABSTRAK

Some parts of Jakarta have seen recurrent brawls between youth gangs that are hard to solve. The first efforts to curb the violence were based on two sociological models, which are system theory and conflict theory but both without effect. In system theory, youth gangs are seen as juvenile delinquency that can be solved by suppression. Therefore most of the intervention to solve brawl among the youth gangs tends to use security approaches and place the youth who involves in brawl as guilty parties (blame the victims). However, the brawls reappeared soon. In conflict theory, brawls are analyzed as a result of social inequality, but efforts to overcome them by offering skills have not produced lasting effects. In contrast to these two top-down approaches which confirm the social exclusion of the youngsters, we have developed a third model in which the youngsters learn how to access mainstream culture. It is an alternative model of community intervention to tackle the brawls. Unlike put the gangs members as delinquent, this model was based on participatory action which involved youth gangs as an active actor to identify their root problems and potentials. It provides them an access to negotiate the structural burden with a some skills to improve themselves. This model tries to give them an opportunity to be part of mainstream culture but at the same time gives them sense of self confidence about their thoughts and activities.

Keywords: youth, brawls, empowerment, school, social exclusion, Indonesia

Introduction

Cities always have many stories to tell. Besides rampant physical development, modern lifestyles and values of progress, cities also have a dark story for some of its inhabitants. Jakarta as Indonesia's capital city still struggling with recurrent youth gangs brawls that are hard to solve. One sub-district in Jakarta, namely, Johar Baru is even famous with its youth gangs brawls that appear regularly and sometime involves fatalities. Brawls among youth gangs is consider as part of youth violence phenomena. Youth violence deeply harms not only its victims, but also their families, friends and communities. Its effects are seen not only in death, illness and disability, but also in terms of the quality of life (WHO, 2015).

Various attempts have been made to address this issue. The ultimate goal is to reduce or even eliminate the youth gangs brawl. Previous studies shows mostly community intervention model relies on two sociology theoretical perspectives which are system theory or conflict theory. In system theory, mostly brawl among the youth gangs is viewed as a practice of juvenile delinquency. Security approach usually being used to overcome the violence and quell the brawl. But this approach alone cannot resolve the root of the problem so that the brawl at any time will occur again. Meanwhile from conflict theory perspective, youth gangs and brawls being viewed as a result of class domination. Persuasive approach being used

by the local government or civil society organization in the form of facilities assistance and capacity building through training. The programs faced many ineffectiveness issues. Often what happens in this approach is young people just become an object of government program or "a project" of government assistance or other agencies that are trying to help. From system theory that tends to use repressive methods until conflict theory in the form of persuasive approach, are not yet capable of eliminating fighting between youth gangs.

Both the systemic and the conflict approach have not produced lasting results in fighting the brawls, despite massive investment of resources. The main reason is that both approaches work top-down and exactly for that reason continue to exclude the youngsters from mainstream society. In this article we want to study why the massive investments have failed over and how the youngsters can be included in mainstream society again? We have opted for action research, because only then the researchers do not make statements about the youngsters, but co-produce knowledge with the youngsters, which in itself is an emancipatory force.

Unlike the two approaches, this paper view youth gangs and brawls not merely a poverty phenomenon but further than that, it also represent a social exclusion. It raise a problem of belonging,

integration and recognition. Brawl also cannot simply be placed as a matter of social order, the problem of citizens who do not obey the rules. Its regular and continuing emergence is an indication of social pressures faced by them. Brawl also an indication of the fragmentation of society and describe unhealthy and unhappy society (Ledwith 2016: p.9). Therefore it needs different approach to research and deal with.

Youth Gangs, Social Exclusion, Social Development

Despite having a long historical root even in England since the 17th century and 18th century, street gang fighting is still an important topic to date. This type of collective violence has been part of our society especially in urban area. Gang phenomenon tends to emerge in urban life and some gangs involve in violence activities. Previous studies show that gangs tend to arise wherever and whenever people feel left out of mainstream society and have lost sense of hope for the future (MacKay, 2011: 9).

In Indonesia, the gang phenomenon is not a new phenomenon. (Tadie,2009; Varshney,2010) It is hard to trace back since when this gang phenomenon appears, but the cities like Jakarta, Yogyakarta and Bandung are often became locus of gangs phenomenon. Despite the negative connotation of gang, for gang members, it has a positive meaning. In gangs, young people feel more secure and got a family atmosphere. Gangs serve as an important social organization (Pacheco, 2010)for social purposes - they provide a sense of solidarity, family, belonging, and cultural identity for members who have not found other ways to meet this basic human needs. Many research has shown gangs to be alike in certain ways, suggesting that all gangs may provide members with similar benefits and these are people's main reasons for joining. (MacKay, 2011: 27) (McLean, 2017).

Hence the growth of youth gangs and collective violence is indicative of a wider problem, namely social exclusion in social development. The collective violence that frequently conducted by the youth in the form of street gangs fighting is an indication of relational problem instead of individual character. More than that it become part of marginalized youth culture (Tilly, 2003). The important question is whether the development as we do already touch the social and culture lives of citizens. Young people may be a group that tends excluded from the great plan of nation development. Is the model of the current development has taken into account of the

characteristics of young people especially marginalized young people?

Poverty is often regarded as the main reason for collective violence to occur. But need to be noted that not all poverty condition create collective violence. So poverty alone is not enough to explain the action of brawl that regularly emerge. Poverty that define as a condition of absolute and relative deprivation, can only explain the limitations of resource ownership but it has limitation to explain how the processes and mechanisms that may occur. Social exclusion is one of the concepts that attempt to explain how the limitations of ownership and access of resources may produce disintegration in society. It characterized by the breakdown of the relationship between the individual with the community or with their social life due to structural and social systems failure to regulate economic life of society (Gore, 1995: 2). This is reflected among others in the prolonged unemployment, the inability of young people entering the labour market, family instability, single isolated households, increased homelessness, increased tension and frequency of violence in the settlement. Social exclusion in turn makes the community potentialities is reduced when many citizens are marginalized and being excluded (Ledwith, 2016: p.7).

Social exclusion tends to reposition poverty as a condition of relative deprivation. Social exclusion seeks to understand the interrelationship between poverty, productive employment and social integration. Social exclusion was based on three main paradigms: solidarity, specialization and monopoly (Hillary Silver in Rodgers, 1995: 57) In the paradigm of solidarity, social exclusion represents the destruction of social ties in the community. Later in the specialization paradigm, social exclusion represents choices voluntarily chosen by the individual or group, patterns of interests and relationships between individuals contract and distortions of the system such as discrimination, failure of the market and the rights that are not fulfilled. In the monopoly paradigm, social exclusion emerges through their "Social Closure", a process that makes certain groups try to maximize profits by limiting the number of people or groups who have a right, and a usurpation process where a group of people reject and seek ways to overcome the exclusion.

Some patterns of social exclusion (Rodgers, 1995: p 44-49) are: exclusion of the goods and services required, exclusion from the labor market, exclusion from land ownership, exclusion of security, exclusion from human rights,

exclusion and development strategies at the macro. Therefore, social exclusion trying to decipher how and why a person or group failed to gain access to or benefit from the various possibilities that arise from community or economic practices. (Rodgers, 1995: 44). Haralombos 2008, also added a variety of patterns of social exclusion that may occur. “..lack of resources, lack of opportunity to work, lack of opportunity to learn, Suffering Health inequality, access to decent housing, disruption of family life or living in a disadvantaged neighborhood” (Haralombos, 2008: 225).

Thus social exclusion is also a problem in the social development. This means that development goals are not achieved. The concept of social development itself still undergo a dynamic debate. Studies about social development place this concept as social services, social work, individual improvement, but mostly still put social development as one sector that should conjunct with other sector such economic development. (Midgley,1995). This notion has been argued that the substance of social development is not the sector but it should address the key aspects of society life which are structure, culture and process (Wirutomo, 2014). Thus the social life become the root of every sector and inclusive society would be the ultimate goal of development. The phenomenon of youth gangs brawl precisely describes the practice of social exclusion that involve structural, cultural and processual factor. Fighting between gangs is not merely a problem of youth delinquency but rather it is a problem of social exclusion. Exclusion that occur include, exclusion from structure, culture and processual life of society. According Wirutomo (2014), all sectors should be equally oriented to development of structure, culture and process dimension of society. The final goal of a social development sociologically is the creation of an inclusive society in which all citizens obtain their rights as responsible citizens as the most fundamental goal.

Departing from the practice of social exclusion that are still a threat to the majority of citizens and flaws in the model of development in Indonesia, thus this article focuses on the crucial question, what is the solution of social exclusion practices. Development model, which is still dominated by the modernization approach in the end tend to pursue only the aggregate indicators. Another drawback in this approach is the tendency of "blaming the victim" when social issues such as the brawl occurred. As a result, the solutions offered would put the brawl perpetrator as a source of social problems that need to be repaired. Residents tend to be the object of development, the target group to meet development goals. These

kinds of intervention creates dependency and reinforce injustice and labelling youth gangs as a deviant of the society (Ledwith, 2016: p.6). Finally, we fail to see the root of the problems and rather reluctant to seek change.

Therefore, in this article we argue the solution to the problem of the brawl among the youth is social transformation in structure, culture and processual life of the youth gangs. Social transformation efforts are not an easy thing to do. Social pressure produce marginalization for a group of citizens who cannot compete or failed to compete in the race for resources. It creates a group of citizens who excluded from social life. The structure and the dominant social system often maintain the status-quo of dominant class and gives very limited space for marginalized groups to negotiate. So social transformation in this paper interpreted as an attempt to change the structure and culture to be more open and assessable for disadvantaged groups who are being excluded. Social transformation requires agents and actors that can lead to changes in structure and cultural system (Sewel,1992).

One of the important agent of social transformation is educational institutions particularly the school. As an institution, school like two-edged sword, on one hand, the school still had the impetus of change, carrying the value of equality. But on the other hand, the school creates inequality and social exclusion. Education for all is still a discourse, as the fact there are still citizens of school age are not in school. This was in line with Freire's thought, that education is a key source of domination and for freedom (ledwith,2016). So the important question in this paper is how education through school institution could become social transformation agent for urban marginal youth group.

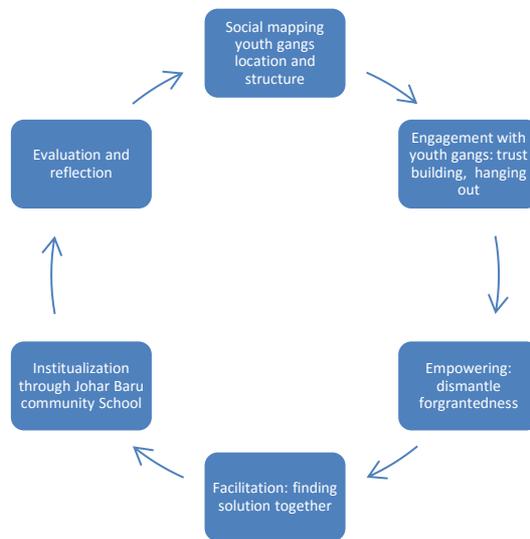
Methods – Participatory Action Research

The method that has been used is Participatory Action Research. With participatory action research, the researcher is also a community organizer, the companion in the community. Therefore, the involvement of researchers to understand the problem and the context of life becomes an important step. Participatory action research requires community engagement. This are realized in the form of caring, commitment and perseverance in carrying out activities in the community. Community engagement in this study carried out in several stages ranging from social mapping, establishing trust, engagement, action planning, facilitation and reflection of action for activities improvement.

With this method the target group are citizens of District JoharBaru particularly marginalized youth who belongs to certain youth gangs. They involved as "subjects" (researcher) and they are the ones who recognize their own potential, their main problem and the solutions that can be taken. This is done by identifying the things that become the needs of citizens, and not just look for alternative solutions but also work to resolve collectively based on the potential and the resources they have. The program is designed together to create a sense of ownership of the activities undertaken, as well as the commitment of citizens over the program. Researchers act as

facilitators and companion as well as channelling agent to the overall process of empowerment. This method is selected on the premise that every community has the potential waiting to be discovered, and the target group is the party that can actively make changes for themselves and the community. This method is also suitable to the characteristics of particular problems of marginalized groups that have tended to be the objects rather than as subjects or actors of change for themselves and their communities. In this context, it is necessary to taking side on the marginal group, and works together with community leaders and local authorities.

Figure 1. Participatory Action Research Process



Social Context of JoharBaru District

District of JoharBaru sub-district consists of four village, RW 40 and RT 558 with a population of 133 830 inhabitants and 38 276 families with a total area of 2.37 km2. JoharBaru sub-district classified as areas with a high density level that is as much as 56.468.35 inhabitants per

km2. (Data Population Statistical Report October 2014, Dept. of Population and Civil Registration Central Jakarta Administration City) From these data there are 25 slums neighbourhood (RW) classified as follows:

Table 1: Population, density and location RW Slum in the district of Joharbaru

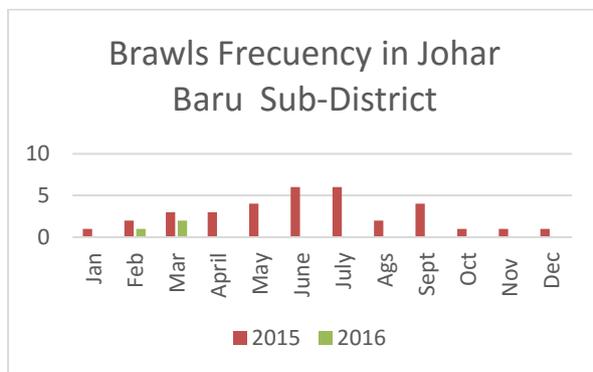
No.	Sub-District	Population	Area (km2)	Density (people/km2)	Slum Area (RW)
1	JoharBaru	42.218	1,19	35.477,31	01, 02, 03, 04, 08
2	KampungRawa	26.067	0,30	86.890,00	01, 02, 03, 04, 06,07
3	Galur	21.423	0,26	82.396,15	04, 06
4	Tanah Tinggi	44.122	0.62	71.164,52	01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
	JoharBaru District	133.830	2,37	56.468,35	

Source: Population Statistics Reports In October 2014, Dept. of Population and Civil Registration Central Jakarta City Administration and JoharBaru Sub-District Report.

The high frequency and the regularity of fighting between residents in the District JoharBaru is sociologically relevant to be studied given that the horizontal conflicts among residents in urban slums had a negative impact not only for the neighbourhood as such, but also to Jakarta as urban communities. It also depict the complexity of problems faced by the citizens which basically could be mapped by aspects of the structure, culture and processes.

Indeed, brawls in JoharBaru sub-district had disappeared from the surface for some time, but their frequency and intensity back upward in year 2010 – 2011

Frequency brawl in the district of JoharBaru per Month



Source: compiled from various media sources and data in the district of JoharBaru

Structural aspects, refers to the ability of policy, regulations, facilities and infrastructure to meet the needs of citizens. Conditions experienced by residents is the high density of population. There are no regulations that organizes density within the neighbourhood. House area of 3 x 3 m2 can be occupied by five members of the family. Likewise, the growth of the rented house cannot be avoided because of very high demand of cheap rented house in the centre of Jakarta. Another structural condition that limits them to progress is their access to suitable education. In 2015, more or less 1,208 residents of school age were not in school (PBDT data 2015). This is due to their inability to follow the mainstream values in education system. Several Informants admit that they are being expelled from school because of too many absence from school or mischief behaviour in school. Therefore unemployment also remains a problem in JoharBaru sub-district.

Government programs, such as *KejarPaket A, B, C* that is given through the Community Teaching and Learning Centre (*PKBM*) as a non-formal educational institutions are not able to embrace all citizens. Although its preliminary goal is to promote equality in education. The problem is not only in the ability of non-formal schools to absorb the various groups of people, but more than that what is taught in school is not necessarily meet the needs of various groups of people. Even a non-formal school is not able to realize the aspirations of citizens. Education should be seen as a process that cannot be understood apart from the other processes that shape the social reality of us.(Irwin, 2012), (Ledwith, 2016).

Cultural aspects, refers to the values system, customs in running their daily lives. Youth groups have a habit of hanging out at the end of alleys, especially at night. Violence is still one habit in solving problems both in the family and in neighbourhoods scope. Marginal culture is also growing and developing. This is evident from the youth, who lack motivation and have no hope for the future due to the pressure of the structure. But at the other side, potential talents are quite large, ranging from solidarity to creativity.

Processual aspects refer to the availability of space and sphere of expression in society. This space and sphere are crucial for channelling aspirations, appreciation, cooperation, negotiation and as means for conflict management. Availability of public space and sphere is still very rare. Finally, people create their own spaces of negotiation like brawling. Some neighbourhood community organizations such as *KarangTaruna* (youth clubs) and *PKK*(Family Welfare Empowerment Organization) which have the potentiality as agents of change are also seen inactive.

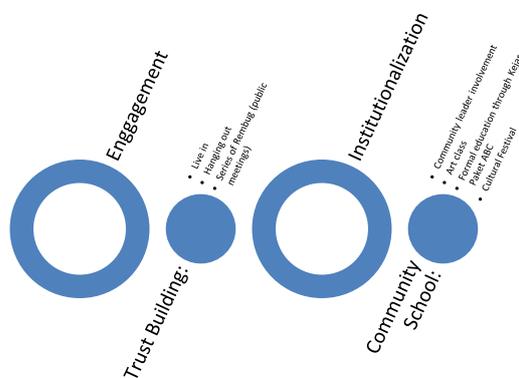
Community School of JoharBaru

Freeing ourselves from the domination of the structure is not easy. Marginality is not only structural problem but also it has a problem of cultural and processual quality. Changes in the structure does not always produce the expected cultural change, even a lot of the structural changes are processed (in negotiations) by the citizens. Likewise, culture change requires a long time without the support of a structural change. Culture is seen as the most difficult to change. Therefore, it takes the agent of change that can drive these changes.

Community School of JoharBaru is one model of social transformation agent to suppress structural conditions, as means for cultural changes

and negotiation, especially for marginalised young people. This transformation effort moves from aspiration of some youth groups in JoharBaru sub district after being involved in participatory action research. It can be said JoharBaru Community School is part of the non-formal education. Unlike the Community Learning Center (*PusatKegiatanBelajarMasyarakat*), the emergence of JoharBaru Community School departing from the issues defined by the youth group themselves. The self-designed curriculum is in accordance with the map of potentialities, problems and needs of the youth group. It might be said that JoharBaru Community School Curriculum based on the approach of critical pedagogy. Critical pedagogy is a form of popular education based on people's life experience. (Ledwith, 2016: p.7). It means that to change the structural and cultural condition, we need to dismantle the for-granted-ness, to have awareness and understanding about what factors that actually suppress and what condition that need to be pursued. Hence in this paper, there are two important components of how social transformation proceeds through school which are through engagement and institutionalization

Figure 2. Community School of JoharBaru Activities



Engagement

Understanding the problem and the social context that occurred in the community is the most important thing to do at the early stage. In this case, seeing the brawl that took place between groups of young people is not easy. Brawl incident itself is an event that tends to be sensitive for the offender because the brawls is seen as a violation of order in the realm of law. Most actors tend to cover their involvement in brawl. Though in everyday life, brawls have become a common sight for the citizens of sub district JoharBaru. Therefore, some of the important components in the engagement

process is to establish trust and questioning everyday life.

Trust Building

Trust is an essential component in the formation of social relations (Fukuyama, 1995). That is why trust plays an important role to promote change. Similarly, It also important to understand problem and social context faced by youth gangs. Trust building means each of the parties who interact have shared values and common language to determine which ones are good and bad. There is no premature judgement involve in this interaction. This is done by positioning ourselves on par with research subjects, which also means dismantle barriers of interaction. Ensure that we are in the same social world.

"Hanging out" (*nongkrong*) is part of youth gangs everyday life. Hanging out with youth gangs become an crucial step in trust building because by staying in the same location we can build extensive communication. Trust building requires considerable time, but there is no standard that can be a benchmark to determine how long the trust can be established. The dynamics of relations that emerge in the field is very decisive. Besides time, the trust also built through positive interactions. The researcher should avoid promises in the beginning especially when there is no certainty to make it happen. Trust also built through undertaken joint activities with youth gangs and other group in the community.

Some indications of trust are the openness in expressing opinions and issues, the initiative to start communication and initiative to do activities together. Establishing trust is an ongoing process. It requires intensive interaction between community facilitators and the youth gangs. Besides that, facilitator also need to gain trust from other stake holders in the community, namely local government, community leader even other youth gangs.

Rembug (public meeting): Questioning Everyday Lives

Rembug is a mechanism used to identify community potentialities, find the root of the problems and devise a solution together. In this study, brawl as collective violence viewed more as a result of societal problem. Finding the root of the problems becomes an important thing to be done by the community members especially youth gangs. Social transformations performed by involving brawl actors to find root of the problem themselves and the possible solutions to address the problems faced.

Therefore, engagement here is not only means how people outside trying to understand the social context that happened but also the youth gangs tries to understand themselves. It also involves process to identify the community potentialities and the solution to the problems. This is the basic essence of community empowerment (Freire, 1970). This process begins by questioning the daily life experienced by the citizens particularly the youth group. With questioning our daily life, we try to dismantle for-granted-ness. The questions posed are questions relating to how youth identify their potentialities, problems faced and solutions they think are likely to do. It is important to uncover the root of the problem. This effort does not aim to build awareness about the justice utopian but rather to raise awareness on a practical level of every day social life that what we have created is simply not fair, not just and not good enough. (Ledwith 2016: p6). The ultimate vision to be achieved is a life that is more equal, fair and have a reciprocal relationship. It is based on the principle that every person has the right to be trusted and appreciated.

In practice, questioning every day events to find the root of the problem, and potential solutions is not an easy thing to do. The goal is to see the contradiction, see the world in new ways, creating new knowledge and new stories that can be a basis for action to change (Ledwith, 2016). However, on one hand, many things are disclosed, such as poverty, lack of income, lack of education, and lack of employment as some fundamental problems. But on the other hand, it also shows the dominance patterns of thought about the root of the problems. Not many young people are capable of identifying inequities and lack of access as the root of the problems. They still envisaged that the state of poverty, lack of jobs and low educational achievement indeed is a condition that they should accept, it is not something they should questioned.

Similarly, in the exploring their potentiality, it was not easy for young people to quickly identify it. There are still cultural barriers when imagining what could be categorized as a potentiality. The dominant structure construction on what is called potentiality such as educational qualifications and expertise are still overshadow the youth participant's thoughts. The youth group become more aware their potentialities when the question is more directed at what they do or what they like to do. We all often still imprisoned in the construction of potentialities of the dominant structure and culture. Society has some specific standards that ultimately create boundaries between a group of community members who are able and who are not able to meet the standards. So this

become a trap for marginalized group when they think about their potentialities.

However, in the exploring phase of the solution, it turns out most of the youth participants can reveal concrete solutions that can help them get out from social problems. Interestingly, simple solutions that emerge from youth public meetings such as recognized them, unfortunately missed by policy makers. This also illustrates the lack of citizen engagement in identifying the potentialities, problems and solutions. Therefore, the overall activities are also a process of empowerment of citizens. It needs to be done in program design and development activities.

Institutionalization

One solution that emerged from the youth group is school. School still has power to promote change and at the same time still regarded as an important symbol status for the youth, even to dropped out schooler. Schools are still expected to become agents of social transformation for those who are marginalized. But the school is not envisioned as a formal school that have failed to be followed. Schools envisaged is a school in which the youth groups can learn their interests and desires.

Community School that incorporated is not only rely on the physical form but also rely on relationships that are built therein. The activities carried out are not directly to reconcile the conflicting parties since the data show that the issue of the brawl has its roots on more fundamental problems. Structural, cultural, and processual problems have a very important role in causing a brawl. Therefore, activities in Community School focus more on empowering activities that would change structural, cultural and processual condition.

Youth groups empowered through community schools by doing the right thing, having more positive way of thinking and having more productive activities. The main value invested is "doing right" by analogy of mango tree philosophy which implies that we live not only for ourselves, but we live to bear fruit that can be enjoyed and benefited by others, our communities and the next generation. Doing right is trying to do everything for a better life not only for ourselves but also other people, communities and the environment around us. The philosophy is the basis for activities in JoharBaru Community School. This mango tree philosophy did exactly wrap various activities undertaken in JoharBaru Community School. Here

are activities that become a node of transformation for youth groups in Community School (SKJB):

Empowering Through Art

Art turned out to have a major role in the process of social transformation. Artistic activity is a major aspiration that arise when a community school was established. Music, murals, graffiti and theatrical performance are some of the aspirations of art emerging from the daily life of youth groups in the district of JoharBaru. Although the habit of "hanging out" (squatting on the side of the road) at night tend to be viewed negatively because it triggers the emergence of gangs and eventually trigger a brawl, but on the other hand the habit of "hanging out" has positive function (MacKay, 2011: 27) such as a negotiating platform for young people to interact, learn from each other, finding job and networking. From this habit of hanging out, art aspiration appears and studied, ranging from singing together, learning self-taught musical instruments, making poetry, creating murals on city walls.

These art potentialities are being transformed in the community school to an activity that produce works with the help of the experts. Artistic activity becomes not merely an activity in their leisure time. Involved in various art gives a positive effect for young people. Art activities have the soothing effect, foster self-confidence and can be a conduit or instrument for handling disappointment of life. Within the school community, the whole work of art leads to creative products that can be source of income such a printing business, art product, street performance (busker).

Empowering Through KejarPaket ABC

KejarPaket ABC is an equivalency education program intended for people who home schooling, dropout, or elderly to equalize and catch up in the formal education system, especially at the level of primary, secondary and high school. At first it appears to be a resistance to government formal school and educational equality programs. Resistance stems from the failure to follow and meet the demands of formal schooling. Most of the young people who are active in JoharBaru community school dropouts both at high levels, secondary even at primary school level. Various reasons make them drop out of school, from economic problems, expelled from school because of mischief, rebels, absent from school. There are also factors of less attention of teachers, schools conditions that are less conducive to evoke the spirit of learning. Some also said that the condition

of the neighbourhood as the influence of peer group and family circumstances affect the motivation and enthusiasm for learning in formal school. This illustrates the structure and culture of the dominant pressure that eventually oppress them.

However, there is also an effort to negotiate the structures which oppress them, in the form of looking for shortcuts to get a fake diploma in order to be eligible to apply for jobs. Finally, many of them work as contract workers such as office boy parking attendants, porters and experiment subjects. There are some who also trapped in the employment sector that are classified as underground economy such as drug trafficking, illicit trafficking, identity theft until demonstration participants and the audience of seminar. This can happen because of the informal sector and underground economy more quickly and easily absorb the productive age group with low education and have a limited access to the dominant culture. In addition, it also illustrates that marginalized groups have a certain position and perform certain functions in our society. (Ilan, 2015)

Transformation efforts are conducted by generating confidence among them, and make the dominant structure to trust them and open the opportunity. Confidence appears when they realize their potentiality could bring hopes of change. The desire to follow the *KejarPaket ABC* grows when art development activities have been followed and resulted in productive works. Socialization of value "Doing Right" also become essential to be done continuously. This is done through the mechanism of the game such as "Building Towers". This is a game that internalize that each individual has different potentialities to be appreciated and cooperate with others can develop into something better. The activities of eating together at a restaurant and even a chance to visit hotel or mall is an experience inspire trust and to rebuild the fabric of social integration.

Empowering through Cultural Festival (Festival BudayaKampungJoharBaru)

Cultural festival is activities that is jointly designed by group of young people who join the JoharBaru community school. The issue of the availability of space for expression is crucial for them. Youth group in dense settlements with low education and relatively low employment status, are lack of this kind of space, not only in terms of physical space but also social and cultural space. For them, brawl or gang fighting is often seen as a space for them to express themselves

including express their disappointment in life, get public attention, and also being recognised by the community. Therefore, this cultural festival is meant to facilitate them with a physical, social and cultural space to negotiate with their structural oppression. The JoharBaru village cultural festival activities includes their involvement in planning, preparation, conducting the event and also is the space for them to present their talents and art products. It involve them to interact with other member society including community leader and local government to develop trust among them. The result show that after 3 times conducting the Village Cultural Festival, they get more confidence to take positive role in community development.

Conclusion

Community School is a social transformation efforts required for marginalized youth in urban areas. School as a concept is still trusted by marginalized youth as an agent of social transformation. However, their concept of school is meant to be the agent that dismantle marginality and for-granted-ness. The school in which its activities give space for negotiations and empowerment. Community School stems from the real issues faced by the community and tries to generate awareness and seek change for the better conditions. Community School has managed to establish and develop social integration.

The benefits that can be gained by the participants in the community school are:

1. Through the Community School youth group meet their needs to try to improve his education through the Packet ABC.
2. Through Community Schools, youth groups can expand their creativity by exploring their potentials in arts
3. Through Community Schools, youth groups can develop their creativity into productive economic resources
4. Through the activities carried out in the school community, confidence can be further enhanced
5. For the wider community, this community school can be one of the agents that open access for groups that have been marginalized.

As an agent of social transformation, community school need to be supported by a strong system of internal management. Social transformation requires a clear vision and relies on actors as community organizer that committed to real change. The involvement and synergy of government, business, academics and civil society groups is needed to develop community school. It

is also necessary for non-formal education systems to be more open and innovative.

The challenges facing comes from the dominant structure and the structure of the underground economy. Both of these structures continually embrace them which makes marginality as culture and eventually become a phenomenon that is taken for granted. Agents and actors in the dominant structure needs to be more open and move faster than the underground economy.

Acknowledgement

This participatory action research was funded by Directorate of Research and Community Engagement, Universitas Indonesia in 2012 and followed by community engagement program (Community School of JoharBaru) from 2013 – 2016. Special thanks to Prof. Paulus Wirutomo who initiate the research and support the writer with theoretical inputs. This participatory action research was a result of collaboration, commitment from students and researchers from Department of Geography and Department of Sociology, Universitas Indonesia.

References

- Darmajanti, Linda, Et.al. (2015). *PerangTanpaAlasan: TinjauanSosiologisTawuran di KecamatanJoharBaru Jakarta*, Ruwaida, Ida and Yasmine, Daisy Indira. Eds. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gore, C. (1995). Introduction: Market, Citizenship and Social Exclusion, in G. Rodgers, C.Gore and J.B. Figueiredo (eds), *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses* (pp.44-49). Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Haralambos, and Holborn. (2008). *Sociology: Themes and Perspective*.United Kingdom: Harper Collins.
- Howell, James C. and John P. Moore. (2010, months). History of streets Gangs in the United States. *the National Gang Center Bulletin* 4, pp.
- Hyman, Drew (1990). Six Models of Community Intervention: A Dialectical Synthesis of Social Theory and Social Action. *Sociological Practice*, Vol.8: Iss. 1, Article 5. Available at <http://digitalcommons.wayne.edu/socprac/vol8/iss1/5>

Ilan, Jonathan. (2015). *Understanding Street Culture: Poverty, Crime, Youth and Cool*. United Kingdom: Palgrave.

Ledwith, Margaret. (2016). *Community Development in Action: Putting Freire into Practice*. Great Britain: Policy Press.

MacKay, Jenny. (2011). *Gangs*. London: Gale Cengage Learning.

Midgley, J. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications.

Pacheco, H. R. (2010). *Gangs 101: Understanding the Culture of Youth Violence*. Philadelphia: Esperanza

McLean, R. (2017). An Evolving Gang Model in Contemporary Scotland. *Deviant Behavior*, 39(3), 309–321.

Sewell, William H. Jr. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. *American Journal of Sociology*, Vol. 98, No. 1 (Jul., 1992), pp. 1-29. The University of Chicago Press. <http://www.jstor.org/stable/2781191>

Tadie, Jerome. (2009). *Wilayah Kekerasan di Jakarta* (1sted.). Jakarta: Masup.

Tilly, Charles. (2003). *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press

Varshney, Asthutosh. (2010). *Collective Violence in Indonesia*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.

Wirutomo, Paulus. (2014). Sociological Reconceptualization of Social Development: with Empirical Evidence from Surakarta City, Indonesia. *Asian Social Science Journal*, Vol. 10, no. 11, June 2014, pp 283 – 293.

World Health Organization (2015). “*Preventing Youth Violence: An Overview of the Evidence*”. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181008/9789241509251_eng.pdf?sequence=1

PENDIDIKAN POLITIK MELALUI KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA IKIP GUNUNGSITOLI (Sosialisasi Politik di Lingkungan Mahasiswa IKIP Gunungsitoli).

Berkat Persada Lase
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli
Email : persadalase644@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam kaitannya dengan pendidikan politik bagi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam kaitannya dengan pendidikan politik bagi mahasiswa yaitu membentuk kepribadian politik mahasiswa melalui sikap dan perilaku yang berjanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menanamkan kesadaran politik mahasiswa dalam menghayati hak dan kewajibannya serta kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa terhadap kegiatan politik baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran organisasi mahasiswa sebagai wadah pendidikan politik, diselenggarakan melalui bidang kegiatan keorganisasian. Adapun bidang kegiatan organisasi mahasiswa tersebut antara lain : bidang penalaran dan keilmuan, bidang pengembangan minat dan bakat, bidang pengembangan organisasi, bidang sosial kemasyarakatan, serta aksi mahasiswa. Adapun hambatan yang dihadapi organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber dana dan komunikasi yang kurang efektif dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli. Faktor eksternal yang menjadi hambatan pelaksanaan pendidikan adalah sikap apatis mahasiswa, dan image negatif organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli.

Kata Kunci: Organisasi, Mahasiswa, Pendidikan, Politik

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu tuntutan untuk menciptakan warga Negara yang baik dan paham akan segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan warga Negara yang sejahtera. Salah satu pendidikan yang harus diberikan bagi warga Negara dalam kaitannya dengan kehidupan kenegaraan adalah adanya pendidikan politik bagi warga Negara. Ruslan (2000:87) memaknai pendidikan politik sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Pendidikan dan wawasan tentang politik tidak hanya sebatas yang diperoleh dari pendidikan formal yang dinilai memberikan informasi dan pengetahuan, misalnya dari hasil belajar dalam perkuliahan yang bernuansa politik, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan matakuliah khusus pada program studi pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi, pendidikan dan wawasan tentang politik dapat diperoleh melalui kegiatan dan keaktifan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan. Sebagaimana diungkapkan Budiarjo (2008:19) bahwa aktivitas organisasi mahasiswa yaitu “melakukan kajian/diskusi, mimbar bebas, seminar/talkshow, pelatihan /training, aksi/demonstrasi, advokasi hak mahasiswa, pemilu mahasiswa, sidang umum mahasiswa, bakti sosial, dan lainnya”. Hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pendidikan politik mahasiswa sehingga dari pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik.

Dalam kaitan pendidikan politik dalam kegiatan organisasi mahasiswa, hasil penelitian Hermawan (2003:143) menyimpulkan bahwa:

Pemahaman mahasiswa mengenai konsep pendidikan

politik terakumulasi melalui proses sosial yang kontinyu dan diwarnai oleh faktor-faktor lingkungan sosial yang beragam. Proses pendidikan politik (sosialisasi politik) mulai tertanam pada lingkungan keluarga, di sekolah, pemberitaan media massa, dan keaktifan pada organisasi mahasiswa (Ormawa). Ormawa merupakan pusat dan wahana yang strategis dalam pembentukan kepribadian, sikap dan perilaku mahasiswa. Perkembangan dan kematangan berinteraksi sosial, emosional, dan personal terpupuk dan terasah melalui realitas berorganisasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa organisasi mahasiswa merupakan wahana untuk belajar berpolitik. Dengan adanya organisasi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan pendidikan politik secara praktis, baik melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri maupun melalui pengamatan fenomena politik yang terjadi di masyarakat.

IKIP Gunungsitoli yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kepulauan Nias yang berdiri sejak tahun 1965. Seperti perguruan tinggi yang lain, IKIP Gunungsitoli memiliki wadah organisasi mahasiswa sebagai sarana untuk belajar berpolitik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya organisasi mahasiswa, seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi (BEMPT).

Organisasi mahasiswa di kampus IKIP Gunungsitoli memiliki peranan dalam membentuk persepsi mahasiswa dan pola sikap mahasiswa dalam menghadapi berbagai masalah politik, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam membentuk struktur organisasi kampus. Selain itu, mahasiswa mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya dalam berorganisasi dan belajar berpolitik, baik dari segi aspek kognitif, wawasan kritis, sikap, dan keterampilan mahasiswa.

Namun demikian, minimnya pendidikan politik yang didapatkan mahasiswa melalui proses perkuliahan di IKIP Gunungsitoli seringkali menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan yang vandal dalam berbagai aksi sebagai wujud kritikan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan lembaga perguruan tinggi maupun lembaga pemerintahan. Seperti halnya aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang berujung pengerusakan bangunan kampus dan

penyegelan ruang belajar mengakibatkan proses perkuliahan terganggu dan diberhentikan sementara.

Mahasiswa IKIP Gunungsitoli sebagai generasi muda yang berperan dalam perkembangan politik sebagai warga negara yang terampil menggunakan hak dan kewajibannya masih belum nampak. Mahasiswa beranggapan belajar politik itu tidaklah penting, Sebagian besar mahasiswa ke kampus hanya untuk mengikuti perkuliahan dan mendapatkan nilai yang tinggi.

Terlepas dari masalah yang dipaparkan di atas, pendidikan politik sangat dibutuhkan terlebih oleh mahasiswa dalam di lingkungan pendidikannya. Hal ini didukung oleh posisi mahasiswa sebagai calon kaum intelektual, pewaris nilai-nilai politik yang mesti digali dan dikembangkan. Pendidikan politik menjadi penting bagi mahasiswa sebagai upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan, termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Mahasiswa sebagai komponen masyarakat juga memiliki peran dan tanggung jawab ideologi sebagai pewaris perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional. Mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam kaitannya dengan pendidikan politik dan hambatan yang dihadapi organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam kaitannya dengan pendidikan politik bagi mahasiswa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa.

Kajian Pustaka

A. Pendidikan Politik

Secara terminology, pendidikan politik merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku yang diharapkan, sehingga dengan pendidikan politik dapat membantu manusia menjadi insan yang memahami dan menghayati hak dan kewajiban, berwawasan kedepan dan memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan pendidikan politik, dalam Impres No:12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982:2) dijelaskan bahwa :

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian dari proses pembangunan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokrasi, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.

Mengenai Pendidikan Politik dalam arti kata yang lebih ketat, Alfian (1986:235) mengatakan “pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”. Hal serupa juga dinyatakan oleh Kartono (1996:64) bahwa “pendidikan politik sebagai upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik”.

Pengertian pendidikan politik juga diungkapkan oleh para ahli, diantaranya yang menjelaskan titik poin pendidikan politik sebagai sosialisasi politik (*political socialization*). Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Menurut Supriadi (1999:70) “karena kata pendidikan politik dan kata sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian”. Alfian (1986:235) juga menganggap bahwa “adanya keeratan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik masyarakat sehingga ia mengatakan bahwa: adapun sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar”.

Sejalan dengan pendapat Alfian, Surbakti(1999:117) juga menegaskan bahwa “pendidikan politik merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan dari sosialisasi politik, memahami pendidikan politik berarti memahami sosialisasi politik”. Lebih jelas Surbakti mengungkapkan bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik adalah usaha yang dilakukan baik dalam lingkup formal maupun nonformal agar terjadi perubahan sikap dan perilaku diri individu menjadi manusia yang

memahami dan menghayati nilai-nilai sistem politik, yang menyadari keseimbangan hak dan kewajiban, mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dengan partisipasi masyarakat terhadap berbagai kegiatan politik, baik dalam lingkungan masyarakat terkecil, maupun politik dalam lingkup yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya pendidikan politik didasarkan atas arti pentingnya pendidikan politik itu sendiri, baik dilihat dari filosofi, tujuan, keterkaitannya dengan sistem pendidikan nasional maupun dari sudut esensi pengembangan generasi muda.

Secara filosofis, pendidikan politik mempunyai nilai penting karena ia bertolak dari arti kesamaan dan keutuhan konsepsi dan motivasi tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, pendidikan politik merupakan upaya menanamkan, menumbuhkan dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dilihat dari tujuannya, pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, baik dalam kaitannya sebagai anggota organisasi maupun sebagai warga negara. Pendidikan politik dipandang perlu dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab selaku anggota.

Keterkaitannya dengan sistem pendidikan nasional, pendidikan politik merupakan suatu proses membangun masyarakat yang mampu berkontribusi dalam kehidupan politik sehingga menciptakan masyarakat yang demokratis. Pendidikan demokrasi dalam wujud pendidikan politik harus dirancang secara sistemik dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan dan diciptakan interaksi fungsional-pedagogis dalam iklim sosial budaya di sekolah dan di luar sekolah. “Pembelajaran di kelas dikembangkan sebagai *‘democratic laboratory’*, lingkungan sekolah sebagai *‘micro cosmos of democracy’*, dan masyarakat luas sebagai *‘open global democracy’* (Winataputra, 2001: 37; 2005:17; 2007:226)”. Sehingga, siswa akan terlibat langsung sebagai subjek dan objek untuk tujuan berdemokrasi, hal ini untuk mewujudkan dan melatih siswa agar menjadi warga negara yang aktif sehingga menumbuhkan partisipasi yang cerdas berlandaskan keimanan dan katakwaan, karena dalam demokrasi Pancasila.

Dari sudut esensi pengembangan generasi muda, Pendidikan politik hasilnya terlihat, ketika warga negara muda kelak setelah menjabat dapat mengambil kebijaksanaan yang berdasar pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Sehingga segala kebijaksanaan pemerintah harus berdasar atau hasil musyawarah. “Kearifan dalam mengambil keputusan yang akan merupakan pedoman dan

garis kebijaksanaan itu adalah sesuai dengan jiwa Pancasila” (Darmodihardjo,1991:84).

B. Organisasi Mahasiswa

Organisasi merupakan suatu persatuan dari berbagai pribadi dengan tujuan dan saling bekerja sama. Organisasi lahir atas kesadaran bersama bahwa untuk mencapai suatu tujuan perlunya pengelolaan yang baik agar mencapai tujuan yang baik pula. Malayu (2012:32) mengatakan ”Organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja”.

Salah satu bentuk organisasi adalah organisasi kemahasiswaan. “Organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa” (Sukirman, 2004:72). Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. “Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa diperguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri” (Sudarman, 2004:34-35).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap organisasi harus mempunyai tiga unsur dasar yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa organisasi mahasiswa adalah sekelompok mahasiswa yang bekerja sama, dimana kerja sama tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dalam perguruan tinggi.

Fungsi organisasi kemahasiswaan menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi antara lain:

1. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa.
2. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.
3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.
4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi yaitu mahasiswa yang secara aktif menggabungkan diri dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, menyalurkan bakat, memperluas wawasan dan membentuk kepribadian mahasiswa seutuhnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Menurut Nasution (1988:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli melalui kegiatan keorganisasian dan hambatan apa saja yang dihadapi organisasi mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah IKIP Gunungsitoli yang berada di Jln. Yos Sudarso, No. 118 E-S Gunungsitoli. Perguruan tinggi ini terletak di arah pelabuhan laut Kota Gunungsitoli.

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui kredibilitas data penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis *interaktif* (Miles and Huberman 1992 ; 15-21), Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam Kaitannya Dengan Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli sebagai salah satu organisasi intra kampus memiliki misi menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi akademik, intelektual, sosial, sikap politik, dan keterampilan berpolitik mahasiswa. Sesuai dengan fungsi organisasi kemahasiswaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan mahasiswa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengadakan pendidikan politik bagi mahasiswa.

Sangat penting sekali peran dari organisasi kemahasiswaan ini, bukan hanya sebagai ladang ilmu politik yang sifatnya teoritis, namun organisasi semacam ini merupakan sarana pendidikan politik yang sifatnya praktis. Sebagaimana diungkapkan oleh Sumantri (2003: 7) bahwa organisasi kemahasiswaan harus dapat berperan sebagai :

- 1) Peranan Sebagai Wadah
Organisasi mahasiswa merupakan satu-satunya wadah kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mencapai pembinaan kemahasiswaan pada khususnya dan tujuan pembinaan generasi muda pada umumnya.
- 2) Peranan Sebagai Penggerak Motivator
Motivator merupakan rangsangan atau stimulus yang menyebabkan seseorang memiliki keinginan, semangat untuk melakukan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan yang positif.
- 3) Peran yang bersifat preventif
Preventif merupakan usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Jika dikaitkan pada hasil penelitian bahwa peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli berkaitan dengan pendidikan politik bagi mahasiswa dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Peranan sebagai wadah pendidikan politik

Peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli harus mampu berfungsi sebagai wadah, wahana dan tempat pembinaan kemahasiswaan lainnya sehingga mahasiswa mampu mengembangkan bakat, kreativitas, serta minat yang dimilikinya. Sudarman (2004:34-35) mengungkapkan bahwa “Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa diperguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri”.

Peran organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli sebagai wadah pendidikan politik dilaksanakan melalui bidang-bidang kegiatan dan aksi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa. Adapun bidang-bidang kegiatan dan aksi yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa sebagai sarana pendidikan politik antara lain yaitu: bidang penalaran dan keilmuan, bidang

pengembangan minat dan bakat, bidang pengembangan organisasi, bidang sosial kemasyarakatan dan aksi mahasiswa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa “Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat”. Berdasarkan keputusan menteri diatas jika dikaitkan dalam bidang kegiatan organisasi mahasiswa tidak lepas dari pendidikan politik, dimana kegiatan ekstrakurikuler tersebut merupakan sarana bagi organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan pendidikan politik.

b. Peranan sebagai penggerak motivator

Sebagai motivator organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli tampil sebagai penggerak apabila para pengurus mampu melaksanakan kegiatan keorganisasian dalam memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi mahasiswa. Peranan organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, membentuk kepribadian politik, keadaran berpolitik dan berpartisipasi dalam politik. Motivasi mahasiswa tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan politik yang diungkapkan oleh Kartono (1996:68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan politik ialah “upaya mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik), agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara”.

Selain itu peran organisasi mahasiswa sebagai motivator juga dapat menumbuhkan kecakapan-kecakapan dalam memahami situasi sosial politik dalam masyarakat. Budimansyah dan Winataputra (2007:190) menyatakan bahwa “pendidikan untuk warga Negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, ilmiah, dalam proses politik di dalam *civil society*”. Dengan demikian peran organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli sebagai motivator yaitu membentuk kepribadian politik mahasiswa melalui sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, menanamkan kesadaran politik mahasiswa dalam menghayati hak dan kewajibannya serta kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa terhadap kegiatan politik baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Peran yang bersifat preventif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi,2007:895) “preventif diartikan sebagai upaya yang bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)”. Peran organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang bersifat preventif merupakan salah satu wujud dari pendidikan politik dimana melatih mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam rangka mengawasi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat.

Peran organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang bersifat preventif ini dilaksanakan melalui kegiatan aksi mahasiswa. Aksi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam mengawasi kebijakan tersebut adalah dengan melakukan aksi demonstrasi. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum”. Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatral.

2. Hambatan yang Dihadapi Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik

Hambatan yang dialami oleh organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dapat diuraikan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli meliputi sumber dana dan kurangnya komunikasi yang kurang antar pengurus organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli.

a) Sumber Dana

Keberlangsungan organisasi mahasiswa tidak terlepas dari berbagai

jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, profesi, integritas kepribadian, sikap ilmiah, dan rasa persatuan dan kesatuan. Terkait dengan hal tersebut organisasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya memerlukan dana atau pembiayaan dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Pasal 10 ayat 1 bahwa “Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berbagai program kegiatan yang dirancang oleh pengurus organisasi mahasiswa di setiap bidang kegiatan keorganisasian, maka di perlukan dana yang tidak sedikit dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Wahyuni (2013:90) bahwa “ketersediaan dana sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi karena apabila dana yang tersedia minim kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa besaran dana yang ditetapkan dalam APB IKIP Gunungsitoli kepada organisasi mahasiswa yaitu mulai dari SMPT sebesar Rp 10.000.000, SMF sebesar Rp 4.000.000, dan HMP sebesar Rp 3.155.000, tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan yang dirancang, sehingga kebanyakan program-program kegiatan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Dana tersebut dikeluarkan tiap satu periode kepengurusan atau sekali dalam satu tahun berbeda tiap tingkatan organisasi mahasiswa.).

b) Kurang efektif komunikasi antara para pengurus organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli. Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Effendy (1990:5) menyimpulkan bahwa komunikasi adalah: "proses penyampaian suatu

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media".

Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu juga sebaliknya, apabila dalam sebuah organisasi komunikasi dan koordinasi tidak dapat berjalan dengan efektif, maka dalam mencapai tujuannya organisasi tersebut akan banyak mendapat hambatan yang disebabkan permasalahan komunikasi. Komunikasi antar anggota organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli masih kurang efektif. Adanya rasa egois dalam mempertahankan pendapat dan kurang menerima pendapat orang lain mengakibatkan komunikasi di antara anggota atau pengurus organisasi mahasiswa tersebut kurang harmonis. Perbedaan pendapat dan ketidakjelasan informasi yang disampaikan merupakan penyebab komunikasi dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli tidak berjalan efektif, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli menjadi terhambat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli meliputi kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik, pandangan negatif terhadap organisasi mahasiswa, dan sikap pragmatis mahasiswa.

a) Sikap apatis mahasiswa

"Apatitis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik", (Handoyo et al, 2010:230). Mahasiswa IKIP Gunungsitoli sebagai sasaran utama pelaksanaan pendidikan politik memiliki anggapan bahwa belajar politik itu bukanlah hal yang penting. Sebagian dari mereka banyak yang memiliki anggapan bahwa tugas utama mahasiswa adalah belajar di kampus dan indikator keberhasilan dari proses belajar itu dilihat dari jumlah Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi.

Kurangnya kesadaran mahasiswa IKIP Gunungsitoli terhadap pendidikan politik dapat menyebabkan mereka memiliki sikap apatis terhadap politik. Sikap inilah yang menjadi hambatan bagi organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam melaksanakan pendidikan politik.

Menurut Trimasanto, (1993:35) mahasiswa itu digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu :

Mahasiswa yang apatis dan mahasiswa aktif terhadap organisasi kampus. Mahasiswa yang apatis terhadap organisasi kampus merupakan mahasiswa yang aktif terhadap perkuliahan saja, segala sesuatu diukur dari pencapaian kredit semester dan indeks prestasi kumulatif yang tinggi dan dapat meraih gelar sarjana secepatnya. Sedangkan mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di kampus, yang sering disebut dengan aktivis kampus.

b) Image negatif terhadap organisasi mahasiswa

"Image atau Citra didefinisikan sebagai *a picture of mind*, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang" (Holt, dkk.1996:360). Renald kasali 2003:20) juga mendefinisikan citra sebagai "kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan". Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi yang didapatkan. M. Alwi Dahlan (1992:13) menyebutkan bahwa "Image (citra) dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya". Image yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi organisasi, sedangkan image yang buruk melahirkan dampak negatif dan menghambat kegiatan dalam organisasi mahasiswa.

Sikap, dan perilaku para pengurus organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang cenderung arogan dalam bertindak, serta selalu vandal ketika mengadakan aksi demonstrasi, membuat persepsi mahasiswa terhadap organisasi sebagai tempat orang-orang yang dilatih hanya untuk berdemo yang vandal. Hal inilah yang membuat image buruk organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan kurang mendapat antusias mahasiswa. Image negatif tersebut yang melekat terhadap organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli merupakan salah satu

hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik di kampus IKIP Gunungsitoli.

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Peranan organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitolidalam kaitannya dengan pendidikan politik bagi mahasiswa yaitu membentuk kepribadian politik mahasiswa melalui sikap dan perilaku yang berjanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menanamkan kesadaran politik mahasiswa dalam menghayati hak dan kewajibannya serta kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa terhadap kegiatan politik baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli diselenggarakan melalui bidang kegiatan kemahasiswaan. Adapun bidang-bidang kegiatan organisasi mahasiswa tersebut antara lain : a) bidang penalaran dan keilmuan dilaksanakana melalui kegiatan seperti seminar, diskusi ilmiah, dan lomba karya ilmiah; b) bidang pengembangan minat dan bakat dilaksanakan melalui kegiatan olah raga dan kesenian; c) bidang pengembangan organisasi dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan seperti: latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, latihan kepemimpinan mahasiswa; d) bidang sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui kegiatan sosial dan peduli lingkungan seperti berbagi kasih, donor darah dan mapala; e) aksi mahasiswa dilaksanakan melalui aksi demonstrasi.

2. Hambatanyang dihadapi organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa terdidi dari faktor internal dan eksternal :

- a. Faktor internal meliputi sumber dana yang sangat minin di berikan oleh pihak kampus atau institusi IKIP Gunungsitoli kepada organisasi mahasiswa tidak cukup dalam melaksanakan kegiatan yang di programkan oleh organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli. Komunikasi yang kurang efektif dalam organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli baik dalam penyampaian pendapat yang masih memiliki sifat egois maupun

sering terjadinya miss koordinasi antar pengurus organisasi.

- b. Faktor eksternal yang menjadi hambatan pelaksanaan pendidikan adalah sikap apatis mahasiswa yang menganggap pendidikan politik bukanlah hal yang penting bagi mereka. Image negatif organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang sebagian pengurusnya menunjukkan sikap arogan dalam bertindak, serta selalu vandal ketika mengadakan aksi demonstrasi, membuat persepsi mahasiswa terhadap organisasi sebagai tempat orang-orang yang dilatih hanya untuk berdemo yang vandal.

B. Saran

1. Bagi Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli

- a. Kiranya penelitian ini dapat memotivasi organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli dalam melaksanakan pendidikan politik dalam berbagai bidang kegiatan kemahasiswaan. Diharapkan juga agar kegiatan tersebut lebih kreatif dan menarik sehingga banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pendidikan politik.

- b. Dalam melaksanakan aksi mahasiswa dalam hal demonstrasi diharapkan mematuhi tahapan aksi yang telah ditetapkan, tidak bertindak vandal dan menaati setiap peraturan yang berlaku baik dari dalam kampus maupun di luar kampus atau lingkungan masyarakat. Jadilah organisasi kemahasiswaan yang mampu memberikan teladan bagi mahasiswa baik dalam tindakan, perbuatan dan motivasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bagi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli

- a. Kiranya penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa IKIP Gunungsitoli bahwa betapa pentingnya pendidikan politik itu bagi mereka. Dengan belajar politik diharapkan mahasiswa menjadi insan yang memahami dan menghayati hak dan kewajiban, berwawasan kedepan dan memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Diharapkan mahasiswa tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai penunjang bakat dan minat, serta menambah pengetahuan mereka terutama dalam membentuk kepribadian,

kesadaran dan partisipasi dalam berpolitik. Selain itu dengan bergabung di organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dilatih juga untuk menyusun strategi dan bisa manage waktu, diri sendiri dan orang lain.

3. Bagi Institusi IKIP Gunungsitoli
Dalam melaksanakan kegiatan, organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli memerlukan dana untuk mengsucceskan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pihak institusi IKIP Gunungsitoli dalam mendukung kegiatan organisasi mahasiswa tersebut dapat mempertimbangkan besaran dana yang diberikan kepada organisasi mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang selama ini masih sangat minim jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Alwi, Hasan, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-4. Balai Pustaka: Jakarta
- Budiarjo, Miriam.1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan M. Alwi. 1992. Paper: “Peranan dan Peluang Public Relations dalam meningkatkan Citra dan Pelayanan Perbankan”. (disampaikan pada seminar PR Bank: Pasca UU Perbankan 1992 di Jakarta)
- Darmodiharjo, Darji dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya :Usaha Nasional.
- Djohar. 1999. *Evaluasi atas Arah Pendidikan dan Pemikiran Fungsionalisasi Pendidikan Indonesia untuk Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik*. Jakarta: Yayasan Fase Baru Indonesia.
- Effendy, Onong. 1990. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Parktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Handoyo, Eko. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya
- Hermawan, Iyep Candra. 2003. “Implikasi Pendidikan Politik Pada Prilaku Politik Pimpinnan Mahasiswa : Studi Naturalistik Pendidikan Politik Organisasi Kemahasiswaan Universitas Indonesia”. Thesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas indonesia.
- Holt, dkk. 1996. *The Holt Dictionary of American English*. New York.
- Inpres RI No.12 tahun 1982 tentang “Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda”. Jakarta : Badan Penerbit Alda.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandiri Maju.
- Malayu. 2012. Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi [Online]. Tersedia : <http://www.slideshare.net/husni281090/propsals-skripsi>. diakses tanggal 15 desember 2014.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nasution, S. 1988. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bina Aksara
- Rhenald Kasali. 2003. *Manajemen Public Relations*. Jakarta. Grafiti
- Ruslan, U. AM. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: EraIntermedia.
- Sumantri. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Hal-7
- Sukirman, Silvia. 2004. *Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Trimasanto. 1993. Budaya organisasi. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Wahyuni N. Indah. 2013. Kajian Tentang KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa. *Sekripsi* tidak diterbitkan. Semarang :Universitas Negeri Semarang

Winataputra, U.S. 2001. "Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi". Ringkasan Desertasi Doktor pada FPS UPI Bandung : tidak diterbitkan

HEGEMONI BIBIR MERAH (Analisis Semiotika Konstruksi Kecantikan Bibir Perempuan melalui Lipstick pada Vlog Kecantikan *Beauty Vlogger* di YouTube)

Umahatun Mardiyah

F1A015051

Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed

Email : umahatunmardiyah97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai konstruksi kecantikan bibir perempuan melalui lipstick pada vlog kecantikan beauty vlogger di YouTube. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan semiotika Roland Barthes dengan memfokuskan pada makna denotasi, konotasi dan mitos yang terkandung dalam sebuah tanda. Sumber data penelitian berasal dari vlog yang diunduh dari YouTube berjumlah 9 vlog dari 3 beauty vlogger yaitu Alifah Ratu Saelynda, Abel Cantika dan Linda Kayhz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecantikan bibir berlipstick ditampilkan melalui tanda – tanda yang terdapat pada vlog. Cantiknya bibir perempuan ditampilkan melalui lipstick yakni bibir yang selalu memakai lipstick, bibir berlipstick sesuai dengan warna makeup, bibir berlipstick tanpa garis halus, bibir berlipstick setiap saat. Bibir berlipstick sebagai simbol kecantikan, sensualitas, seksualitas dan kemewahan, bibir berlipstick tebal, bibir berlipstick cerah serta bibir berlipstick sesuai dengan warna kulit. Sementara bibir berlipstick pucat dan bibir tanpa lipstick adalah jelek. Dengan demikian vlog ternyata tidak melemahkan kekuasaan capital namun justru semakin memperkuat hegemoni bibir merah. Sementara itu, fenomena vlog kecantikan juga banyak menampilkan tanda-tanda yang berasosiasi kuat dengan kapitalisme, industri dan hedonisme.

Kata kunci : *vlog, beauty vlogger, perempuan, kecantikan bibir berlipstick*

Pendahuluan

Kecantikan merupakan sebuah konstruksi sosial. Standar kecantikan berubah dari masa ke masa yang disesuaikan dengan bentuk reaksi terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik dan juga budaya (Worotitjan, 2014, p.3). Kesan ini kemudian ditangkal oleh kaum kapitalis untuk menciptakan dan melanggengkan standar kecantikan yang bertujuan untuk mendukung produk-produk kecantikan yang diciptakannya. Standar kecantikan yang diciptakannya yaitu bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang berkulit putih, berhidung mancung, berpostur tinggi, berambut lurus, bibir tipis, gigi putih dan beraturan.

Kecantikan yang dibentuk hanya berkisar pada area fisik saja saat ini telah berkembang keranah yang lebih luas yaitu cantik identik dengan berdandan menggunakan produk-produk kosmetik untuk memenuhi predikat cantik. Salah satu produk kosmetik yang digemari perempuan untuk memenuhi

predikat cantik yaitu lipstick. Lipstick merupakan pewarna pada bibir sebagai penyempurna riasan

dalam berdandan. Warna cerah dari lipstick memberikan suasana wajah tidak pucat sehingga dapat memberikan kepercayaan diri perempuan untuk tampil di depan umum. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila perempuan selalu membeli dan mengoleksi berbagai merk serta warna lipstick untuk membuat dirinya menjadi cantik setiap saat. Kondisi ini dinamakan dengan hegemoni.

Hegemoni melalui lipstick pada perempuan dapat disebut sebagai hegemoni bibir merah. Bibir merah ditunjukkan kepada perempuan untuk memiliki bibir yang menarik dipandang karena berwarna cerah merona dan tidak pucat. Hegemoni bibir merah ini menggambarkan sebuah fenomena bagaimana perempuan-perempuan selalu menginginkan tampil menarik pada bibirnya. Selain berwarna, cantik melalui lipstick ini berkaitan secara langsung dengan keindahan bibir, kesehatan bibir dan makna kesempurnaan bibir yang secara

menyeluruh dapat memancarkan kecantikan wajah.

Pencapaian hegemoni bibir merah tidak lepas dari alat yang digunakan para kapitalis (industry kecantikan) sebagai legitimasi kekuasaannya. Kemajuan teknologi dan komunikasi dimanfaatkan oleh para kapitalis ini untuk menyebarkan konstruksi kecantikan melalui berbagai promosi iklan baik melalui media televisi maupun media sosial. Promosi produk kecantikan ini akhirnya memunculkan fenomena selebritas baru dalam bidang kecantikan yang dikenal dengan *beauty vlogger*. *Beauty vlogger* adalah seseorang yang membuat vlog tentang kecantikan. Di Indonesia, ada banyak *beauty vlogger* antara lain Rachel Goddard, Sarah Ayu, Abel Cantika, Nanda Arsyinta, Hanggih Purinda Retto, Suhay Salim, Cinderella, Dhani Xaviera, Kesha Ratuliu, Tasya Farasya, Alifah Ratu Saelynda, Nadya Aqilla, Devienna *Makeup*, Molita Lin dan Lynda Kayhz (Prasetya, 2018; Highlight, 2018).

Hegemoni bibir merah bagi perempuan oleh *beauty vlogger* divisualisasikan melalui vlognya di YouTube baik vlog mengenai tutorial *ber-make up* maupun *review* secara khusus mengenai lipstik. Pada saat *beauty vlogger* memberikan tutorial cara *bermake up* bagi para pengikutnya secara langsung memberikan cara berpenampilan yang sama kepada pengikutnya di media sosial. Semakin lama perempuan secara tidak sadar telah terhegemoni oleh *beauty vlogger* melalui vlognya. Pada akhirnya, konstruksi kecantikan bibir perempuan telah membentuk dengan sempurna. Para kapitalis telah berhasil mengubah para perempuan untuk tidak bisa meninggalkan lipstik karena lipstik membuat perempuan menjadi cantik. Lipstik sudah diyakini oleh banyak perempuan sebagai nyawa dari wajah yang tidak bisa ditinggalkan setiap saat.

Beberapa penelitian yang terkait dengan *beauty vlogger* yaitu penelitian Gozali (2018) berjudul *Konten Review Product Beauty vlogger dan Minat Beli Mahasiswa (Studi Korelasional Pengaruh Konten Review Product Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Mahasiswa FISIPUSU)* yang memfokuskan kajiannya pada pengaruh *review* produk dari *beauty vlogger* terhadap minat beli. Hasil penelitian ini adalah bahwa mahasiswi FISIP USU tertarik untuk menggunakan dan membeli produk yang di-

review beauty vlogger di YouTube serta terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara konten *review product beauty vlogger* terhadap minat beli mahasiswa fisip USU) (Gozali, 2018).

Penelitian yang lain dilakukan oleh Najihan (2017) berjudul *Efektivitas Beauty vlogger dalam Meningkatkan Minat Beli Produk Kecantikan (Survey pada Pengunjung dalam Video YouTube Wardah One Brand Makeup Tutorial Akun Abel Cantika)* dengan fokus yang hampir sama yakni *beauty vlogger* dan peningkatan minat beli produk kecantikan. Hasil dari penelitian ini adalah *beauty vlogger* efektif dalam meningkatkan minat beli produk Wardah karena keduanya memiliki hubungan yang positif (Najihan, 2017). Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, penelitian ini akan lebih memfokuskan kajian secara sosiologis pada vlog kecantikan yang memuat unsure produk lipstik dari *beauty vlogger* sebagai alat kuasa dalam membentuk dan melanggengkan hegemoni bibir merah bagi perempuan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kecantikan dan Lipstik dalam Media

Saat ini, lipstik dapat dimaknai sebagai bagian dari ideology kecantikan bagi perempuan. Makna ini juga tidak lepas dari konstruksi peran media terhadap hubungan cantik dan lipstik. Dalam berbagai media seperti media cetak, elektronik maupun internet, lipstik sebagai produk kecantikan ditampilkan melalui iklan kecantikan pula. Akan tetapi iklan produk ini selalu direpresentasikan melalui perempuan yang cantik. Perempuan cantik ini yakni perempuan yang berkulit putih, berpostur tinggi, bertubuh langsing dan bibir merah. Bibir merah ini adalah sebutan menggunakan lipstik berwarna. Lipstik juga tidak hanya ditampilkan melalui iklan-iklan produk kecantikan saja, bahkan dalam iklan yang tidak mengandung unsure kecantikan namun memiliki objek perempuan di dalamnya, maka perempuan tersebut selalu memakai lipstik agar wajahnya terlihat berwarna.

Di berbagai acara media seperti film, tayangan sinetron, berita, *talkshow*, *entertainment* dan semacamnya ketika memilih perempuan sebagai actor atau pembawa acaranya maka perempuan tersebut akan memakai *makeup* dan lipstik adalah salah satunya. Pada akhirnya,

berbagai media ini telah menampilkan perempuan tidak dapat lepas dari lipstik sehingga menjadikan lipstik tidak lepas pula dari kehidupan perempuan. Mulai dari perempuan melakukan berbagai aktivitas sehari-harinya seperti bekerja, bermain, bertemu dengan teman, bersekolah, berkuliah atau kegiatan yang lainnya (kegiatan luar rumah). Dalam hal ini sebenarnya media telah memengaruhi dan mengatur wajah perempuan melalui lipstik.

2. Industri Kecantikan dan *Beauty Vlogger*

Industri kecantikan dan *beauty vlogger* memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Industri kecantikan membutuhkan *beauty vlogger* sebagai alat atau media promosi bagi produk kecantikannya sedangkan *beauty vlogger* mendapatkan imbalan dari kegiatan promosi produk kecantikan tersebut. Industri kecantikan memanfaatkan *beauty vlogger* karena mereka memiliki banyak kelebihan yang mampu mempengaruhi penonton untuk mengonsumsi produk yang telah diiklankan melalui vlog-vlognya. Sama halnya dalam penelitian Sarashadi dan Dewi (2018) yang menghasilkan temuan bahwa *beauty vlogger* yang memiliki kepercayaan, keahlian dan daya tarik yang tinggi berpengaruh positif terhadap niat beli sebuah produk yang diiklankan. Semakin tinggi penilaian positif dari penonton maka semakin tinggi pula niat beli penonton dalam membeli produk yang diiklankan oleh *beauty vlogger* (Sarashadi & Dewi, 2018).

Keberadaan *beauty vlogger* dalam media sosial memberikan pengaruh positif dan negative bagi pengikutnya atau penontonnya ketika mereka mengonsumsi vlog-vlog kecantikan. Pengaruh positif keberadaan *beauty vlogger* bagi pengikutnya adalah mampu memberikan edukasi dan referensi pemakaian produk kecantikan yang lebih aman sehingga menjadikan perempuan lebih selektif dalam memilih produk. Namun, pengaruh negative dari *beauty vlogger* melalui vlognya adalah memberikan dogma atau cara berpikir maupun cara berpenampilan yang sama kepada pengikut atau penontonnya. Selain itu pula, keberadaan *beauty vlogger* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dan imitasi bagi penontonnya di media sosial. Pengaruh negative ini tentu tidak secara langsung dirasakan, namun tanpa disadari cara berpenampilan, gaya hidup dan gaya *bermakeup* dari *beautyvlogger* secara terus menerus ditiru oleh pengikutnya di media sosial.

3. Hegemoni Bibir Merah

Hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (Arvianto, 2016, p.155). Kelompok yang ditunjuk sebagai kelompok tujuan kelas dominasi dinamakan sebagai kelompok “subaltern”. Dalam bahasa Gramsci, mereka adalah “kelompok inferior” yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas berkuasa sekaligus tidak memiliki akses kepada kekuasaan hegemonik (Suryawan, 2009, p.84).

Dalam konsep hegemoni, kekuasaan dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja yaitu perangkat kerja yang memiliki kekuatan memaksa dan perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat bersama pranata-pranatanya untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui berbagai bidang kehidupan.

Saat ini, hegemoni berkembang menjadi sesuatu yang mengerikan. Melalui berbagai media sebagai alatnya, hegemoni telah merasuki berbagai sendi kehidupan masyarakat. Kaum penguasa telah menindas kaum subordinat seperti salah satunya yaitu kaum perempuan. Berbagai bentuk hegemoni oleh kapitalis terhadap perempuan sudah secara terus menerus dilakukan mulai dari hegemoni budaya, hegemoni patriarki dan juga hegemoni atas tubuh perempuan itu sendiri. Dalam penelitian Farida (2013) hegemoni patriarki ditunjukkan dan dibentuk melalui media massa Rubik Kompas Female pada situs *Kompas. Com* yang secara eksplisit menyampaikan pesan bahwa program diet dilakukan perempuan bertujuan untuk kesehatan. Namun sebenarnya secara implicit program diet dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal yaitu lekuk tubuh indah dan pinggang yang ramping sebagai tubuh ideal yang menjadi minat kaum pria. Selain itu, ada hegemoni patriarki yang ditampilkan melalui pemberian gambar seorang ibu yang sedang duduk bercengkrama dengan anak-anaknya dimana secara implicit mengartikan bahwa ibu adalah pengurus rumah tangga sekaligus pengasuh bagi anaknya (Farida, 2013).

Selain itu, perempuan juga mengalami hegemoni atas tubuh mereka sendiri yaitu melalui khususnya hegemoni wajah perempuan yang terletak pada bibir. Bibir perempuan menjadi salah satu objek hegemoni bagi perempuan untuk tampil lebih sempurna melalui bibirnya. Para kapitalis

menciptakan sebuah hegemoni bibir cantik bagi perempuan yakni bibir merah. Artinya bibir merah ini adalah bibir yang memiliki warna cerah, merona dan tidak pucat. Selain berwarna, cantik melalui lipstick ini berkaitan secara langsung dengan keindahan bibir, kesehatan bibir dan makna kesempurnaan bibir yang secara menyeluruh dapat memancarkan kecantikan wajah. Bibir merah yang dimaksud bukanlah bibir asli dari perempuan itu sendiri untuk menjadi merah melainkan melalui produk kosmetik lipstick yang diciptakan untuk memberikan peluang keuntungan produk ciptaan kapitalis tersebut. Hegemoni ini diciptakan bertujuan agar produk-produk para kapitalis terutama industri kecantikan yang memproduksi kosmetik lipstick dapat menjualkan produknya di pasar secara cepat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi kecantikan bibir perempuan melalui lipstick pada vlog kecantikan *beauty vlogger* di Youtube. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan konstruksi kecantikan bibir perempuan pada vlog secara detail penelitian ini menggunakan metodologi atau pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, khususnya dengan menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Semiotika merupakan suatu metode analisis data untuk mengkaji suatu tanda (Sobur, Semiotika Komunikasi, 2003) Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan tingkat konotasi yang kemudian menjadi mitos. Melalui semiotika ini, makna yang ada di balik tanda-tanda dapat dikaji dan dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

YouTube merupakan salah satu media social yang sering dikunjungi oleh pengguna internet. YouTube juga merupakan situs *webvideosharing* (berbagi video) yang cukup populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Video-video ini berasal dari pengguna YouTube itu sendiri yang dikenal dengan istilah YouTuber. Para YouTuber dapat mengunggah hasil video karya sendiri untuk dipublikasikan secara luas kepada pengguna atau masyarakat. Hasil video karya sendiri ini dinamakan dengan video *blogging* atau vlog.

Ada banyak kategori vlog yang diunggah pada *channel* YouTube. Salah satu diantaranya yaitu *beauty vlog*. *Beauty vlog* merupakan tayangan atau video yang berisi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kecantikan. Seorang YouTuber yang fokus dalam membuat konten-konten seputar kecantikan ini dikenal dengan *beauty vlogger*. Di YouTube sendiri, *beauty vlogger* dapat mempromosikan produk-produk kecantikan, memberikan tutorial *ber-makeup* dalam setiap acara-acara tertentu dan memberikan tips dan *trick* agar tetap cantik serta menjaga kecantikan.

Pada awalnya *beauty vlog* bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi seputar produk-produk kecantikan agar perempuan menjadi lebih selektif dalam memilih produk yang akan digunakan. Namun, seiring waktu berjalan, perempuan-perempuan justru semakin membuat mengonsumsi secara massif *beautyvlog*. Banyak perempuan meniru gaya hidup dari *beauty vlogger* yang kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan apa yang harus digunakan pada waktu-waktu tertentu seperti dalam hal kecantikan. Melalui media *beauty vlog*, *beauty vlogger* dinilai menjadi platform media untuk mendukung konstruksi “kecantikan” yang semakin mantap pada kaum hawa. Menurut Peter L Berger dan Thomas Luckman menggambarkan konstruksi sebagai proses social melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Melalui media, konstruksi sebuah realitas mampu dibentuk secara cepat melalui proses eksternalisasi, subjektivikasi dan internalisasi (Tamburaka, 2012, p. 75).

Konstruksi kecantikan perempuan pada vlog salah satunya adalah kecantikan wajah yang utamanya terletak pada bagian bibir melalui penggunaan lipstick. Konstruksi kecantikan bibir melalui lipstick yang ditunjukkan kepada para perempuan merupakan bagian dari rencana kapitalis yang telah berhasil sampai saat ini. Hal ini telah dibuktikan dari banyaknya perempuan yang memakai lipstick pada kegiatan apapun dan bahkan perempuan akan merasa tidak percaya diri apa bila tidak memakai lipstick pada saat di luar rumah. Lipstick dinilai sebagai bagian dari hidup perempuan yang sudah tidak dapat dilepaskan. Bahkan di beberapa daerah, lipstick sudah menjadi symbol dan status bagi

perempuan dalam hal kecantikan. Konstruksi kecantikan bibir perempuan melalui lipstick pada

vlog *beauty vlogger*, antara lain:

1. Bibir Cantik, Berwarna dengan Lipstik



Vlog pertama berasal dari *beauty vlogger* yaitu Alifah Ratu Saelynda yang berjudul “*Fresh Glowing Simple Make Up Tutorial-Bisa untuk Remaja dan Ramadhan*”. Pada vlog ini terdapat empat *scene* atau gambar. Gambar menunjukkan perubahan ekspresi Alifah karena telah mengoleskan dua warna lipstick pada bibirnya untuk menyesuaikan dengan warna *makeup* yang dipakai dilihat sebagai tanda. Ekspresi tersenyum Alifah menandakan kepuasan dan kepercayaan diri atas pemakaian warna lipstick yang sesuai dengan warna *makeup* sehingga terlihat cantik. Inilah makna denotative yang dibangun oleh Alifah dalam vlognya.

Di sisi lain makna konotatif yang ingin disampaikan adalah bahwa perempuan ingin tampil cantik dengan perpaduan warna yang menarik dan selaras. Warna inipun salah satunya berasal dari lipstick. Penggunaan warna lipstick yang sesuai dengan warna riasan wajah lainnya dapat memberikan suasana wajah lebih indah dan perempuan menyukai kecantikan melalui warna-warna. Oleh karenanya, makna konotatif yang dihasilkan adalah bahwa warna lipstick dapat mempercantik penampilan sehingga membuat perempuan senang dan percaya diri. Melalui rasa percaya diri ini maka perempuan lebih berani untuk tampil di depan umum. Inilah makna konotatif yang terbangun.

Visualisasi penggunaan *background* warna abu-abu dengan dipadukan lampu tumblr putih merupakan cara eksplisit yang diperlihatkan Alifah untuk menunjukkan bahwa perempuan menyukai keindahan. Keindahan ini menciptakan sebuah keharmonisan ruangan sehingga semakin hidup. Bahkan hal ini dia tunjukkan pula melalui penggunaan warna lipstick yang dioleskan

sampai dua kali. Penggunaan lipstick pertama warna coral terlihat tidak sesuai. Artinya bahwa warna lipstick coral yang dioleskan tidak indah karena tidak mencapai “keselarasan” wajah yang sempurna sehingga dibuatkan menjadi indah melalui penambahan lipstick berwarna orange agar selaras dengan riasan *makeup* yang sebelumnya telah dipoleskan di wajahnya. Makna keselarasan warna *makeup* untuk menghasilkan keindahan sehingga menciptakan kecantikan inilah yang dimaksud sebagai mitos. Wajah perempuan dengan berbagai warna “harus” memadukan keindahan pada kesemuanya sehingga mencapai keselarasan dan menjadikan wajah perempuan terlihat cantik.

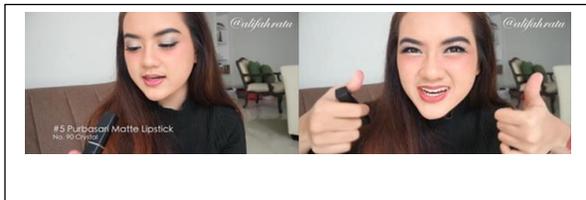
Keselarasan untuk memancarkan kecantikan wajah yang harmonis melalui lipstick ditonjolkan pula melalui berbagai warna *makeup* yang lain seperti warna riasan mata, hidung dan juga pipi. Pada penggunaan riasan pada mata adalah agar mata terlihat lebih sehat dan mempertajam warna kornea mata. Penggunaan *shading* pada hidung adalah agar hidung terlihat mancung dan penggunaan *blushon* pada pipi adalah agar pipi terlihat tirus. Sementara kegunaan lipstick disini adalah sebagai penyelerasan keindahan bagian wajah yang lain sehingga dapat memancarkan kecantikan yang lebih hidup. Dari kesemuanya ini merupakan kriteria kecantikan menggunakan *make up* yang menjadikan wajah semakin indah dan terlihat selaras.

Pandangan semacam itu telah menjadi ideology yang diyakini oleh banyak masyarakat sebagai ideology kecantikan. Hal ini pun sepertinya tidak dapat dilepaskan dari peran media itu sendiri. Banyak media saat ini menciptakan budaya-budaya media. Budaya media ini menunjuk pada suatu

keadaan dimana tampilan audio dan visual atau tontonan-tontonan telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang (Farida, 2013).

Para kapitalis juga secara terus memberikan penguasaan ideologinya baik dalam pasar skala nasional hingga internasional melalui doktrin-doktrin yang menghegemoni masyarakat melalui media. Mereka menggunakan media sebagai sarana rasionalisasi dan ketergantungan masyarakat di mana saja serta pemupukan semangat konsumerisme maupun hedonism khususnya dalam produk-produk yang membuat diri perempuan “cantik” salah satunya dengan memberikan jalan konstruksi bahwa cantik adalah keselarasan menciptakan kecantikan.

2. Bibir Cantik Berwarna adalah Inner Beauty



Gambar 5

Gambar 6

Vlog dari Alifah Ratu Saelynda yang berjudul “11 Lipstick Lokal Favorit + Swatches (Purbasari, Wardah, Kimasako, Lt Pro)” ini merupakan vlog yang memberikan informasi terkait jenis-jenis lipstick favoritnya disertai dengan *review* pada setiap lipstick mulai dari lipstick merk Purbasari, Wardah, Kimasako sampai LtPro. Bukan hanya itu, Alifah juga merekomendasikan lipstick-lipstick yang cocok dalam berbagai acara tertentu seperti untuk *daily* (aktivitas sehari-hari), acara formal (kondangan) maupun untuk bekerja.

Alifah mengekspresikan kegembiraan dan kepuasannya mengenai lipstick berwarna nude yang dipakai karena terlihat kalem saat acara formal dapat dilihat sebagai tanda. Sebuah ekspresi muncul dari keadaan hati yang berubah. Pemberian ekspresi senyum menandakan rasa puas. Rasa puas ini muncul atas penggunaan lipstick karena dinilai warna lipstick tidak menimbulkan efek terlihat menor bagi

pemakainya. Oleh karenanya, makna denotasi yang muncul adalah pemberian ekspresi senyum menandakan kepuasan atas penggunaan lipstick karena dinilai warna lipstick tidak menimbulkan efek terlihat menor bagi pemakainya. Sementara makna konotatifnya adalah warna lipstick dapat membentuk kepercayaan diri perempuan. Makna ini muncul sebagai bentuk perluasan makna yang tersirat dari sebuah ekspresi kegembiraan Alifah. Kepercayaan diri merupakan salah satu unsure kepribadian seseorang. Rasa percaya diri biasanya sulit didapatkan. Namun kepercayaan diri bisa diperoleh melalui berbagai hal tidak terkecuali dengan berdandan.

Berdandan atau ber-*makeup* natural disukai banyak perempuan. *Make up* natural meningkatkan kepercayaan diri seorang perempuan sesuai dengan fungsinya, yakni *enhance* dan meninggikan citra diri dimata orang lain. Melalui *makeup* khususnya riasan natural juga mencerminkan identitas karakter diri sehingga mampu memancarkan kecantikan dari dalam seorang perempuan. Riasan natural berarti segalanya yang terpakai yaitu produk-produk *makeup* juga berwarna natural, tidak terkecuali warna lipstick yang dipakai. Lipstick menjadi bagian produk riasan wajah yang penting diperhatikan. Sebab, lipstick menyumbang pengaruh besar bagi riasan *makeup* yang natural sehingga terbentuklah mitos bahwa kenaturalan lipstick menciptakan kepercayaan diri dan memancarkan *inner beauty*. Hal ini karena riasan yang kesemuanya adalah warna natural termasuk warna dari lipstick itu sendiri.

Sebuah studi yang dilakukan Western Australia's Edith Cowan University mengungkapkan bahwa 85% dari 300 wanita memakai lipstick merasa sangat percaya diri saat mengenakan perona bibir dan 82% dari mereka pun merasa sangat puas dengan diri sendiri (Anjani, 2016). Selain itu, semakin sering perempuan memakai lipstick maka semakin tinggi juga rasa percaya diri yang akan dimiliki. Dengan merasa lebih percaya diri saat mengaplikasi lipstick, wanitapun jadi lebih semangat berkompetensi dalam segala hal (Anjani, 2016). Melalui kepercayaan diri yang tinggi perempuan dapat tampil secara maksimal dalam sector publik seperti bekerja ataupun berkunjung pada acara formal.

Pada realitasnya, lipstik nude masuk pada golongan warna natural dimana dianggap lebih aman untuk dipakai agar memberikan kesan baik. Makna kena turalan lipstik ini, dapat memberikan kesan bahwa kena turalan lipstik menjadikan diri perempuan memiliki aura yang lebih positif dari sebaliknya. Kesan ini kemudian menjadi sebuah pemerhati yang cukup baik untuk ditayangkan melalui berbagai media khususnya iklan.

Melalui makna naturalnya lipstik dapat menciptakan sebuah rasa percaya diri sehingga dapat memancarkan kecantikan wajah. Pembentukan ideology iklan ini adalah dengan menanamkan sebuah makna “kenaturalan” dan “kepercayaan diri” sebagai perasaan yang dapat memancarkan *inner beauty*. Penciptaan produk lipstik menjadi bermakna sebagai perasaan yang dapat memancarkan *inner beauty* ini diciptakan melalui citra-citra yang diberikan oleh *beauty vlogger*. Pemilihan *beauty vlogger* sebagai alat menciptakan realitas yang bermakna dipilih secara selektif. Karakteristik *beauty vlogger* yang dipilih biasanya harus memiliki paling tidak tiga kriteria yaitu daya tarik, kepercayaan dan keahlian. Semakin tinggi daya tarik, kepercayaan dan keahlian yang dimiliki *beauty vlogger* maka semakin tinggi pula minat konsumen untuk membeli produk. Para kapitalis sebagai penguasa mengartikan situasi ini sebagai peluang memantapkan wacana ideology. Wacana ini tidak hanya sekedar untuk menjual produknya saja melainkan memberikan semacam dogma secara halus yang ditanamkan pada benak perempuan agar membeli citraan perasaan-perasaan itu. Ketika citra tentang perasaan ini mengemuka maka produk tidak hanya bermakna sebagai produk saja namun bermakna sebagai kebutuhan yang tiada batas dalam kehidupan perempuan. Terbentuknya realitas semacam itu dihasilkan melalui dukungan konstruksi media. Melalui media sebagai alat menyebarkan kekuasaan, konstruksi ini semakin lama semakin membentuk hegemoni masyarakat mengenai hal tersebut. Hegemoni ini diciptakan dan digaungkan secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah konsepsi bahwa kenaturalan lipstik dapat membentuk kepercayaan diri dan memancarkan kecantikan dari dalam.

3. Bibir Berwarna Tanpa Garis Halus



Gambar 7

Scene atau gambar ini merupakan bagian dari vlog Alifah yang berjudul “11 Lipstik Lokal Favorit + Swatches (Purbasari, Wardah, Kimasako, LtPro)”. **Padasceneini**, Alifah berpendapat bahwa lipstik Kimasako lebih memiliki tekstur yang dapat menutup garis bibirnya dari pada merk Wardah yang memiliki tekstur *matte* namun cenderung kering sehingga tidak dapat menutup sempurna garis-garis tipis bibirnya. Dalam kata lain, Alifah membandingkan hasil olesan lipstik yang dapat menutup atau memperlihatkan garis-garis tipis pada bibirnya yang terlihat setelah memakai lipstik. Alifah membandingkan tekstur antara lipstik satu dengan yang lain agar memberikan penampilan yang tidak memperlihatkan garis-garis halus bibirnya karena dinilai dapat merusak penampilan utamanya bibir. Inilah makna denotatifnya. Sementara itu makna konotatifnya yaitu kecantikan bibir perempuan terlihat saat memakai lipstik tanpa terlihat garis-garis tipis bibirnya.

Perempuan sebagai sosok yang menyukai kesempurnaan ternyata diterapkannya pula kepada penampilannya termasuk bibirnya. Penampilannya semakin sempurna menggunakan produk kecantikan yang dinamakan dengan lipstik. Kesempurnaan ini tidak hanya soal warna saja melainkan berasal dari tekstur yang diberikan oleh lipstik sehingga memberikan kesan bahwa bibir lebih sehat. Tekstur ini dapat menutup berbagai kekurangan pada bibir perempuan. Hal ini bisa menjadi sebuah mitos. Mitos bahwa perempuan menyukai kesempurnaan sehingga lipstik membentuk bibir menjadi sempurna. Arti sempurna ini adalah bahwa melalui lipstik, bibir perempuan dapat terlihat lebih berwarna tanpa harus terlihat garis-garis bibir yang dapat merusak penampilannya.

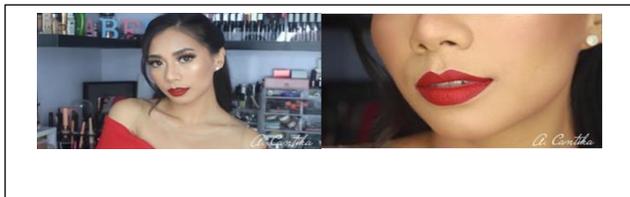
Pada dasarnya, setiap bibir pasti memiliki garis-garis halus. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas

bibir itu sendiri dalam membantu berbicara, minum, makan, tertawa maupun tersenyum sehingga bibir mengalami perubahan bentuk yang apa bila kembali seperti semula akan mengakibatkan bekas garis-garis halus yang semakin lama semakin jelas. Selebihnya adalah diakibatkan oleh factor alami.

Kemunculan garis-garis halus yang awalnya merupakan wujud natural atau alamiah dari bibir ternyata berakhir menjadi sebuah masalah yang harus dihilangkan. Kemunculan lipstikpun menjawab permasalahan tersebut. Lipstik dengan berbagai tekstur dinilai dapat menutup garis-garis bibir dengan sempurna. Artinya lipstick dinilai memiliki unsure kesehatan melalui segi teksturnya sehingga tekstur menjadi pemerhati bagi kaum hawa dalam memakai lipstik.

Kapitalis membentuk sebuah anggapan-anggapan yang kemudian menguasai pikiran perempuan mengenai bibir perempuan agar terlihat cantik. Tidak hanya bibir tanpa garis halus saja melainkan anggapan-anggapan yang lain sehingga menghegemoni pikiran-pikiran mereka. Hal ini tentu bertujuan tidak lain untuk meningkatkan efektivitas industri kosmetik mereka. Perempuan dibuat tidak sadar akan “ideologi bibir cantik” yang telah dikonstruksikan. Sebabnya adalah bahwa dalam stereotip gender sendiri, salah satu sifat yang dilekatkan pada wanita adalah anggun dan cantik. Selain itu, anggapan ini telah menjadi sebuah budaya karena sudah mengakar dan terbentuk selama ribuan tahun sehingga membentuk sebuah belief atau rasa percaya dalam diri para perempuan untuk tampil cantik.

4. Bibir Merah Sebagai Simbol Sensualitas dan Seksualitas



Scene atau gambar ini berasal dari Vlog Abel Cantika yang berjudul “ Glam Make Up” Tutorial Kondangan / Graduation (Chatty & Review)” Penggambaran Kedua gambar yang memfokuskan pada bentuk bibirnya yang sebelumnya lebih memperjelaskan bentuk bagian tubuh dengan pakaian terbuka dapat memberikan

sebuah tanda. Abel memperjelas bentuk bibir berlipstik merah dengan teknik pengambilan gambar *zoom camera* yang menandakan bibir berlipstik merah sebuah tanda. *Zoomcamera* adalah teknik pengambilan gambar untuk mendekatkan objek atau menjauhkan sebuah objek. Pada *scene* ini Abel melakukan teknik *zoom* untuk mendekatkan sebuah objek yaitu bibir. Teknik ini tentu bertujuan bahwa bibir yang telah dioleskan lipstik ini merupakan bagian yang penting bagi Abel. Dalam artian bahwa Abel memperlihatkan penampilannya dan menggunakan efek *zoom in* untuk memperjelas bagian bibir yang tebal dan merah karena bagian dari wajah yang penting. Inilah makna denotasi yang ingin dibangun oleh Abel dan makna konotasinya adalah bahwa *zoomcamera* bagian bibir dapat menunjukkan efek sensual dan seksual.

Bagi banyak budaya, bibir berkolerasi secara kuat dengan factor sensualitas bahkan seksualitas karena berkaitan dengan perilaku mencium, menghisap bahkan pada perilaku oral seksual sehingga bibir merupakan symbol yang lebih universal mewakili sisi kecantikan, sensualitas dan seksualitas (Hardiansyah, 2016,p.185). Kondisi memerahnya bibir menjadi symbol rangsangan seksual yang sangat khas dan kuat sehingga untuk lebih mengeksploitasi warna merah tersebut, diciptakanlah lipstik berwarna merah namun tidak ditemukan secara spesifik dalam sejarah pertamakali bibir merupakan daya tarik seksual utama karena bagi banyak budaya sudah menganggap bibir sebagai symbol sensualitas dan seksualitas (Hardiansyah, 2016,p.186). Menurut sebuah penelitian dari Manchester University mengungkapkan bahwa bibir wanita adalah bagian paling menarik dari tubuh perempuan apalagi jika perempuan memakai lipstik merah. Menurut Dr Geoff Beattie, yang memimpin penelitian ini mengatakan bahwa studi ini telah membuktikan bahwa bibir mewakili salah satu aspek tubuh wanita yang paling sensual, dan memainkan peran penting dalam daya tarik seksual seseorang. Kombinasi antara bibir yang penuh dan lipstick warna merah akan menciptakan pemandangan yang sempurna untuk meraih perhatian pria (Dini, 2010). Bahkan sejak zaman Mesir kuno, lipstik merah telah dikenakan kaum perempuan untuk meningkatkan daya tarik mereka. Pada konteks ini, kecantikan bibir sebagai simbol seksualitas dan sensualitas

merupakan sebuah konstruksi budaya, social dan media secara bertahap telah mantap dimasyarakat. Hal ini telah dibuktikan oleh realitas yang telah berlaku dimasyarakat saat ini. Dalam konteks ini pula, lipstick berperan sebagai penguat atau memperkokoh dari simbol seksualitas dan sensualitas karena lipstick berkaitan secara langsung dengan bibir dan segala aktivitasnya. Dalam kata lain, lipstick diciptakan pada masa lampau adalah untuk memperkuat penegasan konstruksi social budaya dan diperkuat dengan penciptaan konstruksi media sampai saat ini.

5. Bibir Cantik Berwarna Prestisius



Gambar 10

Gambar 11

Scene atau gambar ini berasal dari vlog Linda kayhz yang berjudul “ Review Purbasari Hi-Matte lipcream + Giveway” pada scene ini terlihat packing *Box* berwarna hitam dop dan wadah lipstick berwarna kombinasi warna hitam dan *gold* memberikan efek yang sangat mewah dan sempurna adalah sebuah tanda. Denotasi yang muncul dalam *scene* ini adalah bahwa penggunaan *packing box* dengan dibalut warna-warnag *lamour* seperti hitam dan *gold* semakin lipstick tampak lebih mahal. Pada *scene* ini, paduan warna *gold* dan hitam adalah menunjukkan warna mahal, elegan dan *glamour* sehingga menarik perempuan untuk membeli lipstick. inilah makna konotasi yang dibangun. Kesan dari warna yang mahal, elegan dan *glamour* adalah “kemewahan” dan perempuan menyukai kemewahan. Kemewahan inilah mitosnya. Dalam arti yang sama mitosnya yaitu lipstick sebagai symbol kemewahan. Linda sebagai *beauty vlogger* menguatkan kembali sisi kemewahan yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak industri dalam merancang produk lipsticknya.

Sebagai pencipta sebuah realitas, para kapitalis yaitu industry pencipta produk lipstick tentu telah menentukan siapa yang layak dan tidak layak masuk dan menjadi bagian dari realitas yang diciptakan. Pada realitas ini sasarannya yaitu perempuan-perempuan yang tergolong masuk pada kelas menengah keatas. Hal ini dikarenakan para

perempuan kelas menengah keatas memiliki akses untuk mendapatkan penghasilan lebih cepat sehingga dimungkinkan pula memiliki kesempatan lebih besar untuk dipengaruhi dan membeli produk-produk kecantikan secara terus-menerus.

Faktor penentuan kelas pada ranah kelayakan sebagai kelompok inferior bagi kapitalis adalah hal yang sangat diperhatikan. Hal ini dikarenakan juga terlihat dari penggunaan *beauty vlogger* yang memang adalah orang-orang yang berasal dari golongan menengah keatas. Tujuannya adalah untuk menarik kelas-kelas yang sama atau bahkan kelas yang ada dibawahnya mengikuti apa yang dilakukan oleh kelas yang berada diatasnya bahkan mereka diadu untuk saling melakukan persaingan produk kecantikan.

Artinya mereka (perempuan) yang berada pada tingkatan masyarakat kelas atas akan bersiang dengan perempuan yang berada pada kelas atas juga. Kemudian, bagi mereka (perempuan) dengan tingkat kelas menengah kebawahakan bersaing dengan kelas yang sama dan seterusnya. Sehingga perlawanan antar kelas dalam memakai produk tidak terlalu terlihat. Dalam kata lain persaingan dalam merebut prestos lipstick ini terjadi pada jenjang kelas yang horizontal. Mereka (perempuan) memiliki musuh atau pesaing sesuai dengan kelas mereka sendiri. Namun, persamaannya hanya terjadi pada pernyataan bahwa memiliki lebih banyak lipstick mahal dan *brand* sesuai kelasnya dianggap lebih prestis.

Kondisi yang sedemikian rupa, telah membawa perempuan untuk menjadi individu yang konsumeristik. Hal ini tentu merupakan imbas dari terpaan media. Berbagai media seperti media sosial melalui pembantu para kapitalisnya telah muncul sebagai fenomena perubahan sosial. Perilaku masyarakat menjadi bagian dari masyarakat kapitalis yang konsumtif serta menjadi bagian dari system produksi itu sendiri. Mereka membuat konstruksi-konstruksi khususnya kecantikan untuk memberikan kesadaran palsu pada perempuan-perempuan.

Simpulan dan Saran

Beauty vlog yang dibuat oleh *beauty vlogger* memiliki makna dan pesan terkait kecantikan utamanya kecantikan bibir perempuan. Kecantikan bibir perempuan ini dikonstruksikan melalui tayangan vlog-nya yang memuat unsure

lipstick di dalamnya. Artinya, setiap vlog yang bermuatan produk lipstick baik itu vlog tutorial *bermake-up* atau pun *review* produ klip stik itu sendiri telah menjadi sebuah jalan konstruksi kecantikan bibir perempuan.

Kecantikan bibir perempuan dikonstruksikan melalui lipstick yakni bibir yang selalu memakai lipstick, bibir berlipstik sesuai dengan warna *makeup*, bibir berlipstik tanpa garis halus, bibir berlipstik setiap saat, bibir berlipstik sebagai symbol kecantikan, sensualitas, seksualitas dan kemewahan, bibir berlipstik tebal, bibir berlipstik cerah serta bibir berlipstik sesuai dengan warna kulit. Sementara bibir berlipstik pucat dan bibir tanpa lipstick adalah jelek. Dengan demikian vlog ternyata tidak melemahkan kekuasaan capital namun justru semakin memperkuat hegemoni bibir merah yang kapitalistik.

Selain itu, konstruksi kecantikan bibir melalui produk lipstick merupakan simbolisasi kapitalisme dimana kehidupan perempuan modern sekarang ini dipengaruhi oleh kapitalisme melalui pembentukan wacana ideologi. Ideologi-ideologi dibentuk melalui kastil-kastil yang menguatkan akar dan rantingnya sehingga membentuk realitas yang dibenarkan perempuan. Kapitalis membentuk perempuan-perempuan yang begitu patuh terhadap apa yang dikonstruksikannya dan kapitalisme telah membuat perempuan menjadi individu hedonis dan konsumeristik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani,R. (2016, April 26). Retrieved Juni3, 2019, from Wolipop: [https:// wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/ d-3196591/ ini-buktinya- wanita-lebih-percaya- diri-saat-pakai-lipstik](https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-3196591/ini-buktinya-wanita-lebih-percaya-diri-saat-pakai-lipstik)
- Arvianto,F. (2016, September). Tinjauan Teori Hegemoni Gramsci pada Cerpen Wiro
- Sledri Karya GM. Sudarta. *Jurnal ADHUM*,6(3), 155-159. Retrieved Januari 10, 2019, from [http:// eprints. ummi.ac.id](http://eprints.ummi.ac.id)
- Dini. (2010,November 25). *Pria Lebih Tertarik pada Bibir dari pada Rambut Wanita*.
- Retrieved Juni10, 2019, from Kompas. com: [https:// lifestyle. kompas. com/ read/ 2010/11/25/13245919/pria.lebih.tertarik.pada.bibir.Dari.pada.rambut.wanita](https://lifestyle.kompas.com/read/2010/11/25/13245919/pria.lebih.tertarik.pada.bibir.Dari.pada.rambut.wanita).
- Farida,N. (2013). Hegemoni Patriarki di Media Massa.*UG Jurnal*,7(8), 28-33. Retrieved Januari 10, 2019, from [https:// ejournal. gunadarma.ac.id/ index.php/ ugjournal/ article/ download/ 1319 /1168&ved](https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/1319/1168&ved)
- Gozali, Y. C. (2018). *Konten Review Product Beauty Vlogger dan Minat Beli Mahasiswa (Studi Korelasional Pengaruh Konten Review Product Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Mahasiswa FISIPUSU)*. Retrieved Oktober 16, 2018, from [http:// repositori.usu.ac.id/ bitstream/ handel/ 123456789/ 6211/ 140904161. pdf](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handel/123456789/6211/140904161.pdf)
- Hardiansyah, H. (2016). *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Highlight, M. (2018, September 4). *7Beauty Vlogger Indonesia Terkenal di YouTube, Kenalan Yuk!* Retrieved Desember 18, 2018, from Highlight: [http:// highlight.id/ beauty-vlogger-indonesia-terkenal-youtuber-tips- kecantikan/](http://highlight.id/beauty-vlogger-indonesia-terkenal-youtuber-tips-kecantikan/)
- Najihan,N. R.(2017). *Efektivitas Beauty vlogger dalam Meningkatkan Minat Beli Produk Kecantikan (Survei Pengunjung dalam Video Youtube Wardah One Brand Make up Tutorial Akun Abel Cantika)*. Retrieved Oktober 15,2018, from <http://digilib.uin-suka.ac.id/28537>
- Prasetya, A. (2018, January10). *10Beauty Vlogger Indonesia Paling Inspiratif*. Retrieved Oktober 25, 2018, from [https:// slalu.com/blogs/artikel/beauty-vlogger-indonesia-paling- inspiratif](https://slalu.com/blogs/artikel/beauty-vlogger-indonesia-paling-inspiratif)

- Sarashadi, G.,&Dewi, A.S.(2018). Pengaruh Penggunaan Vlogger Endoser pada Iklan dalam Membentuk Niat Beli Konsumen. *Jurnal Bisnis & Manajemen*,18 (1), 41-52. Retrieved November 19, 2018, from <https://jurnal.uns.ac.id/jbm/article/download/21914/16598&ved>
- Sobur, A. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryawan,N. (2009). *Bali Pasca colonial Jejak Kekerasan dan Sikap Kajian Budaya*. Kepel Press: Yogyakarta.
- Tamburaka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Worotitjan,H. G. (2014). Konstruksi Kecantikan Dalam Iklan Kosmetik Wardah. *Jurnal E-Komunikasi*,2(2),3.

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus Pendidikan Berbasis Agroforestri MTs PAKIS)

Anvel Mahfrisa

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan mendeskripsikan system pendidikan berbasis masyarakat dengan kearifan local yakni agroforestri yang diterapkan di MTsPAKIS Dusun Pesawahan, Desa Gunung lurah, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Sekolah ini bertujuan untuk menjadikan peserta didiknya sadar akan potensi lingkungan sekitarnya serta dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa pinggir hutan. Penelitian ini dilakukan di MTs PAKIS serta masyarakat sekitarnya dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis interaktif Miles dan Huberman dan menggunakan teknik triangulasi data dalam proses validasi datanya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa system pembelajaran di MTs PAKIS menerapkan model pembelajaran berbasis agroforestri sebagai kearifan lokal. Penerapan berbasis agroforestri bertujuan supaya peserta didik dapat mengetahui potensi lingkungan sekitarnya yang merupakan desa pinggir hutan sehingga proses pembelajaran diharapkan tidak mencerabut peserta didik dari kultur masyarakatnya. Proses pembelajaran di MTs PAKIS berprinsip kerelawanan sehingga belajar bisa dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pembelajaran di MTs PAKIS dibagi menjadi dua jadwal pembelajaran yaitu jadwal umum yang mempelajari mata pelajaran akademik serta jadwal khusus yang mempelajari keterampilan. Pembelajaran melibatkan orang tua peserta didik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Kata kunci: pendidikan berbasis masyarakat, proses pembelajaran, agroforestri

Pendahuluan

Prinsip desentralisasi menghasilkan otonomi yang mengarahkan masyarakat untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingannya sendiri, tidak terkecuali bidang pendidikan. Prinsip otonomi dalam pendidikan mengandaikan pendidikan dapat tumbuh, digerakkan, dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Hal itu tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam pasal 55 disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Adanya perubahan konsep pendidikan yang sebelumnya berorientasi pemerintah (*stateoriented*) kemudian berpindah menjadi konsep pendidikan yang berorientasi masyarakat (*community oriented*) (Suharto,2012).

Pada tahun 2016 ada sebanyak 4,5 juta anak di Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan (UNICEF, 2016). Kenyataan

tersebut memunculkan konsep pendidikan berbasis masyarakat yang dikelola masyarakat.

Maksud konsep tersebut adalah melengkapi, mengisi atau mungkin berupaya mengganti model pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (Fitri,2017). Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan pendidikan sehingga substansi kurikulum akan berbeda-beda sesuai dengan kultur masyarakatnya.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki fase pesatnya perkembangan globalisasi dan neoliberalisme pasar bebas dunia. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai lahan para pemilik modal untuk mengarahkan tujuan pendidikan untuk dapat menciptakan tenaga kerja terampil sehingga menuntut adanya standarisasi dalam sistem pendidikan. Adanya standarisasi bertujuan agar hasil belajar yang dicapai setiap

pembelajar dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan keterampilannya sehingga ia mampu bersaing dalam dunia kerja (Carter&M. H.O'Neill, 1995). Sehingga dalam hal ini bagaimanakah pendidikan berbasis masyarakat dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dan perkembangan pasar bebas dunia terkait kebutuhan tenaga kerja.

Salah satu sekolah di Banyumas yang berusaha menerapkan model pendidikan berbasis masyarakat adalah MTs“PAKIS” yang letaknya berada di lereng selatan Gunung Slamet. Sebagai usaha dalam penerapan model pendidikan berbasis masyarakat, sekolah ini menerapkan metode agroforestri dengan belajar berdasarkan lingkungan sekitarnya baik itu pertanian, kehutanan, peternakan atau perikanan. Pembelajaran dengan metode agroforestri dipilih sebagai keunggulan sebab sekolah ini berdiri berada di lingkungan hutan atau perdesaan sehingga kurikulum yang ada di MTs “PAKIS” ini diharapkan tidak lepas dari kondisi riil peserta didik yang notabene merupakan keluarga petani tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses perencanaan dan penerapan kurikulum kearifan lokalnya bisa mengikuti perkembangan globalisasi.

Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan yang Membebaskan Versus Pendidikan Feodal

Sistem pendidikan formal yang konvensional di Indonesia saat ini masih menganut sistem pendidikan “gaya bank”. Pendidikan gaya bank menganggap bahwa guru itu seperti nasabah dan peserta didik sebagai tabungannya (Freire, 2008). Dalam artian bahwa guru serba tahu dan murid serba tidak tahu. Pendidikan yang telah diskenariokan penguasa, contohnya melalui berbagai kebijakan standarisasi pendidikan nasional dari pemerintah, sedangkan masyarakat harus mengikuti standar pendidikan nasional tersebut, tidak peduli apakah pendidikan tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan kultur masyarakat yang menjalankannya.

Menurut Freire (2008) pendidikan harus bersifat humanistik, dalam membatasi tentang pendidikan humanistiknya, Freire memberikan sebuah definisi yang memuat sebagian besar pemikirannya, menurutnya pendidikan yang

humanis adalah; *Pertama*, pendidikan yang mempertegas dan memperjelas arah pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan, yaitu sebuah upaya pemberdayaan masyarakat tertindas menuju sebuah paradigme kritis dan transformatif dalam mewujudkan sebuah kebebasan sebagai hak asasi setiap manusia. *Kedua*, pendidikan yang selalu menjadi pendamping dan pengawal segala dinamika kehidupan yakni memfokuskan kajiannya pada sebuah keadaan dalam kebudayaan, pengetahuan, dan kondisi suatu kelompok masyarakat. *Ketiga*, pendidikan emansipatoris yaitu pendidikan bukan hanya sekadar proses pengumpulan data dan informasi yang disebutkannya sebagai penyimpanan (*banking*), melainkan menjadikan peserta didik sebagai makhluk yang “menjadi” subjek dan hidup secara aktif merasakan persoalan dan ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan.

Penelitian yang dilakukan Meilya (2016) pada Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga, dalam proses pendidikan yang membebaskan, proses pembelajarannya berdasar pada kesepakatan antara peserta didik dan pendamping. Menurut penelitian Sari(2017), proses pembelajaran yang humanistic harus mampu mengorientasikan pesertadidik untuk dapat memainkan perannya dalam kehidupan yang akan datang dengan kemampuan, pengetahuan, sikap dan berbagai keterampilan yang telah diberikan.

Peran guru pada system pendidikan kita saat ini lebih dominan dalam interaksi verbal di ruang kelas dan pengajarannya lebih dituntun oleh tradisi sehingga kebanyakan guru mengajar persis seperti guru mereka sendiri dahulu mengajar mereka (Freireetal.,1998). Peran para peserta didik dalam model pendidikan semacam ini sudah digariskan untuk pasif. Setiap peserta didik diharapkan masuk sekolah tepat waktu, memperhatikan guru kalau diceramahi, mengerjakan apa yang diperintahkan padanya, dan berusaha keras supaya naik kelas atau lulus. Pendidikan gaya bank tidak serta merta hilang dalam prosesnya. Pendidikan melalui sekolah model feodal akhirnya membuat alienasi baru. Sekolah menjadi alienasi sebagai persiapan untuk terjun dalam kehidupan nyata dan dengan demikian melepaskan pendidikan dari realitas dan kerja kreatif (Illich,2000).

2. Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Tantangan Globalisasi

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi masa depan (Sihombing,2001). Dengan kata lain pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Dalam perspektif sosiologis, konsep pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai jawaban atas ketidak mampuan Negara dalam melayani penduduk untuk menyelesaikan berbagai aktivitas yang meliputi pembangunan ekonomi, rehabilitasi perumahan, pelayanan kesehatan, latihan kerja, pemberantasan buta huruf, dan program pendidikan berkelanjutan (Cunningham dalam Suharto,2012). Penerapan pendidikan berbasis masyarakat tidak mudah karena tidak hanya sekedar pelibatan masyarakat dalam proses pembelajaran tetapi masyarakat juga harus turut andil dalam merumuskan landasan filosofis pendidikan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam masyarakat.

Dominasi kapitalisme saat ini tidak dapat dihindari telah berhasil memengaruhi dan menentukan segala pola eksistensi manusia sekaligus aspek-aspek kehidupannya tidak terkecuali aspek pendidikan. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi oleh kemajuan pendidikannya. Pengembangan pendidikan menjadi hal yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi nasional sehingga pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia (*human investment*) yang bila dikelola dengan benar akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Lubis,2016).

Dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, harus dipersiapkan melalui Standar Nasional Pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 meliputi standar isi kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan: evaluasi, akreditasi, sertifikasi, penjaminan mutu. Penerapan standarisasi pendidikan nasional mempengaruhi pembentukan *output* pendidikan yang harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui proses standarisasi pendidikan, peserta didik diharapkan mampu bersaing dalam dunia kerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilakukan di MTs PAKIS dan masyarakat disekitar lingkungan sekolah. Sasaran penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive* yakni pada pengajar dan peserta didik di MTs PAKIS. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih informan. Pertimbangan yang dimaksud disini adalah bahwa informan dianggap paling tahu sehingga diharapkan kemungkinan pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan tujuan dan kedalaman data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif (Miles &Huberman,1992). Sedangkan validasi data dilakukan dengan model triangulasi yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar sekolah dan Pemerintah Desa.

Hasil dan Pembahasan

MTs PAKIS merupakan sekolah yang terletak di Dusun Pesawahan Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dusun Pesawahan adalah dusun terakhir yang berada di ujung Desa Gununglurah yang berbatasan langsung dengan hutan di lereng Selatan Gunung Selamat dengan ketinggian 700 mdpl. Letaknya cukup terpencil dengan medan yang terjal. Sekolah ini berdiri pada tahun 2013, pada awal berdirinya sekolah ini hanya memiliki 3 ruang belajar yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4x6 meter yang letaknya berada di pinggir Telaga Kumpe. Gedung utama untuk ruang belajar peserta didik MTs PAKIS baru didirikan pada tanggal 18 Januari 2014 setelah mendapat bantuan dari Kementerian Agama dengan ukuran 17x7 meter. Selain itu pada awal berdirinya MTs

PAKIS ini memiliki satu kandang kambing komunal, satu gubuk produksi, dan satu gubuk literasi sebagai penunjang pembelajaran untuk peserta didik.

Pendirian sekolah ini pada awalnya memiliki tujuan untuk mengurangi angka buta huruf masyarakat desa pinggir hutan. Sekolah MTs PAKIS ini memiliki visi bahwa setiap anak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses pendidikan sampai jenjang tertinggi dan dapat menjadi *roleplay* bagi sekolah lain di daerah terpencil di Indonesia untuk dapat memadukan pembelajaran di sekolah dengan kearifan lokal sekitarnya. Sedangkan misi sekolah ini adalah bahwa anak-anak desa pinggir hutan mampu mengenali lingkungan sekitarnya dengan sekolah yang mengedepankan kearifan local sehingga harapannya kelak peserta didik tidak tercerabut dari kultur masyarakatnya dan dapat memajukan desanya sendiri. Selain itu misi sekolah ini adalah bahwa siapapun dapat mengakses pendidikan tanpa harus terbebani oleh biaya untuk sekolah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada masyarakat.

Sejak awal berdiri pada tahun 2013, MTs PAKIS sudah meluluskan sebanyak dua kali, angkatan pertama sebanyak 4 peserta didik dari 12 peserta didik serta angkatan kedua sebanyak 3 peserta didik dari 10 peserta didik. PerJanuari 2019, jumlah peserta didik yang masih bertahan untuk tetap bersekolah di MTs PAKIS ada 29 anak dengan rincian: tiga belas peserta didik kelas VII, Sembilan peserta didik kelas VIII, dan tujuh peserta didik kelas IX. Keseluruhan peserta didik berasal dari dua dusun yakni Dusun Pesawahon Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas serta Dusun Karanggondang Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

MTs PAKIS merupakan sekolah filial atau kelas jarak jauh dari MTs Ma'arif NU 02 Cilongok. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan buku pelajaran sebagai sarana pembelajaran peserta didik diperoleh dari sekolah induk. Secara institusi dan badan hukum sekolah ini adalah sekolah formal, dalam proses pembelajarannya mengharuskan MTs PAKIS tetap menggunakan kurikulum sesuai dengan standar nasional untuk memenuhi kompetensi lulusannya. MTsPAKIS hanya memiliki satu gedung utama yang digunakan untuk tiga kelas, yakni kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Hal ini

menjadikan proses pembelajaran di kelas hanya dibagi berdasarkan pengelompokkan kelas, tanpa adanya sekat yang membatasi antar-kelasnya. Tanpa adanya pembatas antar-kelas tersebut menjadikan proses pembelajaran tidak efektif karena tiga kelas digabung dalam satu ruangan sehingga membuat peserta didik tidak focus dalam proses pembelajaran.

MTs PAKIS merupakan sekolah yang berusaha menerapkan pembelajaran berbasis agroforestri. Penerapan agroforestri sebagai media belajar peserta didik dan juga masyarakat karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan riil lingkungan sekitarnya. Memadukan pembelajaran dengan agroforestri bertujuan untuk mengajarkan peserta didik akan realitas di sekitarnya. Meski begitu memadukan pengajaran mata pelajaran umum dengan agroforestri hanya pada sebatas memadukan pelajaran dengan pertanian dasar. Contohnya pada pelajaran IPA pada bab biologi tanaman para peserta didik melakukan pengamatan pada tanaman sayuran yang sudah ditanam sebelumnya dan pada pelajaran bahasa Indonesia para peserta didik diajak untuk dapat menceritakan atau mempuisikan lingkungan sekitarnya. Proses menceritakan ini salah satu cara untuk para peserta didik menginternalisasi nilai-nilai di lingkungan sekitarnya sehingga menjadi dasar pengamatan untuk dapat memahami lingkungannya sendiri.

MTs PAKIS mempunyai dua jadwal yakni jadwal mata pelajaran akademik dan jadwal khusus atau jadwal keterampilan. Pengajar MTs PAKIS mengajak dialog dengan peserta didik dalam menentukan jadwal pembelajaran. Dialog penentuan jadwal ini menjadi penting supaya pengajar dan peserta didik bersinergi sehingga pembelajaran akan membuat nyaman keduanya. Metode pembelajaran di MTs PAKIS mengedepankan proses dialog, dalam proses ini pengajar hanya menerangkan kemudian mengajak peserta didik untuk bertanya. Dalam Tanya jawab ini dengan proses dialog sesama peserta didik ataupun kepada pengajar yang tengah berlangsung akhirnya menjadikan adanya pertukaran pendapat dan pengetahuan. Ketika ada peserta didik yang diam atau tidak berani berpendapat karena takut salah, pengajar mengingatkan bahwa dalam proses belajar jangan takut salah, karena proses belajar itu berawal dari ketidak tahuan. Proses pembelajaran ini

menjadikan pengajar hanya sebagai *partner* yang mendampingi proses belajar peserta didik. Mewujudkan proses dialogis yang menghilangkan sekat antara pengajar dan peserta didik adalah pendidikan yang membebaskan (Neill,2007).

Penerapan pembelajaran dialogis MTs PAKIS ini menjadi salah satu landasan pada para peserta didik untuk nantinya dapat berpikir kritis. Pada tingkat menengah pertama ini peserta didik MTs PAKIS belum mampu untuk menganalisis kondisi yang dialaminya secara lebih rinci hubungan sebab-akibat peserta didik alami. Sehingga dalam proses pembelajarannya para peserta didik terkadang masih diarahkan oleh pengajar. Pada tingkat lanjut, dengan pembelajaran dialogis peserta didik diharapkan dapat menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam diskusi ataupun berpendapat, mampu menerima dan menolak. Proses dialogis mendorong peserta didik untuk mampu menyingkap fenomena-fenomena tersembunyi yang melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan *common sense* (Nuryanto, 2008). Peserta didik MTs PAKIS didorong untuk tidak pasif ketika proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, menghafal dan mengulangi ungkapan yang disampaikan pengajarnya.

Hal lain dalam kasus pemberian kelonggaran dalam pembelajaran kepada peserta didik ini adalah karena keterbatasan pengajar. Sejak awal berdiri pada tahun 2013 untuk mengatasi kekurangan pengajar, MTs PAKIS sudah menerapkan prinsip kerelawanan. Prinsip kerelawanan ini pula yang akhirnya menjadikan proses belajar itu bisa dimana saja dan bisa dengan siapa saja. Prinsip kerelawanan ini secara sukarela, bagi siapapun yang ingin mengajar peserta didik sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Relawan tidak dibatasi hanya sekedar mengajar mata pelajaran umum, melainkan juga keterampilan atau bahkan berbagi pengalaman untuk memberikan motivasi dan semangat belajar pada para peserta didik.

Hal yang perlu disoroti dalam prinsip kerelawanan ini adalah terkait standarisasi pengajar atau guru yang menjadi relawan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB IV Pasal 8 disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Bila prinsip kerelawanan ini diterapkan tanpa melihat latar belakang dari pengajar maka hal tersebut akan berpengaruh kepada hasil pembelajaran peserta didik. Pengajar harus memiliki kualitas yang baik untuk menjadikan pendidikan yang lebih bermutu. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengelolaan dan manajemen yang baik dalam hal menentukan pengajar yang mengajar peserta didik, sehingga pengajar dengan prinsip kerelawanan yang diterapkan di MTs PAKIS terkesan incidental karena siapa yang datang tanpa dilakukan filter terkait kualitasnya langsung diperbolehkan mengajar para peserta didik.

Pelibatan orang tua lebih cenderung hanya pada pelajaran keterampilan. Hal tersebut menurut para orang tua karena pelajaran yang sifatnya lebih keakademik dan terkait dengan nilai rapor peserta didik merupakan tanggung jawab pengajar. Keterlibatan orang tua berdampak positif dengan peserta didik dalam proses pembelajaran karena dapat mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi bakat, kemampuan, dan sikap dalam menanggapi tantangan global (Minke & Anderson, 2005). Tetapi hal yang menjadi sorotan adalah keterampilan yang diperoleh peserta didik masih pada batas keterampilan dasar karena masyarakat Dusun Pesawahan masih tradisional sehingga belum menggunakan teknologi pertanian yang kompleks.

Proses pembelajaran di MTs PAKIS ini juga terdapat proses evaluasi. Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui para peserta didik sudah benar-benar memahami materi atau hasil belajar sebelumnya. Proses evaluasi yang ada di MTs PAKIS diadakan setiap saat, hasilnya membahas capaian belajar dan kemudian didiskusikan bersama-sama sehingga forum evaluasi ini bukan arena penghakiman atau sekedar mengetes kemampuan peserta didik. Proses evaluasi di MTs PAKIS ini dilakukan dengan cara menanyakan satu persatu peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan setelah itu didiskusikan bersama-sama. Tetapi bila dilihat dalam penentuan hasil belajar peserta didik ini peran pengajar sangat dominan dalam menentukan hasil pembelajaran. Sebagai penanggung jawab MTs PAKIS,

pengajar bisa dengan subjektif dirinya akhirnya memberikan nilai atau hasil pembelajaran kepada parapeserta didik melebihi kemampuannya supaya tidak terlihat rendah oleh sekolah induk.

Dengan adanya MTs PAKIS ini mendorong para orang tua untuk tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya. Tidak dipungut biaya menjadi salah satu factor yang penting untuk mendorong orang tua mau menyekolahkan anaknya meskipun kondisi ekonomi keluarga termasuk kelas bawah. Kultur masyarakat desa yang masih belum mengedepankan pentingnya pendidikan mulai memudar. Keberadaan MTs PAKIS membuktikan sebenarnya masih terdapat diskriminasi dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini. Ketimpangan akan terus ada bila tidak ada orang-orang yang pro-aktif yang secara sukarela ingin mengubah ketimpangan akan akses pendidikan di Indonesia untuk masyarakat yang terpinggirkan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam suatu system pendidikan. Masyarakat merupakan sumber belajar sekaligus menjadi pengguna hasil pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 BAB XV disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pelibatan masyarakat dalam bidang akademik di MTs PAKIS yakni dengan peran tokoh agama yang mengajar tentang ilmu agama dan mengaji. Selebihnya peran masyarakat dalam proses pembelajaran MTs PAKIS pelibatananya hanya sekedar pelibatan teknis semisal dalam pembuatan fasilitas ataupun media pembelajaran bagi para peserta didik. Masyarakat Dusun Pesawahan ataupun orang tua peserta didik memang minim dilibatkan perihal perencanaan pembelajaran yang bersifat akademik hal tersebut dikarenakan masyarakat sendiri masih merasa inferior tetapi mereka tetap mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh MTs PAKIS.

Keterlibatan pihak pemerintah Desa Gununglurah dengan MTs PAKIS dalam hal ini kurang bersinergi. Pemerintah Desa Gununglurah merasa tidak banyak dilibatkan dalam berbagai proses kegiatan yang ada di MTs PAKIS padahal

keberadaan sekolah masih di dalam wilayah administrative Desa Gununglurah. Tidak sinerginya antara pemerintah desa dengan MTs PAKIS ini menjadikan pemerintah desa melihat sama sekali tidak mengetahui proses penyelenggaraan dalam pembelajaran di MTs PAKIS. Pemerintah desa tidak dilibatkan langsung melainkan hanya sekedar pemberitahuan semisal MTs PAKIS akan ada kegiatan tertentu atau semisal ada tamu. Pemerintah desa menyesalkan bahwa seharusnya tidak hanya sekedar menjadi tamu undangan tetapi harus mengetahui secara persis bagaimana pembelajaran yang ada di MTs PAKIS.

Ketidak selarasan antara pemerintah desa Gununglurah dengan penyelenggara MTs PAKIS ini sudah sejak awal mula sekolah tersebut didirikan. Pada awalnya, sekolah ini dianggap hanya sebagai bentuk proyek dari lembaga tertentu. Anggapan bahwa MTs PAKIS hanya sebagai bentuk dari proyek LSM tertentu ini karena jejaring yang dimiliki pengajar dan relawan MTs PAKIS yang sering menghadirkan tokoh-tokoh tertentu untuk datang kesekolah yang kemudian memberikan bantuan atau kegiatan tertentu untuk sekolah MTs PAKIS maupun untuk masyarakat Dusun Pesawahan. Kurang komunikatif antar-kedua lembaga ini membuat pemerintah desa memiliki asumsi yang bermacam-macam salah satunya penyelenggara pembelajaran di MTs PAKIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut. Hal tersebut menjadikan adanya kerentanan antara hubungan masyarakat dengan MTs PAKIS. Pemerintah desa dalam hal ini yang mempunyai legitimasi secara administrative dapat menjadi penghambat dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan yang dilakukan di MTs PAKIS.

Antara kedua pihak tersebut masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terkait kegiatan yang dilakukan. Dipihak pengajar MTs PAKIS karena merasa memiliki jejaring yang luas terkait pengajar maupun pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan di MTs PAKIS, sedangkan dipihak Pemerintah Desa Gununglurah merasa seharusnya karena MTs PAKIS di wilayah administrative Desa Gununglurah dapat melibatkan perangkat desa supaya perangkat desa dapat memantau dan saling bisa membantu satu sama lain. Tidak adanya keselarasan ini menjadikan adanya miskomunikasi antara pihak pemerintah desa dengan sekolah MTs PAKIS. Hal

tersebut dapat menjadi penghambat proses pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat Dusun Pesawahan.

Simpulan dan Saran

Proses pembelajaran di MTs PAKIS berbasis kearifan lokal yakni agroforestri. Agroforestri dipilih karena lingkungan sekitar sekolah yang merupakan desa pinggir hutan. Konsep penyelenggaraan pendidikan MTs PAKIS ini adalah kerelawanan sehingga tidak ada pengajar tetap sehingga melalui kerelawanan pengajaran di MTs PAKIS memiliki prinsip belajar mandiri dalam artian belajar bisa dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja hanya saja tidak ada kualifikasi yang jelas terkait relawan yang mengajar. MTs PAKIS tidak memungut biaya peserta didiknya, untuk bahan pembelajaran diperoleh dari sekolah induk sedangkan untuk biaya operasional sekolah dari sumbangan yang berasal dari jejaring para relawan yang bersedia mendukung pembelajaran MTs PAKIS.

Pembelajaran MTs PAKIS mengedepankan dialog antara pengajar, peserta didik dan orang tua, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi pembelajaran meskipun penerapannya belum maksimal. Proses kegiatan pembelajaran melibatkan orang tua peserta didik, tokoh agama, dan masyarakat sekitar sekolah MTs PAKIS. Pelibatan masyarakat sekitar ini sebagai wujud pendidikan berbasis masyarakat meskipun masyarakat maupun orang tua tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembelajaran karena pelibatannya hanya dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

MTs PAKIS memiliki kelemahan yakni belum mampu meyakinkan para orang tua peserta didik dengan model pembelajaran kerelawanannya karena masih banyak orang tua yang menginginkan adanya pengajar tetap, selain itu juga belum terjalinnnya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Gununglurah terutama dengan MTs PAKIS sehingga masih adanya miskomunikasi yang menjadikan pemberdayaan masyarakat tidak maksimal dan menimbulkan sentiment negative terhadap kegiatan yang dilakukan di MTs PAKIS. Tetapi dengan adanya MTs PAKIS ini bisa menjadi salah satu contoh penerapan pendidikan untuk masyarakat yang termarjinalkan hanya saja memang butuh keterlibatan dari banyak pihak yang dapat membantu penyelenggaraannya

supaya masyarakat tetap mendapatkan akses pendidikan sampai jenjang tertinggi

DaftarPustaka

- Carter, D. G., & M. H. O'Neill. (1995). *International Perspectiveon Education Reformand Policy Implementation*. Brighton: Falmer.
- Fitri, D. R. (2017). *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utama Surabaya)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Illich, I. (2000). *Bebaskan Masyarakat Dari Belunggu Sekolah*. (A. S. Keraf, Trans.) Jakarta: YayasanObor.
- Lubis, A. (2016, Maret30). Pelaksanaan Standar Nasional Dalam Dunia Pendidikan. *Digital Repository*, 1-2.
- Miles,M.B.,& Huberman,A.M.(1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru)*. (T. R.Rohidi, Trans.) Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Minke,K.M.,&Anderson,K.J.(2005).Family-school Collaborationand Positive Support. *Journal of Positive Behavior Interventions* , 181.
- Neill,A.S.(2007).*Summerhill School(A New View of Childhood)*. (A.Prihantoro,Trans.) Jakarta: PT SerambiIlmu Semesta.

- Nuryanto, M.A.(2008). *Mazhab Pendidikan Kritis (Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, Kekuasaan)*.Yogyakarta: Resist Book.
- Sari,N.(2017).*Belajar adalah Melakukan (Studi Kasus Sekolah Kader Desa "Brilliant Institut" Sebagai Sistem Pendidikan Alternatif di Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
- Sihombing, U.(2001). *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan)*. Yogyakarta: LkiS.
- UNICEF. (2016). *Education and Youth*. Diakses pada 20 Juli 2018, dari Unicef Indonesia:<https://www.unicef.org/indonesia/education.html>

KONSEPSI CANTIK DAN MENJADI CANTIK MAHASISWA PAPUA DI UNSOED : ANTARA *INSTAGRAM* DAN *YOUTUBE*

ERTISELFINAM YOPU F1A015109
Program Studi S1
Sosiologi FISIP Unsoed selvinaerthymayop
u@gmail.com

ABSTRAK

Instagram dan YouTube adalah media untuk berbagi gambar dan video yang dapat menarik perhatian setiap orang terutama perempuan yang ingin tampil cantik. Namun, pandangan perempuan berbeda-beda tentang kecantikan oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Konsep Cantik dan Menjadi Cantik Mahasiswa Papua di UNSOED: Antara Instagram dan YouTube”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan mahasiswa Papua tentang perempuan cantik dalam Instagram dan YouTube, konsep cantik, upayanya menjadi cantik, dan rujukan kecantikan pada Instagram dan YouTube. Lokasi penelitian ini di daerah sekitar kampus UNSOED. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan cantik di Instagram dan YouTube sangat member motivasi, edukasi (proses belajar), pengalaman, adanya rasa ingin tahu dan menemukan persamaan karakter kulit dan rambut sehingga banyak selebgram cantik yang memberikan tutorial. Konsep cantik dari penelitian ini adalah perempuan dapat menerima diri, percaya akan setiap karakter apa adanya diri dan mulai mengenal produk kosmetik yang digunakan oleh selebgram. Dengan mengenal selebgram rujukan, adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan mengaplikasikan setiap proses langkah perawatan wajah, rambut dan fashion, selebgram yang dirujuk adalah mereka yang berkulit hitam, sawo matang, rambut keriting dan rambut berombak yang berasal dari negara Afrika, Amerika, Filipina dan Indonesia.

Kata kunci: Konsep cantik, upaya cantik, *Instagram* dan *YouTube*

Pendahuluan

Menjadi seorang perempuan cantik adalah keinginan setiap orang. Kata cantik memiliki makna yang berarti dan tidak asing disetiap kalangan masyarakat pada umumnya. Pandangan tentang seorang cantik selalu berbeda-beda berdasarkan tempat dimana seseorang itu berada dan berdasarkan setiap budaya masing-masing terutama pandangan tentang cantik yang adadi setiap negara.

Definisi cantik selalu berbeda-beda disetiap Negara terutama dalam hal konsep kecantikan bagi setiap perempuan dinegaranya masing-masing, tentu sangat berkaitan dengan karakter yang memiliki ciri khusus dalam melihat kecantikan. Begitupun kecantikan yang adadi Asia Tenggara terutama Negara Indonesia, standar kecantikan di Indonesia dimulai atau dinilai pada zaman Jawa kuno yang dimiliki oleh tokoh Shinta istri Rama dalam kisah satra Ramayana, kecantikan yang dimiliki adalah berperilaku baik, bercahaya, ayu, putih dan sangat menawan saat berdandan. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya sehingga

criteria kecantikanpun pasti akan berbeda misalnya, perempuan Jawa memiliki warna kulit putih, bersih, rambut lurus dan panjang halus. Sementara, perempuan Indonesia timur khususnya Papua, Nusa Tenggara Timur dan Ambon tentu, ada sebagian yang memiliki kulit putih dan rambut lurus namun ada perempuan yang memiliki warna kulit berbeda yakni kulit hitam, coklat, sawo matang, rambut keriting dan rambut berombak tentu saja, criteria cantik bagi Jawa berbeda dengan kriteria cantik bagi Indonesia timur.

Standar kecantikan di Indonesia pun semakin merujuk pada kriteria berkulit putih, halus, rambut lurus, dan panjang hal ini menjadi konsep kecantikan masyarakat sehingga masih banyak yang memandang bahwa cantik dan ingin menjadi cantik adalah mereka yang berkulit putih dan rambut lurus hitam panjang sehingga tidaklah heran, jika banyak perempuan Indonesia yang berlomba-lomba mempercantik diri dengan menggunakan berbagai produk kecantikan agar wajah dan rambut dapat diterima oleh standar kecantikan tersebut seperti yang dilakukan oleh artis

Indonesia, model yang sering melakukan perawatan kulit. Seiring dengan perkembangan modern saat ini, banyak produk kecantikan beredar dipasaran atau dipromosikan oleh artis-artis Indonesia maupun luar negeri.

Perkembangan teknologi informasi sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga mengubah pandangan masyarakat yang masih memiliki budaya lokal menjadi salah satu konsep yang mengikuti tren. Melalui teknologi informasi berupa media social terutama *Instagram* dan *YouTube* dapat memberikan Interaksi baru secara langsung tanpa harus bertemu dengan bertatap wajah. Media sosial ini juga dapat menghubungkan satu orang dengan lainnya, melalui kedua media ini informasi yang diterima oleh masyarakat, generasi muda, mahasiswa perempuan sangatlah beragam salah satunya adalah informasi tentang kecantikan perempuan. Tips-tips menjadi cantik, apa yang digunakan untuk terlihat cantik.

Instagram dan *YouTube* memberikan keuntungan bagi banyak orang termasuk selebriti dan mahasiswa aktif pengguna media ini, hampir semua mahasiswa di Indonesia adalah pengguna aktif *Instagram* dan *YouTube*, dimana kedua aplikasi ini berfungsi untuk membagikan foto, video, mengedit foto, mengolah dan membagikan pengalaman kepada penggemar sehingga dapat tertarik dan menerima informasi baru. Hasil penelitian Fries Maulhayat dkk mengatakan bahwa “Kehadiran *Instagram* sebagai gaya berpakaian, *Instagram* dapat membawa tren dan member komunikasi kepada penggunanya” (Fatty Faiqah 1, 2016).

Melalui *Instagram* dan *YouTube* itulah, perihal cantik dan menjadi cantik tersebar dan terbentuk. Jika dahulu adalah majalah, tabloid dan radio yang memberikan bagaimana seorang menjadi cantik namun saat era modern ini, orang hanya mencari link dengan menulis beauty tutorial dengan sendirinya akan terlihat lebih banyak lengkap dengan produk kecantikannya. Kehadiran media sosial member pengaruh bagi pandangan perempuan tentang kecantikan, tubuh dan lain sebagainya.

Demikian juga yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa sebagai kaum muda dalam melihat kecantikan di media sosial, hadirnya media social membawa mahasiswa selalu menjadikan *Instagram* dan *YouTube* sebagai rujukan kecantikan dan menjadi cantik

termasuk diantara perempuan muda itu adalah para mahasiswa Indonesia timur terutama mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh studi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, berkait dengan karakter yang unik dan memiliki cirri khas yang berbeda dengan mahasiswa lainnya di UNSOED, karakter ini juga menuntut suatu pengaturan kecantikan. *Instagram* dan *YouTube* sering menampilkan artis perempuan yang bekarakter putih, rambut lurus, dimana sangat bertolak belakang dengan karakter mahasiswa Papua. Namun demikian, pada saat yang bersamaan juga kedua media ini memberikan peluang bagi mahasiswa Papua untuk mencari alternative lain tentang pengaturan cantik. Mahasiswa Papua memilih *Instagram* dan *YouTube* untuk melihat kecantikan dan menjadikan rujukan kecantikan sehingga peneliti sangat tertarik dan merasa menarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana cara mereka mengatur dan menemukan kriteria kecantikan yang ada di *Instagram* dan *YouTube* dengan kehidupan karakter yang memiliki keunikan dan cirri khas tersendiri bagi mahasiswa Indonesia timur sehingga penelitian ini dengan judul “Konsepsi Cantik dan Menjadi Cantik Mahasiswa Papua di Universitas Jenderal Soedirman: Antara *Instagram* dan *YouTube*”.

Tinjauan Pustaka

1. Pandangan Tentang Perempuan Cantik

Cantik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wajah yang elok, sangat indah, rupawan dan sangat bagus Namun demikian, cantik bukan bagaimana orang melihat secara fisik perempuan tetapi dilihat dari dalam hatinya juga. Sophia Loren (bintang film italia) mengatakan tentang kecantikan perempuan bahwa “Kecantikan merupakan apa yang kita rasakan dari dalam dan memancar dari mata kita, bukanlah sesuatu yang fisik” (Sulisty, 2011). Kecantikan menurut Shopia Loren dengan demikian adalah pancaran kepribadian yang muncul dari dalam diri seorang perempuan.

Dalam Islam memandang bahwa seorang perempuan harus memancarkan kesolehannya dan selalu menjaga kemuliaannya dengan menutup aurat dan selalu menjadikan Allah prioritas utama “Al-Ahzab:51, An-Nur :31” (Harahap, 2016). Begitupun dalam Kristen memandang bahwa kecantikan perempuan itu terpancar ketika perempuan bersikap lemah lembut, tentram,

menaruh kepercayaan pada Allah, kecantikan yang sesungguhnya adalah perempuan yang kudus dan tidak mengenakan perhiasan yang indah (1Petrus3:3-5). Kecantikan secara religious mengajarkan manusia selalu cantik secara *innerbeauty* dan selalu membawa perempuan-perempuan untuk menuju pada kecantikan yang terpancar dari kepribadian.

Cantik yang berasal dari segi religious mengacu pada kecantikan *innerbeauty*, namun pandangan kecantikan dalam dunia patriarki bahwa kecantikan itu ditentukan oleh laki-laki dengan melihat sisi pribadinya dan penampilannya. Hal ini disebabkan karena kecantikan perempuan dan suatu feminitas perempuan tidak akan terlepas dari kuasa laki-laki dengan memberikan pengakuan atas kecantikan yang dimiliki perempuan tersebut (Aquarini, 2006). Perempuan yang memiliki paras cantik, taat dan patuh tentu adalah harapan laki-laki namun, semua yang terjadi apakah perempuan yang cantik *innerbeauty* dan *outerbeauty*, ditentukan oleh laki-laki yang memandangnya.

Kecantikan perempuan dari zaman primitive hingga modern tentu sangat mengalami perubahan dengan berbagai proses. Naomi Wolf berpendapat bahwa perempuan memiliki kriteria kecantikan selalu berubah-ubah setiap zamannya sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan yang mengatakan cantik relative dikarenakan definisi tentang cantik itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Seperti dilihat dari zaman Widyawati (artis senior Indonesia) ketika masih muda tidak bisa dijelaskan bagaimana ia terlihat cantik dan seperti apa dia berdandan, hanya diketahui bahwa ia adalah artis cantik yang mempromosikan iklan sabun lux, berbeda dengan kecantikan pada masa Shafira Umm (presenter kondangan Indonesia) yang merupakan artis zaman modern yang selalu menampilkan kecantikannya dengan mengklik nama Shafira Umm maka link tutorial kecantikan akan terlihat dengan jelas dan lebih banyak. Hal ini dikarenakan perkembangan modern sehingga kecantikan Shafira Umm sangat dijadikan salah satu icon kecantikan bagi perempuan modern. Definisi kecantikan perempuan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang bersifat eksternal dan terkadang masyarakat akan memandang cantik itu hanya sebatas fisik terutama kulit putih, bersih dan berambut lurus (Syata, 2012). Kecantikan perempuan juga menjadi sesuatu yang bermakna ketika seseorang itu berada di tempat dimana ia

berada. Hal ini membuat masyarakat semakin terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang menampilkan kecantikan.

2. *Instagram* dan *YouTube* di Kalangan Mahasiswa

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal Informasi dan kebutuhan sehari-hari, hal ini disampaikan oleh Meutia Puspita Sari dalam penelitian terdahulu (Sari,2017). Aplikasi yang memberikan informasi dan kebutuhan setiap orang adalah aplikasi *Instagram* dan *YouTube*. *Instagram* dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, pada tahun 2010 *Instagram* dirilis dan di dalam *Instagram* seseorang dapat menemukan banyak hal. Menurut Budiargo *Instagram* merupakan media yang membantu dalam membagikan video, foto-foto secara online dan juga merupakan jejaring social untuk bisa saling berkomunikasi tanpa tatap wajah secara langsung (Budiargo, 2015). Pengertian tersebut membawa masyarakat lebih mengenal bahwa media *Instagram* adalah salah satu ruang interaksi yang dapat mempengaruhi penggunaannya maupun para konsumsi *Instagram* tersebut.

Meutia menegaskan lagi bahwa *Instagram* sebagai media komunikasi pembelajaran yang salah satunya menjadi suatu fenomena baru dalam kehidupan social dalam penggunaan media tersebut (Sari,2017). Diketahui bahwa kondisi saat ini dalam kehidupan mahasiswa sebagai kaum muda sangat dipengaruhi oleh media sosial, mereka menerima pesan atau pengetahuan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya termasuk dalam hal kecantikan perempuan. Berbagai pesan dan pembelajaran yang diterima mahasiswa oleh pemilik akun *Instagram* seperti selebriti akan berdampak positif bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki kebutuhan.

Selain *Instagram*, media *YouTube* juga merupakan salah satu media yang hadir di era modern. Media ini adalah salah satu bagian dari teori komunikasi massa dan merupakan media yang membagikan informasi melalui video yang panjang. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatty Faiqah 1, Muh. Nadjib 2 mengatakan bahwa aplikasi *YouTube* sebagai pemberi pesan yang disampaikan melalui video dengan durasi yang panjang dan pendek, aplikasi ini juga merupakan sebuah *situsweb* dari *google*

yang ditampilkan untuk ditonton oleh seluruh kalangan di dunia (Fatty Faiqah 1, 2016).

Penyampaian pesan yang diberikan melalui video ini diterima oleh mahasiswa yang merupakan generasi muda yang aktif dalam penggunaan *YouTube*. Mahasiswa sering mengikuti beberapa video yang memang dibutuhkan terutama bagi kaum perempuan yang mencari referensi kecantikan, mereka bisa menemukannya di *YouTube* dengan menulis nama *YouTube channel* yang sudah dikenal maka akan muncul secara otomatis dengan berbagai bentuk video sesuai kebutuhan mahasiswa. Video tersebut bisa di unduh dan disimpan sehingga mahasiswa tersebut bisa menonton berulang kali disaat ia sedang menontonnya. Dengan demikian segala kebutuhan mahasiswa yang berkaitan dengan kecantikan bisa dilihat secara langsung tanpa harus menggunakan internet

3. Tutorial dan Iklan Kecantikan pada *Instagram* dan *YouTube*

Kecantikan yang ditampilkan di media sosial yakni *Instagram* dan *YouTube* tentu menjadi salah satu media komunikasi menyampaikan pesan bagi para penggemar. Pesan tersebut disampaikan melalui video berupa tutorial maupun iklan. Hal ini adalah upaya komunikasi atau interaksi tidak langsung seseorang dengan sekelompok orang untuk mempengaruhi pengguna aktif media *Instagram* dan *YouTube*. Orang yang menerima pesan tersebut tentu melihat produk-produk kecantikan yang berasal dari perusahaan kosmetik. Hal ini disebut sebagai meng-*endorse* artis atau selebritis yang membuat kreatif berupa video yang telah diunggah dan hasil unggahan tersebut adalah berupa sebuah tutorial *make-up* dan iklan-iklan pada televisi. Inilah yang disebutkan sebagai *endorsement*, para selebriti memperoleh *endorse* dari perusahaan kosmetik untuk dipromosikan kepada masyarakat luas dikalangan dunia.

Sementara, M. Suyanto mengatakan bahwa istilah “advertising (periklanan) yang merupakan sesuatu yang mengarahkan kepada semua orang, iklan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu materi dan aktivitas yang ditunjukkan untuk mengubah dan mempengaruhi opini, sikap, perilaku setiap orang”(Suyanto.M,2005). Iklan layaknya penyebar luasan doktrin, pandangan, kepercayaan untuk menarik perhatian kelompok atau individu tertentu. Tutorial pun demikian,

memberi pengaruh bagi setiap masyarakat dalam hal menggunakan *make-up*, produk apa yang digunakan, harga dan merek apa yang bagus. Semuanya secara lengkap di tutorialkan dengan penjelasan yang lengkap. Menurut Shirley Biagi periklanan berevolusi menjadi sebetulnya suatu strategi persuasive untuk mempengaruhi cara pandang pembelian atau konsumsi barang (Biagi, 2010). Disinilah iklan dan tutorial menarik masyarakat untuk melihatnya, bukan hanya untuk dilihat namun menjadi calon-calon pembeli produk dan pengguna kosmetik yang disampaikan dengan lengkap di *Instagram* dan *YouTube*. Tutorial kecantikan, dengan demikian membawa peminat perempuan untuk memproduksi standar kecantikan yang diperlihatkan serta menjadi konsumen produk tersebut yang digunkan situtor (artis dan selebritis yang telah memperoleh *endorsement* dari perusahaan kosmetik).

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kehidupan mahasiswa Papua yang menjadikan *Instagram* dan *YouTube* sebagai rujukan kecantikan. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dan peneliti langsung kelokasi penelitian yaitu di sekitar kampus Unsoed tempat tinggal informan penelitian. Informan penelitian adalah mahasiswa Papua Unsoed yang mengakses dan menjadikan *Instagram* dan *YouTube* sebagai rujukan kecantikan dan teknik penentuannya yaitu purposif sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif (Milles, 1992).

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Mahasiswa Papua Tentang *Instagram* dan *YouTube* yang Berkaitan Dengan Kecantikan

Berbicara tentang media *Instagram* dan *YouTube*, tentu tidak terlepas dari keseharian mahasiswa terutama yang menampilkan kecantikan perempuan dan beragam informasi seputar kecantikan. Pandangan tentang perempuan cantik tentu berbeda antara satu dengan yang lain, begitupun pandangan mahasiswa Papua dalam melihat perempuan yang memberikan tutorial kecantikan di *Instagram* dan *YouTube*. Pada penelitian ini, pandangan yang

didapatkan oleh mahasiswa Papua sebagai informan utama dan mahasiswa Maluku, Nusa Tenggara Timur sebagai informan pendukung merupakan kecantikan yang ditampilkan melalui *Instagram* dan *YouTube* adalah *selebgram* yang masih memiliki standar kecantikan dengan berkulit putih, rambut lurus hitam dan seksi, selain itu juga ada beberapa *selebgram* yang menampilkan kecantikan sesuai karakter yang dimiliki. Hal ini membuat mahasiswa Papua merasa termotivasi, terbantu, mengenal kelebihan dan kekurangan setiap perempuan, memberikan keuntungan dan mendapatkan pengalaman dalam setiap cerita yang disampaikan oleh *selebgram* di *Instagram* dan *YouTube*. Selain itu membantu mereka dalam proses edukasi (proses pembelajaran) sehingga lebih gampang dan praktis dalam mempelajari setiap kecantikan yang di tutorkan seperti perawatan wajah, rambut dan berbagai bentuk kecantikan yang dimiliki *selebgram*.

Media sosial tersebar di seluruh dunia sehingga perempuan yang menampilkan kecantikanpun sesungguhnya juga berbeda-beda. Namun unggahan-unggahan yang banyak disimak oleh orang Indonesia lebih menampilkan perempuan cantik yang kulit putih, rambut panjang, lurus dan kulit halus. Apa yang media tampilan sedikit banyak mempengaruhi persepsi seseorang tentang media sosial. Terlepas dari itu, ada beberapa rujukan kecantikan yang ditemukan mahasiswa Papua yakni *selebgram* yang berasal dari Afrika, Amerika dan Indonesia yang memiliki karakter yang sama yakni *selebgram* berkulit hitam, sawo matang, coklat, rambut keriting dan rambut berombak. *Instagram* dan *YouTube* menjadi rujukan bagi mahasiswa Papua dan hal ini adalah suatu peluang atau alternatif yang dilakukan mahasiswa Papua untuk tetap menemukan pengalaman baru dan pengetahuan baru mengenai pengaturan cantik, hal yang menarik dari penelitian ini adalah mahasiswa Papua dengan karakter yang berbeda tetap percaya diri dengan melakukan perubahan untuk kecantikan dirinya tanpa harus mengubah keunikan dan ciri khas mereka yaitu tidak meluruskan rambut, tidak memutihkan kulit dengan krim pemutih namun alternatif yang dilakukan untuk terlihat cantik adalah melihat *selebgram* yang memiliki karakter yang sama yaitu *selebgram* dari luar negeri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan, pemikiran herbert blumer yang mengatakan bahwa tindakan seseorang terjadi atas dasar motif tertentu dan tindakan tersebut memiliki makna bagi dirinya. Kaitan dengan penelitian adalah perempuan memiliki suatu pemaknaan dalam dirinya yaitu ingin tampil cantik sehingga mereka berusaha untuk mencari cara untuk terlihat cantik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa mahasiswa Papua sangat tertarik dan merasa sangat mempengaruhi mereka dalam hal kecantikan yang mereka temukan di *Instagram* dan *YouTube* dan memiliki rasa ingin tahu dengan kecantikan yang sesuai kebutuhan.

2. Konsep Cantik Bagi Mahasiswa Papua

Konsep tentang kecantikan di dasari oleh apa yang kita rasakan dan alami. Penelitian ini membawa suatu pengetahuan bahwa konsep cantik mahasiswa Papua lebih cenderung pada dua hal yaitu berdasarkan cantik yang berasal dari dalam (*inner beauty*) dan berasal dari luar (*outerbeauty*). Perempuan yang cantik dapat dilihat dari dua hal ini dan perempuan yang tidak cantik juga dilihat dari dua hal ini. Dua hal yang menjadi konsep cantik mahasiswa Papua adalah : Cantik dari segi penampilan dan *make-up*

Bagi mahasiswa Papua cantik itu dilihat dari setiap tampilan rambut, tampilan wajah dengan warna kulitnya tetapi kulit yang dimaksud adalah warna apa adanya yang dimiliki perempuan tersebut. Cantik juga merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Bagi mahasiswa Papua perempuan yang terlihat cantik dengan penampilan menarik hanya semata-mata menarik perhatian laki-laki dengan memiliki kelebihan fisik tersendiri sehingga orang-orang melihat dengan nyaman dan menikmati setiap penampilan dari ujung rambut hingga kaki. Kelebihan yang dimiliki dan dikonsepskan adalah mereka yang memiliki mata yang bagus, hidung mancung, senyum yang manis. Itulah, konsep kecantikan yang menjadi dasar mahasiswa Papua dalam melihat kecantikan. Cantik dari segi batin dan kepribadian.

Kecantikan secara batin dikatakan sebagai kecantikan abadi atau sejati karena berasal dari hati perempuan. Menurut konsep cantik yang didapatkan dalam penelitian ini adalah cantik itu adalah Anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, perempuan harus mensyukuri apa

yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Selain itu cantik itu memang berasal dari apa adanya kita bukan berstandar pada produk- produk kecantikan, produk tersebut hanya bahan bantu dalam proses kecantikan. Seorang perempuan harus menerima dirinya dengan tidak mengikuti berbagai cara untuk mengubah bentuk tubuhnya dari rambut hingga kaki. Seseorang tersebut harus bersikap apa adanya, seperti itulah karakter kecantikan secara batin oleh mahasiswa Papua. Cantik yang diyakini bahwa antara *Innerbeauty* dan *outer beauty* harus berpadu menjadi satu artinya, cantik secara batin harus diikuti oleh cantik fisik seperti gaya berpakaian dan *bermake-up*. Dengan demikian, Cantik hati memancarkan kenyamanan pada setiap penampilan fisik.

3. Upaya yang dilakukan mahasiswa Papua untuk menjadi cantik

Penelitian ini menunjukkan upaya mahasiswa Papua dalam bertindak untuk menjadi cantik. berdasarkan rujukan yang di ikuti dan ditonton disinilah ada upaya untuk melakukan cara dalam mempercantik diri. Tutorial kecantikan di *Instagram* dan *YouTube* berbeda-beda, dan tutorial yang ditampilkan adalah mereka yang berasal dari *selebgram* Arfika, Amerika, Filipina dan Indonesia. Dengan mengikuti dan menontonnya terus-menerus ada upaya yang dilakukan mahasiswa Papua adalah mengaplikasikan cara pemakaian *make-up* dan menata rambut dengan benar didalam kehidupan sehari-hari. Adanya ketertarikan dengan produk-produk yang digunakan contohnya seperti *make-up* yang alami, natural, pelembab muka dari bahan alami yang bisa membuat wajah atau kulit tidak kusam.

Upaya yang dilakukan pula adalah merawat rambut keriting dengan benar, menggunakan *skinsker* (pelembab), menata rambut indah dengan melihat *@hairbeautiful*, *@blackmake-up*, memakai rambut palsu yang panjang dan keriting dan sudah dianyam. Dengan adanya konten-konten baru mempengaruhi mahasiswa Papua untuk tertarik dan memiliki keinginan untuk belajar dan mengetahui bahan-bahan kosmetik yang ditampilkan oleh *selebgram* baik itu di luar negeri maupun Indonesia. Upaya menjadi cantik tentu saja mereka berusaha membeli alat-alat kosmetik dengan merek-merek tertentu. Upaya secara khusus yaitu mereka harus menggambar alis dengan rata, memakai lipstik, memakai

foundation, bedak, maskara, serum-serum, *blush* *ondane yeliner*.

Mahasiswa Papua juga memiliki alternative dalam memotong bentuk gaya rambut, menyambungkan rambut dengan rambut palsu, memakai krim rambut panjang. Berbagai produk modern di gunakan dan produk tersebut sesuai dengan warna kulit dan kebutuhan pribadi masing-masing.

Jika dahulu mahasiswa berupaya untuk menggunakan produk alami seperti santan kelapa untuk pencuci rambut, dan mencuci muka dengan air beras, maka berbeda dengan era modern saat ini mahasiswa Papua harus mengikuti tren dan mempraktekan setiap tutorial cantik khususnya *selebgram* yang berkulit hitam, sawo matang, rambut keriting dan rambut berombak.

Simpulan dan Saran

Berbagai pandangan dan kemampuan muncul dalam kehidupan manusia terutama mahasiswa perempuan yang berasal dari Indonesia timur yaitu mahasiswa Papua. Mahasiswa asal Papua awalnya tidak mengenal media yang menampilkan kecantikan perempuan di media *Instagram* dan *YouTube* namun dengan berjalannya waktu mereka dapat mengetahui berbagai cara perawatan diri di mulai dari Perawatan rambut, wajah dan kulit.

Melalui *Instagram* dan *YouTube* mahasiswa asal Papua menemukan beberapa *selebgram* yang memiliki karakter yang sama dengan kehidupan fisik mereka. Ada beberapa *selebgram* luar negeri seperti tutorial kecantikan dari *selebgram* berkulit hitam dan coklat serta rambut keriting dari Afrika dan campuran negara. Adapun *selebgram* dari Indonesia yang memberikan inspirasi kecantikan untuk kulit coklat dan rambut berombak. Berdasarkan tutorial yang diikuti dan dilihat oleh mahasiswa Indonesia timur pada umumnya dan khususnya mahasiswa asal Papua mereka sangat mempertahankan apa yang menjadi jati diri mereka dengan tetap memiliki keunikan rambut keriting dan mencari cara dan inspirasi dari *selebgram* di *Instagram* dan *YouTube* yang berkaitan dengan karakter rambut keriting dan menggunakan produk- produk *make-up* atau kosmetik yang sesuai dengan warna kulit

sehingga kulit mereka tetap seperti kulit hitam dan sawo matang. Oleh karena itu mahasiswa asal Papua memberikan pandangan bahwa cantik adalah berasal dari diri kita dan apa adanya kita. Dengan inspirasi yang ada mahasiswa Papua berupaya untuk menjadi cantik, mereka tidak berupaya untuk mengubah bentuk warna kulit menjadi putih dan rambut menjadi lurus tetapi sebaliknya mereka merawat kecantikan rambut dan wajah melalui rujukan dari *Instagram* dan *YouTube* yang sesuai karakter fisik mahasiswa Papua.

Adapun implikasi dari penelitian ini bahwa *Instagram* memberikan rujukan yang berkaitan dengan tutorial *make-up* atau tutorial kecantikan yang dilakukan oleh *selebgram* luar negeri, bagaimana cara membentuk gaya menganyam rambut keriting dan *make-up* dengan *make-up* kulit hitam dan sawo matang seperti *black_beauty* dan *hair_beautiful*. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang perlu mengembalikan konsep standar kecantikan bagi perempuan menurut budaya dan karakter perempuan tertentu. Tidak hanya pada satu pandangan mengenai kecantikan. Cantik bukanlah perempuan yang memiliki karakter fisik yang putih, rambut lurus dan halus, melainkan cantik juga adalah perempuan yang berkulit hitam, sawo matang dan coklat serta rambut keriting. Supaya setiap perempuan tetap merasa tidak ditinggalkan oleh standar kecantikan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Perusahaan-perusahaan produk kosmetik harus benar-benar memperhatikan setiap perempuan yang memiliki warna kulit dan rambut yang berbeda-beda di Negara Indonesia sehingga iklan atau promosi kecantikan dibintangi oleh perempuan yang berkarakter kulit hitam dan rambut keriting dengan cara merawat kecantikan rambut dan kulit tanpa harus dirubah, supaya kedua karakter ini dapat terwakili menjadi standar kecantikan. Sebagai mahasiswa sebaiknya gunakan keuangan dengan baik dan tidak terlalu memboroskan dalam membeli alat-alat *make-up* secara berlebihan, beli sesuai kebutuhan yang bisa dijangkau oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Aquarini, P. P.(2006). "*Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan*

Budaya Pop". Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.

Biagi, S. (2010). *Media/Impact: Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.

Budiargo, D. (2015). *Berkomunikasi ala Net Generation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Fatty Faiqah, M. N. (2016). "YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar dgram". *Journal.unhas.ac.id*.

Harahap, R. P. (2016). *Konsep Cantik Dalam Islam*. Retrieved from <http://www.academia.edu>. Milles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Sari, M. P. (2017). "Fenomena Pengguna Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau". *Media. Neliti. com*.

Sulistiy. (2011, Desember). "*Setiap wanita itu cantik (Karena Aku Cantik)*". Retrieved from <https://sulisty4nie.wordpress.com>.

Suyanto, M. (2005). "*Strategi Perancangan Iklan Televisi Perusahaan Top Dunia*". Yogyakarta: C.V ANDI Offset.

Syata, N. (2012). Makna Cantik Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Fenomenologi.

<http://Repository.unhas.ac.id>.

MERAJUT TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF

Ankarlina Pandu Primadata
 Jurusan Sosiologi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jenderal Soedirman
 Email :ankarlina@gmail.com

ABSTRAK

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pemerintah Indonesia untuk memberikan hak yang sama kepada rakyat Indonesia dalam memperoleh Pendidikan. Amanat tentang hak atas pendidikan tersebut tertuang dalam BAB IV Bagian Kesatu Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 Ayat 1-5. Berangkat dari amanat yang disampaikan dalam undang-undang diatas, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan di Indonesia sempat menjadi sorotan masyarakat, dimana banyak sekali kasus kekerasan, diskriminasi, bullying hingga pelecehan seksual yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Dalam dunia pendidikan, luntarnya nilai toleransi dapat muncul dari perbedaan seorang anak dalam hal fisik, komunikasi, mental, perilaku, dan sikap yang pada akhirnya dapat memunculkan sikap diskriminasi bahkan bullying pada anak tersebut. Salah satu hal yang saat ini telah dilakukan dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam membangun pluralisme adalah menyediakan layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan harapan baru bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengenyam pendidikan formal pada sekolah umum tanpa takut merasa terisolasi dari lingkungan masyarakat. Pendidikan inklusif dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi, menghapus stigma, diskriminasi dan labelisasi yang melekat pada anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif, masyarakat disosialisasikan kepada wajah baru pendidikan di Indonesia, yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal, dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menerima bahwa anak berkebutuhan khusus pun mempunyai hak yang sama dengan anak normal dalam hal pendidikan.

Kata Kunci: Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Indonesia

Pendahuluan

Berbicara tentang dunia pendidikan di Indonesia mungkin tidak akan ada habisnya. Indonesia sendiri merupakan bangsa majemuk, yang terdiri atas berbagai suku, budaya dan bahasa. Keragaman tersebut seharusnya dapat menjadi alat pemersatu bangsa dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jika kita berbicara tentang pendidikan, tentu akan ada banyak hal yang dapat dan layak di bahas. Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan di Indonesia sempat menjadi sorotan masyarakat, dimana banyak sekali kasus kekerasan, diskriminasi, *bullying* hingga pelecehan seksual yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Berbagai permasalahan tersebut muncul akibat dari luntarnya nilai-nilai toleransi dan menghargai keragaman yang ada. Dalam dunia pendidikan, luntarnya nilai toleransi dapat muncul dari perbedaan seorang anak dalam hal fisik, komunikasi, mental, perilaku, dan sikap yang pada akhirnya dapat memunculkan sikap diskriminasi bahkan *bullying* pada anak tersebut. Tentu saja hal-hal tersebut bertentangan dengan tujuan pendidikan. Bertrand Russel dalam bukunya yang berjudul “*Pendidikan dan Tatanan Sosial*” (1993 :

35) menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan pendidikan yang berbeda, yaitu :

1. Tujuan pendidikan satu-satunya adalah untuk menyediakan peluang bagi pertumbuhan dan menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang merintangi.
2. Tujuan pendidikan adalah membudayakan individu dan mengembangkan kapasitasnya hingga maksimal.
3. Tujuan pendidikan harus lebih dipertimbangkan dalam hubungannya dengan komunitas daripada dalam hubungannya dengan individu, dan bahwa urusannya ialah melatih warga negara yang berguna.

Melihat tujuan pendidikan yang disampaikan Russell diatas, pendidikan di Indonesia masih mempunyai tujuan untuk membudayakan individu dan mengembangkan kapasitasnya hingga maksimal. Pengembangan individu melalui pendidikan juga harus dilakukan pada anak berkebutuhan khusus. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32, pemerintah mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagai berikut :

“Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional dan sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” (Kustawan, 2013 : 17).

Melalui penetapan tersebut, pemerintah menyatakan kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Penetapan tersebut juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan formal dan pengajaran yang layak seperti anak normal lainnya. Namun demikian, kenyataan bahwa keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sangat terbatas menjadi permasalahan tersendiri bagi para anak berkebutuhan khusus yang disekitar lokasi tempat tinggalnya tidak tersedia Sekolah Luar Biasa (SLB). Permasalahan tersebut dapat berakibat pada gagalnya program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Kajian Pustaka

Abdul Rahim (2016) dalam tulisannya menyatakan bahwa membangun kesadaran pluralisme akan efektif manakala melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen yang diyakini memiliki peranan paling penting untuk proses internalisasi dan penyampaian nilai-nilai pluralisme. Lewat jalur pendidikan, diharapkan kesadaran terhadap pluralisme dapat tumbuh subur di masyarakat luas.

Salah satu hal yang saat ini telah dilakukan dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam membangun pluralisme adalah menyediakan layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang optimal (Rachmayana, 2013:89). Pendidikan inklusif memberikan harapan baru bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengenyam pendidikan formal pada sekolah umum tanpa takut merasa terisolasi dari lingkungan masyarakat. Pada pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus ditempatkan dalam satu kesatuan dengan anak normal menggunakan pelayanan yang inklusif, sehingga anak didik yang berkebutuhan khusus

tidak ditempatkan dan dipandang berbeda dengan anak didik normal lainnya. Pertanyaannya, apakah pendidikan inklusif dapat menjadi sarana membangun toleransi bangsa? bagaimana cara merajut toleransi melalui pendidikan inklusif? dan bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi melalui pendidikan inklusif?

Pembahasan

A. Membangun Toleransi Bangsa Melalui Pendidikan Inklusif

Pada dasarnya pendidikan adalah hak setiap manusia, tanpa terkecuali. Saat ini peran lembaga pendidikan dalam tumbuh kembang anak sangatlah tinggi. Lembaga atau institusi pendidikan sendiri kini telah bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk dengan istilah yang berbeda-beda pula. Pendidikan layanan khusus misalnya yang kini telah banyak jenisnya, dari Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Luar Biasa (PLB), Pendidikan Layanan Khusus (PLK), hingga yang terbaru adalah sekolah atau pendidikan inklusif.

Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu memang menjanjikan beberapa hal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pula kesempatan pekerjaan yang bisa didapatkannya. Secara tidak langsung, sekolah menjanjikan masa depan yang lebih baik, jika jenjang pendidikan seseorang bisa terus meningkat. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak semua sekolah dapat dan mau menerima mereka yang berkebutuhan khusus sebagai siswanya. Hanya sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan khusus atau luar biasa dan yang menyediakan layanan inklusif saja yang bersedia menerima mereka sebagai peserta didiknya.

Sementara itu, berbicara tentang pendidikan luar biasa atau pendidikan inklusif, tentu tidak dapat lepas dari sejarah munculnya pendidikan luar biasa tersebut. Sejarah pendidikan luar biasa di Indonesia memang begitu panjang. Perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 (Rachmayana, 2013:7). Pada saat itu, Belanda memperkenalkan sistem sekolah dengan orientasi barat, dimana anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat bersekolah pada lembaga-lembaga khusus yang telah disediakan. Sejalan dengan perkembangan pendidikan saat ini, masyarakat juga diberikan pilihan untuk memasukkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus pada sekolah umum yang menyediakan layanan pendidikan inklusif atau yang sering juga disebut sebagai sekolah inklusif.

Model pendidikan inklusif menekankan pada keterpaduan penuh, sehingga menghilangkan labelisasi pada anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan atau layanan inklusif sendiri merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Rachmayana, 2013:89). Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi semua anak tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kondisi lainnya yang mungkin tidak sama dengan lingkungan sekitarnya. Pada pendidikan inklusif, semua anak diajak untuk belajar bersama-sama dan saling membantu satu sama lain, tanpa memandang perbedaan yang ada diantara mereka.

Salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah landasan sosiologis. Landasan ini menekankan bahwa anak adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (Rachmayana, 2013:91). Sebagai makhluk individu, seorang anak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tersendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial seorang anak harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan disekitarnya dengan baik dan benar. Ketika seorang anak hidup ditengah-tengah masyarakat dirinya harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya, karena tanpa adanya interaksi dan komunikasi, maka seseorang akan menjadi terisolasi dari lingkungannya. Itulah mengapa kemudian muncul sekolah inklusif, agar anak berkebutuhan khusus sekalipun dapat belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Sekolah inklusif sendiri merupakan sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya, sekolah inklusif mempunyai kurikulum ganda dalam pola pengajarannya. Hal itu dikarenakan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan dan materi yang berbeda dengan anak normal yang bersekolah ditempat yang sama. Pada sekolah inklusif, siswa berkebutuhan khusus dimasukkan dalam kelas reguler bersama-sama dengan siswa normal lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang normal, sehingga ketika siswa tersebut berada diluar sekolah, dirinya dapat diterima oleh masyarakat karena dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan baik.

Secara mental dan psikologis, kondisi fisik dan mental yang berbeda, membuat anak-anak berkebutuhan khusus secara tidak langsung akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang kondisi fisik dan mentalnya normal, sehingga dapat

mempengaruhi kemampuan mereka ketika bersekolah. Anak-anak berkebutuhan khusus yang berhasil melepaskan diri dari sindrom rendah diri dan mampu berprestasi dalam pendidikan, tentu saja bukan tidak ada. Namun demikian, jumlah yang berhasil tersebut masih jauh lebih sedikit daripada mereka yang terpaksa harus membentengi diri secara psikologis melalui perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus diajarkan untuk dapat mengenal dan memahami lingkungan disekitarnya yang berbeda dengan dirinya, begitu pula sebaliknya dengan anak yang normal, mereka pun dituntut untuk dapat menerima perbedaan antara dirinya dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut dilakukan agar para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dapat berprestasi.

Dalam hal toleransi pada sekolah dengan layanan pendidikan inklusif, bukan hanya peserta didik saja yang diharuskan untuk bertoleransi. Para guru dan orangtua siswa pun dituntut hal yang sama, yaitu toleransi. Mengapa? Karena para guru adalah pengganti orangtua di sekolah yang akan berhadapan langsung dengan para siswa berkebutuhan khusus yang notabene memerlukan perlakuan dan kesabaran yang ekstra daripada ketika menghadapi siswa normal.

Pola pengajaran dan pola interaksi yang berbeda antara guru dengan anak berkebutuhan khusus hanya dapat dilakukan jika guru mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Selain para guru yang menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah, para orangtua siswa pun diharuskan memiliki sikap toleransi yang tinggi pula. Toleransi diperlukan karena para orangtua tersebut menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah inklusif yang mewajibkan peserta didiknya untuk berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, begitupula sebaliknya, para orangtua anak berkebutuhan khusus pun harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena anak-anaknya akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa normal di sekolahnya, yang mempunyai kemungkinan mengalami kendala saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya toleransi diantara para orangtua siswa, hal tersebut akan meminimalisir gesekan yang mungkin terjadi akibat dari adanya salah paham.

Konsep pendidikan inklusif yang menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu kelas reguler, bukan hanya membantu anak berkebutuhan khusus untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, namun juga mengajarkan toleransi kepada anak-anak sejak dini. Pada pendidikan inklusif, anak-anak dan seluruh pihak yang terkait

diajarkan, bahkan dituntut untuk dapat saling menghargai satu dengan lainnya, menerima perbedaan yang ada, dan saling tolong menolong. Sikap dan tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara membangun toleransi. Konsep pendidikan inklusif tersebut juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk dapat membangun sikap toleransi, dengan tidak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai kebutuhan khusus, dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Karena melalui pendidikan inklusif, masyarakat di dorong untuk tidak lagi membeda-bedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Melalui pendidikan inklusif pula, masyarakat dapat belajar untuk membangun dan memperkenalkan toleransi pada generasi muda mulai dari anak-anak.

B. Wujud Toleransi Pada Pendidikan Inklusif

Akhir-akhir ini, kita sering mendengar dan melihat berita tentang aksi diskriminasi dan *bullying* yang dilakukan di lingkungan pendidikan Indonesia. Bukan tanpa sebab hal-hal tersebut terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Lunturnya nilai-nilai toleransi dalam masyarakat menjadi salah satu sebab yang terelakan. Mulai hilangnya sikap toleransi dan menghargai perbedaan, membuat masyarakat kita pada umumnya dan anak-anak pada khususnya, menjadi sulit menerima perbedaan yang ada disekitarnya.

Pada sekolah dengan pendidikan inklusif, nilai-nilai tentang toleransi dan saling menghargai satu sama lain menjadi poin penting yang diajarkan dan diterapkan setiap harinya pada lingkungan sekolah. Anak-anak yang bersekolah pada sekolah inklusif akan diajarkan tentang menerima perbedaan yang ada disekitarnya, jauh lebih banyak daripada pada sekolah umum lainnya. Hal tersebut dilakukan karena pada sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus dan bersanding, duduk bersama, belajar dan bermain bersama dengan anak normal. Sehingga, anak-anak tersebut harus dapat saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong satu dengan lainnya.

Wujud toleransi pada sekolah inklusif, bukan hanya dalam hal menerima perbedaan, namun juga dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi. Pada sekolah inklusif, anak-anak normal diajarkan untuk dapat berkomunikasi dengan temannya yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan leluasa, begitu pula sebaliknya, para anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif akan diajarkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan teman-temannya yang normal hingga mereka dapat berinteraksi sendiri dengan temannya, sehingga para anak berkebutuhan khusus tersebut tidak

merasa terisolir atau merasa di diskriminasikan oleh lingkungannya.

Selain saling menghargai dan menghormati, serta berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya, wujud lain toleransi dalam lingkungan sekolah inklusif adalah adanya sikap saling tolong menolong antar peserta didik. Pada beberapa sekolah inklusif, para siswa normal diajak dan dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu contoh sikap tolong menolong yang biasanya dilakukan pada sekolah inklusif adalah kegiatan mendorong kursi roda yang dilakukan oleh anak normal terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Para siswa normal, biasanya diwajibkan untuk membantu temannya yang berkebutuhan khusus ketika mereka melakukan kegiatan atau beraktifitas di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan agar tumbuh rasa empati diantara para siswa, sehingga meminimalisir mereka untuk melakukan diskriminasi apalagi sampai melakukan *bullying* terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus, juga menumbuhkan perasaan bahwa dirinya tidak di diskriminasikan oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya.

Secara umum, pendidikan inklusif telah memberikan warna baru dalam dunia pendidikan. Pendidikan inklusif juga dapat dikatakan sebagai langkah baru yang diambil oleh pemerintah dalam rangka merajut toleransi antar sesama. Berbagai wujud toleransi antar sesama dapat dengan mudah kita temui dalam sekolah yang menyediakan layanan pendidikan inklusif.

C. Kesadaran Masyarakat dan Pentingnya Toleransi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Saat ini, banyak berkembang layanan pendidikan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus. Indonesia sendiri merupakan negara yang menyediakan layanan pendidikan khusus bagi warga negaranya yang berkebutuhan khusus, salah satunya adalah pendidikan inklusif. Pada sekolah dengan layanan pendidikan inklusif atau sering juga disebut sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya yang tidak berkebutuhan khusus.

Dalam sekolah inklusif, siswa berkebutuhan khusus bergabung menjadi satu kelas dengan siswa reguler. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa berkebutuhan khusus dapat belajar berinteraksi dengan siswa lainnya yang notabene adalah anak tanpa kebutuhan khusus, begitu pula

sebaliknya. Sementara itu, tujuan utama adanya pendidikan inklusif adalah untuk menghapus diskriminasi dan labelisasi pada anak-anak berkebutuhan khusus, agar mereka tidak lagi merasa terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Menghapus diskriminasi dan labelisasi pada anak-anak berkebutuhan khusus tentu bukan hal yang mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai upaya dilakukan untuk mengubah *stigma* yang melekat pada anak berkebutuhan khusus. Dalam *stigma* itu, orang-orang berkebutuhan khusus dipandang tidak pantas untuk bersekolah karena sekolah tidak akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Tidak hanya sampai disitu, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak pantas bergaul dengan anak yang normal meski mereka satu sekolah. Berdasarkan *stigma* tersebut, kita seharusnya berusaha agar pemikiran-pemikiran seperti itu tidak ada lagi dala masyarakat dan dunia pendidikan yang seharusnya memang memihak pada mereka yang berkebutuhan khusus namun memiliki semangat untuk belajar maupun berubah menjadi lebih baik.

Salah satu cara menghapus *stigma* yang melekat pada anak berkebutuhan khusus adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap para anak berkebutuhan khusus. Tentu bukan hal yang mudah untuk merubah cara pandang masyarakat, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit serta pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat agar *stigma* tersebut dapat hilang. Pendidikan inklusif dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi, menghapus *stigma*, diskriminasi dan labelisasi yang melekat pada anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif, masyarakat disosialisasikan kepada wajah baru pendidikan di Indonesia, yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal, dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menerima bahwa anak berkebutuhan khusus pun mempunyai hak yang sama dengan anak normal dalam hal pendidikan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dapat pula dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang adakan oleh sekolah inklusif. hal tersebut dapat pula dijadikan ajang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat membuat *image* baru dalam masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Selain melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah inklusif, peran pemerintah juga di butuhkan untuk menghapus *stigma* dalam masyarakat tersebut. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang berhubungan anak berkebutuhan khusus, supaya masyarakat sadar bahwa toleransi dalam kehidupan sehari-hari

sangat diperlukan, bukan hanya karena perbedaan agama, suku, bahasa dan ras, namun juga karena perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan seseorang yang berbeda-beda.

Simpulan dan Saran

Salah satu topik hangat yang sering diperbincangkan ketika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus adalah masalah pendidikan formal bagi anak-anak tersebut. Pendidikan memang bukan hal mudah bagi anak berkebutuhan khusus, bukan hanya karena keterbatasan lembaga pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus, namun juga permasalahan lain seperti stigma yang melekat pada diri mereka yang dapat membuat mereka menerima perlakuan diskriminasi dan labelisasi dari masyarakat sekitarnya.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang optimal. Melalui pendidikan inklusif, anak-anak diajarkan untuk dapat saling menghargai, menghormati dan tolong menolong satu dengan lainnya, antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal.

Selain membuka kesempatan memperoleh pendidikan yang sama dan setara bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif juga menjadi wadah bagi masyarakat umum dan bagi seluruh pihak yang terkait untuk belajar dan menerapkan sikap toleransi yang tinggi, bukan hanya karena perbedaan agama, suku, dan bahasa, namun juga karena perbedaan fisik, mental, dan psikologi yang berbeda antar individu. Hal tersebut karena dalam pendidikan inklusif, para peserta didik diajarkan untuk dapat menerima perbedaan yang ada, dan menghargai serta menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya. Melalui pendidikan inklusif, kita dapat merajut toleransi antar sesama, menghapus stigma, mencegah diskriminasi dan labelisasi yang melekat pada anak berkebutuhan khusus.

Daftar Pustaka

- Kustawan, Dedy dan Yani Meimulyani. 2013. *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*. Luxima, Jakarta.
- Rachmayana, Dadan. 2013. *Diantara Pendidikan Luar Blasa Menuju Masa Depan yang Inklusif*. Luxima, Jakarta.

Rahim, Abdul. 2016. *Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*, dalam Trihayu : Jurnal

Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 3, Nomor 1, September 2016, hlm. 68 -71.
Russel, Bertrand. 1993. *Pendidikan dan Tatahan Sosial*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

PEREMPUAN DALAM PUSARA KORUPSI (Perspektif Sosiologi Politik)

Titis Perdani

Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED

ABSTRAK

Perempuan selama ini dianggap sebagai second gender, artinya perempuan ditempatkan sebagai posisi kedua setelah laki laki. Kasustraan Jawa menyebut stigma terhadap perempuan yang hanya menguasai 3 ranah yaitu masak, mancak, dan manak telah melahirkan banyak upaya kesetaraan yang akhirnya dilakukan kaum perempuan termasuk keterlibatan dalam ranah publik menjadi tokoh ataupun pemimpin diranah nasional hingga lokal. Namun pada kenyataannya kesempatan peran bagi kaum perempuan itu sendiri dicerderai dengan keterlibatan mereka pada kasus-kasus korupsi. Fenomena banyaknya perempuan tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau by design, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkutan paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut. Disisi lain faktor penghambat seorang perempuan terlibat ataupun terjerat kasus korupsi juga dapat ditinjau dari perspektif gaya kepemimpinan dan psikologi perempuan dimana perempuan lebih menggunakan perasaan dibanding logika laki-laki dalam mengambil keputusan, politik : partisipasi perempuan pada jabatan publik dan strategis dirasa masih sedikit, sudut pandang agama menyebutkan bahwa kaum laki-laki yang lebih baik menjadi seorang pemimpin dan budaya ketimuran yang menempatkan posisi perempuan dibelakang laki laki. Adanya keterlibatan dan perspektif faktor penghambat keterlibatan ini yang akan menjadi kajian pembahasan dalam tulisan berikut.

Kata Kunci : Perempuan, Sektor Publik, Korupsi, Budaya

Pendahuluan

Pembahasan mengenai perempuan sampai saat ini masih menjadi isu menarik di seluruh penjuru dunia. Baik dalam perpektif hak dan kewajiban sosok perempuan masih menjadi pembahasan menarik untuk ditelisis mengenai posisi dan porsi perempuan dalam perpektif duniawi. Perempuan selama ini dianggap sebagai *second gender*, artinya perempuan ditempatkan sebagai posisi kedua setelah laki laki. Termasuk dalam keterlibatannya di ranah publik. Menelisis sebuah andagium tentang perempuan dalam kasustraan jawa, “*Gawean utama wong wedok iku masak, macak, lan manak. Merga iku, wilayahe dapur, sumur, lan kasur kanthi gawean: isah-isah, umbah-ubah, lan lumah-lumah.*” (Dikutip secara bebas dari Hersri, 1981)

Kalimat dalam kasusastran Jawa tersebut setidaknya menegaskan bahwa perempuan tidak akan pernah berada di depan sebagai pemimpin. Ketidakadilan tersebut menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, namun perempuan justru menikmati kenyataan tersebut. Hal itu dikonstruksikan melalui sistem sosial, budaya, dan hukum sehingga keberadaan perempuan tidak merasakannya sebagai penindasan karena proses tersebut telah berlangsung berabad-abad dan dari generasi ke generasi. Laki-laki sebagai pihak penindas juga tidak merasa menindas perempuan.

Dengan demikian, gejala semacam ini

dianggap sebagai hal yang biasa. Pada giliran selanjutnya, maka terjadilah diferensiasi peran berdasarkan jenis kelamin¹. Oleh karena itu, dalam sistem sosial dikenal sektor publik (*public sector*) dan sektor domestik (*domestik sector*). Sektor publik distereotipkan sebagai wilayah laki-laki sedangkan sektor domestik distereotipkan sebagai wilayah perempuan²

Secara *historis*, streotip perempuan dapat dilihat dari tiga aspek: biologis, psikologis, dan mitologis. Secara biologis (fisik), perempuan lebih lemah daripada laki-laki, secara psikologis perempuan merupakan sosok yang lebih dikendalikan oleh emosi dalam bertindak, suka dilindungi, tidak menyukai tantangan, dan serba lembut, sedang secara mitologis yang bersumber dari ajaran agama dan mite-mite tertentu, hampir selalu menempatkan perempuan merupakan subordinasi laki-laki.³

Secara kultural, budaya Jawa berpandangan bahwa tugas seorang perempuan

¹Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran perempuan Dalam Masyarakat*, 1892, Jakarta, PT Gramedia (Hal 22)

² Gayatri Irine Hiraswari, *Gender dan Politik Lokal : Pemetaan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan di Empat Daerah*, 2009, Jakarta, LIPI (Hal 59)

³ Idem (HAL 65)

adalah macak “berhias”, masak “memasak”, dan manak “melahirkan” dengan wilayah operasi dapur, sumur, dan kasur. Dalam pandangan hidup orang Jawa, juga dikenal tiga kesetiaan seorang perempuan, yakni ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika dewasa harus patuh kepada suami, dan ketika tua harus patuh kepada anaknya. Sedangkan secara sosial, nilai-nilai di atas dilembagakan dalam semua aspek kehidupan: hukum, politik, dan pranata sosial. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membentuk stereotip perempuan. Melihat tataran stereotip perempuan tersebut, satu hal yang menarik untuk dikaji adalah fenomena maraknya perempuan yang terjerat kasus atau tindakan korupsi. Kasus korupsi kini tak lagi hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Pada faktanya, tak sedikit para perempuan yang juga harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena terjerat kasus tersebut. Sosok perempuan yang selalu identik dengan kehidupan glamour terkadang membuat mereka terjebak pada obsesi tindakan korupsi, sehingga pada akhirnya rela melakukan hal apapun. Beberapa kasus korupsi besar menyeret nama-nama perempuan mulai dari kasus kelas kakap seperti penggelapan dana nasabah Malinda Dee, kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti dan Miranda Goeltom, kasus keterlibatan Wa Ode Nurhayati (Fraksi PAN) dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), kasus Wisma Atlet dan *Sport Centre* Hambalang yang melibatkan banyak sekali perempuan di dalamnya seperti Angelina Sondakh, Mindorosalina Manulang, dan Yulianis dan tak ketinggalan istri Ketua Umum Partai Demokrat, Athiyah Laila serta Hartati Murdaya pada kasus suap Bupati Buol yang masih berada dalam lingkup Partai Demokrat, Istri Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanty yang terseret kasus suaminya dan yang terbaru kasus suap dan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Selain itu tercatat hingga tahun 2019 ada sekitar 7 Kepala Daerah perempuan yang terjerat kasus korupsi, nama-nama tersebut antara lain Sri Wahyumi Maria Manalip Bupati Kepulauan Talaud, Neneng Hassanah Yassin Bupati Bekasi, Imas Aryumningsih Bupati Subang, Rita Widyasari Bupati Kertanegara, Siti Mashita Walikota Tegal, Atty Suharti Walikota Cimahi dan Sri Hartini Bupati Klaten.

Sederetan nama tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi ranah kaum laki-laki, ternyata perempuan juga mengambil peran dan memiliki kecenderungan untuk bertindak serupa. Walaupun memang motifnya berbeda antara kasus satu dengan yang lain, seperti contoh baru baru ini kasus yang menimpa Sri Wahyumi Maria Manalip

Bupati Kepulauan Talaud yang ditangkap karena diindikasikan menerima tas, jam dan perhiasan berlian mewah lainnya senilai ratusan juta rupiah sebagai bentuk gratifikasi atau pada kasus Neneng Hassanah Yassin Bupati Bekasi berupa dugaan suap pada perizinan pembangunan proyek Meikarta. Keduanya memiliki perspektif psikologis yang berbeda antara kecenderungan perempuan yang memang tidak lepas dari kesan glamour atau mereka yang terjebak karena situasi dan ranjau politisasi birokrasi. Apapun yang terjadi setidaknya fenomena tersebut menunjukkan betapa perempuan juga bisa terjerat dan terkooptasi dunia dan permainan politik ala laki-laki.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* perempuan memainkan peranan kunci dalam praktik mafia hukum dan menjadi operator untuk mengamankan koruptor dari jeratan hukum. Di luar angka yang KPK di atas, mungkin jumlah kaum perempuan yang terlibat korupsi lebih banyak lagi. Karena yang namanya korupsi tidak harus melibatkan sejumlah dana fantastis seperti kasus-kasus besar yang menjadi pemberitaan media massa. Tanpa bermaksud memukul rata terhadap semua perempuan, muncul pertanyaan: seperti apakah sebenarnya kondisi sosiologi politik yang dialami perempuan khususnya mereka yang berada di ranah publik dan terjerat kasus korupsi? Apakah ini merupakan efek dari kesetaraan gender yang digaungkan selama ini terhadap kaum perempuan? Di saat sebagian kaum perempuan masih berjuang keras untuk memperjuangkan hak-haknya, di sisi lain kaum perempuan sudah banyak yang menikmati kesetaraan gender dan menduduki jabatan strategis, tapi mengapa ada perempuan yang mudah tergoda untuk melakukan praktik-praktik korupsi atau memang sistem yang sengaja menjerat mereka karena ketidak tauannya? Melihat keadaan seperti ini maka dalam tulisan ini merupakan gagasan konseptual untuk melihat kajian tentang pertanyaan (1) Bagaimana sebenarnya peran dan peluang melakukan korupsi antara perempuan dan laki-laki pada ranah publik? (2) Bagaimana peran perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Negara ini?.

Kajian Pustaka

A. Korupsi

Secara etimologi, Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu

corruptie, korrupcie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁴ (Focus Andera dalam Prodjohamidjojo,2001:7)

KPK dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan⁵:

- Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
- Kelompok delik penyuaipan (pasal 5,6, dan 11)
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
- Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C) Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

B. Motivasi Korupsi

Pada dasarnya perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak wajar atau menyimpang guna mengeruk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berpengaruh pada kerugian keuangan negara. Perbuatan menyimpang tersebut disebabkan karena beberapa faktor⁶,

yaitu:

- a) Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b) Kolonialisme. suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung
- c) korupsi.

⁴Nurdjana Dkk, 2005, *Korupsi&Illegal Logging Dalam System Desentralisasi* , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20

⁵Undang Undang Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi ⁵Nurdjana Dkk, 2005, *Korupsi&Illegal Logging Dalam System Desentralisasi* , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20

⁵Undang Undang Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

- d) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya, kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual
- e) yang tinggi, terpelajar, dan terpandang. Sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- f) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- g) Tidak adanya sanksi yang keras.
- h) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- i) Struktur pemerintahan.
- j) Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- k) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat.

Dari beberapa faktor-faktor tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan praktik-praktik korupsi karena dipengaruhi oleh 2 faktor. yaitu faktor internal dan eksternal dari dirinya. Sigmund Freud dalam teori piskonalalisis menyatakan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari tiga sistem, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* adalah komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, didalamnya termasuk perilaku naluriah yang didorong prinsip kesenangan.

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggungjawab untuk menangani dengan realitas. *Ego* bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha memuaskan keinginan *id* dengan cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Sedangkan *superego* adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita dari kedua orang tua, masyarakat, rasa benar dan salah. *Superego* memberikan pedoman untuk membuat penilaian.⁷

Psikoanalisis memberikan gagasan yang mendasar bahwa semua pikiran dan tindakan sadar adalah proses yang tidak disadari dan

⁷Nurdjana Dkk, 2005, *Korupsi&Illegal Logging Dalam System Desentralisasi* , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20

⁷Undang Undang Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

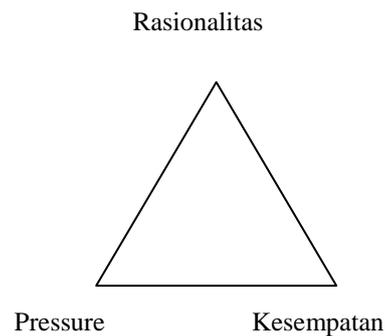
diringkas dalam frase pikiran yang tidak sadar. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan perilaku sadar dalam ketidaksadaran. Karena dalam perilaku sadar terpendam perilaku yang tidak disadari yang akhirnya mempengaruhi perilaku sadar. Manusia memiliki dorongan-dorongan psikis yang berprinsip pada kesenangan (*pleasure principle*) yang mendasar yang bersarang dalam *id*. Namun dorongan ini mendapat hambatan atas prinsip realitas, yaitu *ego* yang bertugas membatasi dorongan primitif sesuai dengan prinsip realitas dan *Superego* yang berprinsip kepada norma. Dorongan psikis *id* merupakan dorongan pada norma. Dorongan psikis *id*

merupakan dorongan yang paling besar membentuk perilaku berasal dari *id*.

Manusia, meskipun sudah membatasi perilakunya dengan prinsip realitas, usaha mencari kesenangan masih tetap menjadi dorongan psikis dalam ketidaksadaran yang kuat menuntut untuk dipenuhi. Dorongan-dorongan naluri ada dalam setiap makhluk hidup yang berprinsip pada

kesenangan yang dibatasi oleh *ego* dan *superego*. Dorongan *id* yang tidak bisa diterima oleh masyarakat akan direpres, sehingga lama kelamaan akan membentuk suatu tekanan psikologis yang memerlukan cara tertentu untuk mengungkapkannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Memberantas korupsi tidak hanya memperhatikan diri sendiri, penyebab timbulnya korupsi apakah disebabkan lingkungan kecil atau lingkungan yang lebih luas serta bagaimana struktur masyarakat menggunakan nilai-nilai budaya berkaitan dengan korupsi. Dalam hal ini, pemimpin negara perlu memberikan contoh sehingga masyarakat memahami nilai-nilai apa yang dapat dianut masyarakat.

Jika mencoba menganalisis penyebab korupsi dan mengaitkannya dengan perspektif gender, maka kita dapat merujuk pada segitiga 'Fraud' (penggelapan) yang dibangun Cassey pada tahun 1958:



1. Titik segitiga pertama adalah rasionalisasi, yakni pembenaran melakukan korupsi. Korupsi dilakukan untuk membahagiakan keluarga atau ia merasa berhak korupsi karena cukup lama mengabdikan di suatu instansi. Dalam hal ini, memang menjadi salah satu alasan mengapa para koruptor mayoritas dilakukan oleh kaum laki-laki karena memang pada hakikatnya posisi suami yang berkewajiban dalam mencari uang untuk kebutuhan keluarga.
2. Titik segitiga kedua adalah pressure melakukan korupsi, yakni gaya hidup yang menimbulkan masalah finansial seperti utang yang menumpuk, hidup bermewah-mewah, keserakahan, dan narkoba. Beberapa pakar mengatakan bahwa pengaruh gaya hidup istri yang mewah dan terlalu banyak menuntut

memicu laki-laki mencari uang lebih, melebihi haknya, sehingga hal ini dapat menjadi motif terjadinya korupsi. Oleh karena itu, akhlak dan moral perempuan berpengaruh dalam timbulnya pressure untuk melakukan korupsi.

3. Titik segitiga ketiga adalah kesempatan atau peluang yang timbul akibat kelemahan sistem. Penelitian World Bank tak sepenuhnya salah, di negara-negara Skandinavia, memang betul tingginya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik berpengaruh terhadap angka korupsi di negara tersebut yang cukup rendah. Namun, ini bukan menjadi faktor utama, yang menjadi faktor utama ada sistem politiknya. Partai politik di sana sangat kompetitif, tetapi juga sangat akuntabel dan terdapat pengawasan yang sangat kuat oleh masyarakat sipil maupun

media massa. Yang lebih menarik adalah gagasan ini diinisiasi dan didukung oleh organisasi perempuan di negeri tersebut. Maka kesimpulannya, jika sistem politiknya bobrok dan memberikan celah setiap pihak untuk melakukan korupsi, maka korupsi akan terus terjadi.

C. Perempuan dalam Korupsi

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi ini menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan dengan baik termasuk juga pada ranah korupsi. Munculnya feminisasi korupsi yang disampaikan oleh Muhammad Afifuddin yang dilatar belakangi keterlibatan perempuan sebagai aktor penting dalam jejaring mafia perampok uang rakyat dalam kasus-kasus yang mencuat kerah publik. Asumsi yang dapat diambil adalah uang tidak punya jenis kelamin dan tidak bisa memilih siapa yang menjadi pemiliknya.

Siapa pun tentunya mempunyai `bakat' korupsi asalkan ada niat dan kesempatan yang tepat pastilah bisa jadi korupsi itu. Melihat rentetan kejadian kasus per kasus di mana keterlibatan perempuan menjadi variabel vital dalam skenario perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya kebetulan sukar untuk dinalar.⁸

Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkutan paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut.⁹ Keran Euforia antidomestifikasi kebebasan sosial-politik yang terbuka pasca-reformasi rupanya berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di Indonesia mulai menemukan `jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (*equality of*

opportunity) untuk mengakses sumber daya sosialekonomi-politik seperti halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini. Keadaan di Indonesia ini menjadi penting mengingat beberapa penelitian, yang membuktikan adanya hubungan antara tingkat korupsi yang rendah suatu Negara dengan partisipasi perempuan di pemerintahan.

Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1999 terhadap 150 negara, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan yang tinggi diparlemen akan mendorong turunnya tingkat korupsi disuatu Negara. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Vivi Alatas tahun 2006 terhadap perilaku korup di 4 negara yakni: Australia, India, Indonesia, dan Singapura tidak ditemukan yang signifikan dari perilaku korup laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku korup menurut penelitian ini tidak didasarkan Gender namun oleh Budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perspektif dalam menilai perilaku perempuan dalam korupsi. Selanjutnya dalam survei yang dilakukan *Transparency International's Global Corruption Barometer* pada tahun 2009 di lebih 60.000 rumah tangga di lebih 60 negara, membuktikan secara konsisten bahwa perempuan lebih sedikit membayar suap di bandingkan laki-laki.¹⁰

Selain itu adanya perempuan-perempuan di Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan penting seperti menteri, kepala daerah, dan ketua komisi menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja yang cukup baik. Akan tetapi masih kurang mengertinya perempuan pada ranah-ranah baru yang awam sama sekali nampaknya membuat diri mereka mudah terjebak dalam kesalahan tanpa disadari. Berhembusnya isu perempuan sangat berperan dalam korupsi ini merupakan salah satu bukti ketidakadilan gender. Pada kenyataannya perempuan selalu menjadi korban untuk masalah apapun termasuk dalam isu korupsi terutama saat menjadi korban atau pelaku. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media memberitakan perempuan terkait masalah korupsi. Perlakuan publik juga buruk terhadap perempuan tersangka korupsi. Disinilah ketidakadilan gender itu terlihat jelas. Namun perempuan bagaimanapun punya potensi untuk ikut andil dalam memberantas

⁸Afifuddin, Mohammad. *Feminisasi Korupsi*. Republika (15/2/2012) Diunduh Dari <http://17-081945.blogspot.com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.html> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2016 Pukul 22:17 WIB

⁹Tong, Rosemarie Putnam. (2004), *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Jakarta; Jalan Sutra. Hal 331

¹⁰. " *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank* , diunduh dari <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm> diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 20:01 WIB

korupsi.

Sebagian perempuan cerdas yang tersangkut kasus korupsi biasanya terjebak dalam kondisi lingkungan politik sebagai aktor korupsi oleh sistem yang menyimpang. Perempuan di dalam birokrasi dipaksa masuk dalam mata rantai korupsi yang mengakar, karena birokrasi di Indonesia sampai kini tempat menjadi mesin kepentingan kekuasaan. Sejumlah perempuan yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi tidak tepat lagi jika dibahas dengan menggunakan sudut pandang laki-laki-perempuan. Lebih tepat jika persoalan ini diuraikan dengan pandangan sosiologis yang membahas tentang kekuasaan dan perilaku menyimpang. Korupsi, sebagai perilaku menyimpang, jelas sekali bertautan dengan persoalan kekuasaan. Bisa disimpulkan, bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan baik secara politis maupun bisnis, memiliki kesempatan yang lebih banyak berbuat korup dibandingkan lelaki atau perempuan yang tidak berposisi sebagai penentu dalam wilayah kekuasaan politik dan keuangan yang dimilikinya. Bagi mereka yang mempunyai kekuasaan berlebihan merupakan peluang yang besar untuk melakukan korupsi, termasuk perempuan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan sekaligus melacak beberapa faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana korupsi. Data yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur. Data tersebut digunakan dan diolah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada pendahuluan.

Hasil dan Pembahasan

Euforia yang diusung dalam pengurustamaan gender dalam berbagai aspek termasuk dalam jabatan penting dalam dekade terakhir ini juga menjadi pendorong adanya perempuan yang masuk ke alam kancah kepemimpinan. Kaum feminisme yang mendesak adanya perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan yang kemudian membuka akses publik untuk mengakomodir perempuan untuk berkecimpung dalam berbagai aspek terutama aspek sosial, ekonomi dan politik yang selama ini dijabat oleh para lelaki. Penghambat terjeratnya perempuan dalam ranah korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Gaya Kepemimpinan

Korupsi erat hubungannya dengan kewenangan dan kekuasaan, sedangkan cara menjalankan kekuasaan itu sendiri erat hubungannya dengan gaya kepemimpinan di suatu organisasi. Penghapusan semua bentuk ketidakadilan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil, secara nasional dan internasional. Hal ini berarti keterlibatan perempuan di dalam perjuangan kebebasan nasional, dalam perencanaan pembangunan nasional, dan perjuangan bagi perubahan ditingkat lokal dan global.

Indonesia sendiri pemberian celah kepemimpinan kepada perempuan baru benar-benar bergelora pada pascaOrde Baru. Fakta bahwa kebanyakan perempuan berkarier diluar birokrasi dan parlemen juga menekan angka keterlibatan perempuan, hal tersebutlah yang mendorong bergulirnya wacana quota 30% dalam parlemen agar keterwakilan suara perempuan dapat diakomodir. Memang wacana ini sangat berdampak besar dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen akan tetapi ketidaksiapan para perempuan untuk berkiprah dalam bidang yang baru yang telah sekian lama dikuasai oleh para lelaki ini membuat adanya kebingungan yang kadang tidak dapat ditanggulangi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani menilai politisi perempuan yang duduk di legislatif mudah terjerat kasus korupsi atau suap lantaran masih belum menguasai tentang lika-liku politik.¹¹ Perempuan masih awam soal politik, sehingga mudah terseret kasus hukum mengingat aturan-aturan yang dilaksanakan dalam system perpolitikan Indonesia itu sangat rumit dan celah-celah peraturan hukum siap menjerat apabila perempuan pemimpin yang mendapatkan jabatan dan kekuasaan ini tidak mengerti bagaimana melaksanakannya dan menggunakan jabatannya secara baik dan benar. Sehingga tidak bisa pungkiri namanya kekuasaan dekat sekali dengan tindak korupsi, sehingga perempuan punya peluang untuk melakukan korupsi baik disadari maupun tidak disadari. Selain itu politisi yang berasal dari parpol

¹¹Wardhani, Sri Budi Eko. (2012). *Puskapol UI: Politisi Perempuan Mudah Terjerat Korupsi*. Diunduh Dari <http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-TerjeratKorupsi> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2016 Pukul 09:58 WIB

termasuk juga politisi perempuan mau tidak mau tunduk kepada keinginan parpol, hal inilah juga yang mendorong adanya kepatuhan terhadap parpol.

Kemudian dalam sisi birokrasi secara normative, setiap PNS baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit PNS perempuan yang mampu menduduki jabatan karier tertinggi dengan alasan semata-mata kodrati perempuan seperti hamil dan melahirkan yang dikhawatirkan akan mengganggu tugas jabatan yang diemban, alasan selanjutnya yang selalu didengung-dengungkan adalah “*tidak baik perempuan memimpin laki-laki, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran dan belum tentu laki-laki mau dipimpin perempuan, kemudian resiko dinas luar kota yang mengganggu keluarga*” . Alasan tersebut secara tidak langsung menutup celah normatif yang diberikan untuk menjadi seorang Pemimpin pada perempuan. Memang ada kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin atau pun pejabat karier akan tetapi diberikannya “label” yang secara tidak langsung dilekatkan untuk membatasi ruang gerak perempuan terutama melalui sisi adat kebudayaan di negara ini.

2. Politik : Partisipasi Perempuan

Kebijakan politik mengenai pemberdayaan dan partisipasi perempuan pada ranah politik ini mulai terbuka setelah bergulirnya reformasi 1998. Sebagaimana partisipasi politik perempuan, partai politik memiliki peranan yang penting dalam manifesto politik yang tercipta dari proses demokrasi. Dimana parpol meletakkan dasar fundamental terutama untuk kaderisasi pemimpin kedepannya. Keterlibatan perempuan dalam manajemen parpol masih sangat rendah dan secara sistem sangat kecil dilaksanakan. Kemudian secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action* yang artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik baik diparpol maupun pada pemerintahan.¹²

Hal ini menjadi penting agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. Kegiatan parpol yang kebanyakan

didominasi oleh lelaki, menciptakan budaya partai yang bekerja seandainya sendiri tanpa ada kesetaraan gender didalam pelaksanaan kegiatan parpol. Untuk masuk kedalam parpol sendiri perempuan harus memiliki “*sumberdaya ekonomi*” yang mumpuni, sehingga dapat dikatakan kemiskinan membatasi partisipasi politik perempuan. Sebagaimana ketahui, proses penjurangan calon legislatif dan kepala daerah mensyaratkan harus memiliki rekening tabungan bank yang dananya lumayan besar. Mengingat keadaan seperti itu kebanyakan perempuan merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan kalau memiliki penghasilan sendiri tentu tidak sebegitu besar. Keadaan ini juga terjadi pada tataran birokrasi, sudah menjadi rahasia umum kalau ingin naik jabatan harus “*membeli kursi*” dengan menyetorkan sejumlah uang kepada pemangku jabatan yang menentukan pergeseran dan promosi jabatan. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang mengakibatkan minimnya perempuan yang aktif pada jabatan karier yang tinggi atau sebagai anggota parpol yang masuk kedalam perwakilan di parlemen. Sehingga korupsi yang dilakukan oleh perempuan berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada jabatan prestisius berdasarkan jumlah perempuan yang pada jabatan tinggi.

3. Psikologi Perempuan

Melihat dari perspektif psikologi perempuan dengan laki-laki sudah dari sejak lahir laki-laki lebih mengandalkan logika pemikiran secara rasional dibanding perempuan. Begitu pula dengan perempuan yang sejak lahir perasaan dibanding logika berfikir yang dimiliki walaupun kadang perempuan lebih cermat dan teliti dibanding laki-laki. Perempuan secara psikologis jauh lebih lemah, sekuat-kuatnya psikologis perempuan tetap membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Perempuan juga mudah goyah dalam pendirian melihat realitas dan pengaruh perasaan yang dirasakannya. Faktor psikologis yang dimiliki perempuan membuat mereka untuk berpikir berkali-kali untuk melakukan sebuah tindakan termasuk tipikor. Perempuan lebih berspekulasi dan memiliki kekhawatiran akan tindakan yang akan dilakukannya. Hal ini lah yang mengakibatkan perempuan cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan karena memperhitungkan dampak baik dan buruk yang akan diterimanya dari perilakunya tersebut. Sedangkan laki-laki dari dilahirkan memiliki rasa berani dan menikmati tantangan

¹²Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 34-35

dengan segala konsekuensi yang ada. Melalui buku *The Complex Cinderella: Ketakutan Tersembunyi perempuan Kemerdekaan*, Dowling (1981) melakukan penelitian di Amerika kepada para perempuan mandiri. Dalam kesimpulan berdasarkan penelitian dan kisah kehidupan para perempuan mandiri tersebut ternyata perempuan takut untuk bertanggungjawab atas kehidupan mereka sendiri (*Publisheus Weekly*).¹³

Menurut Dowling, perempuan termotivasi oleh hasrat tak sadar untuk dijaga sebagai takut kemerdekaan yang disebut "*Cinderella kompleks*". Sebuah aspek penting dari pekerjaan dapat didefinisikan sebagai identifikasi aspek dari fenomena yang lebih besar seperti mengapa perempuan memilih untuk tinggal dalam hubungan disfungsi. Ini fenomena dapat didefinisikan sebagai suatu sindrom yang ditandai oleh serangkaian motivasi tertentu atau penyebab tertentu. Dowling mengidentifikasi hanya satu motivasi, sedangkan sindrom sebenarnya kombinasi dari motivasi banyak, yang dalam diri mereka sendiri karakteristik yang membentuk kompleks. Hal ini didasarkan pada gagasan femininitas digambarkan dalam cerita itu, di mana seorang perempuan cantik, anggun, sopan, mendukung, pekerja keras, mandiri, dan difitnah oleh perempuan dari masyarakat, tapi dia tidak mampu mengubah situasi itu dengan sendiri tindakan dan harus dibantu oleh kekuatan luar, biasanya laki-laki (yaitu Pangeran). *Cinderella Complex* itu sendiri dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.

Faktor Eksternal meliputi peran penting lingkungan pada tumbuh kembangnya. Budaya, pola asuh orang tua serta media massa memiliki pengaruh yang cukup penting. Sedangkan faktor internalnya adalah harga diri. Individu yang tergantung memiliki harga diri yang rendah sehingga membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang lain. Jika tugas-tugas yang diemban oleh perempuan dalam jabatan publik tersebut dianalogikan sebagai sebuah tekanan dalam dunia politik, tentunya seorang perempuan cenderung lebih mudah untuk menyerah dan membutuhkan berbagai macam bantuan untuk mampu mandiri dan *survive* dari berbagai tekanan politik. Sehingga dengan adanya tekanan tersebut, perempuan lebih rentan untuk berperilaku menyimpang untuk

menyelamatkan dirinya (dianalogikan dengan meminta bantuan orang tua dan orang terdekat untuk menyelesaikan tugas-tugas) karena tidak semua politikus saat ini benar-benar memegang teguh pada prinsip atau ideologi yang dianutnya saat ini. Akibatnya perempuan lebih mudah terjebak dalam perangkap-perangkap korupsi yang ada di dunia politik baik itu disengaja maupun tidak.

4. Budaya Ketimuran

Konsepsi budaya ketimuran meletakkan perempuan sebagai "*kanca wingking*" yang berarti perempuan itu berada dibelakang laki-laki. Sebagai konsekuensi dari konsepsi ini adalah posisi tidaklah penting bagi perempuan untuk keluar rumah karena garda terdepan adalah ranah lakilaki.¹⁴ Konsepsi ini membuat perempuan menjadi tidak antusias untuk terlibat dalam urusan di luar ranahnya. Kemudian tradisi budaya ketimuran terutama tradisi jawa dimana mengejawantahkan bahwa kesuksesan sebuah keluarga tergantung dari peran perempuan sebagai istri dan ibu. Laki-laki adalah pemimpin perempuan sehingga perempuan harus berada dibelakang laki-laki apapun kondisinya. Hal inilah yang menjadi sebuah harga mati dari dogma yang ditanamkan secara turuntemurun kepada anak-anak perempuan sehingga membatasi para perempuan untuk mengembangkan sayap membuka jaringan didunia luar.

Jika karena alasan aktualisasi diri dan tuntutan zaman maka perempuan harus bekerja (dalam Islam), perempuan tetap harus memegang norma dan etika. Bahwa secara alami ini tetap menuntutnya untuk berperan sesuai dengan kodratnya. Jika ia berkarir, ia bersuami, ia juga mempunyai anak, dan ia juga bagian integral dari masyarakat. Peran ini menyatu dalam diri perempuan. Tentunya perempuan harus menanamkan peranannya dan menjadikan pria bagian dari kehidupannya. Melalui konsepsi yang diberikan secara berkelanjutan kepada setiap generasi penerus seperti ini akan sangat membatasi ruang bergerak para perempuan. Sehingga karena tidak memiliki jaringan yang cukup kuat dan luas serta mengingat kodrati perempuan memberikan batasan ruangan untuk perempuan untuk melakukan korupsi. Secara psikologi dan budaya, kemungkinan perempuan melakukan korupsi itu lebih kecil

¹³*Cinderella Complex* diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_complex diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09:41 WIB

¹⁴Rahmat.(2010).Problematika perempuan Mandiri dan Solusinya. Diunduh dari <http://bangrahmat.wordpress.com/2010/04/30/problematika-perempuan-mandiri-dan-solusinya/> diakses pada 10 Juni 2016 pukul 21:23 WIB

dibandingkan dengan kemungkinan yang dimiliki oleh laki-laki karena ranah jangkauannya yang sangat luas.

Simpulan dan Saran

Bicara korupsi tidak bisa lepas dari kekuasaan. Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely, kata Lord Acton. Kekuasaan adalah salah satu godaan yang sulit ditaklukan. Siapapun yang diberi kekuasaan, pasti tergoda untuk mememanfaatkannya bagi kepentingan diri dan orang-orang terdekat. Kuasa akan melahirkan godaan untuk menyalahgunakan, apalagi kalau itu kekuasaan yang mutlak. Semakin banyak perempuan yang terjebak dalam korupsi, itu tidak berarti terjadi feminisasi korupsi. Perempuan korupsi karena kekuasaan yang dimiliki atau menjadi bagian dari jaringan penguasa. Selain kuasa, akar korupsi adalah keserakahan, dan sifat serakah ini merupakan sifat yang manusiawi ada dalam diri laki-laki maupun perempuan.

Setiap orang memiliki bibit dan kecenderungan untuk melakukan korupsi. Korupsi tidak memandang “embel-embel” apapun yang melekat pada pelakunya terutama jenis kelamin. Namun pada perempuan karena faktor gaya kepemimpinan, politik, agama, psikologis, kodrati dan budaya ketimuran yang membatasi ruang gerak perempuan dalam aktualisasi diri dan sekaligus sebagai pelindung perempuan dari jerat korupsi. Penulis melihat bahwa pandangan perempuan sebagai kelompok yang ‘bersih’ justru memberikan beban berlebih pada perempuan. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Goetz yang melihat bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik sebagai agen anti korupsi merupakan argumentasi yang salah dan justru membebani perempuan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Simone de Beauvoir (seorang feminis eksistensialisme) yang melihat adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki merupakan subjek sedangkan perempuan merupakan objek yang selalu terikat pada laki-laki. Perempuan mengalami diskriminasi akibat perempuan dianggap sebagai *the other* atau liyan (yang lain) sedangkan laki-laki dianggap sebagai laki-laki (Tong, 1998).

Ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian memudahkan terjadinya objektivikasi perempuan. Harus dipahami bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelamin. Kekuasaan dan kesempatan merupakan latar belakang utama dari praktik

korupsi. Tidak perlu kaget berlebih apabila perempuan terbukti sebagai pelaku korupsi. Selain itu pemahaman bahwa perempuan merupakan kelompok yang heterogen harus ditingkatkan. Perempuan dengan latar belakang pengusaha dan istri elit partai tentunya berbeda dengan perempuan yang merupakan seorang mahasiswa. Pola pikir yang melihat perempuan sebagai kelompok yang homogen sangat diskriminatif dan menghilangkan kenyataan bahwa setiap perempuan memiliki latar belakang yang berbeda. Satu orang perempuan terbukti sebagai koruptor, tidak berarti seluruh perempuan adalah koruptor. Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi kerja bersama semua pihak dan tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perannya yang cukup strategis pada lingkup keluarga, lingkup kerja dan komunitas, perempuan biasanya bisa saling mengingatkan melalui berbagi ilmu dan saran. Melalui media inilah diharapkan ajakan menanamkan nilai moral, kejujuran dan budaya malu. Peran perempuan ini tentunya juga tidak lepas dari peran laki-laki mau ikut andil dan aktif atau tidak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena baik laki-laki maupun perempuan juga bisa terlibat dalam korupsi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran perempuan Dalam Masyarakat*, 1892, Jakarta, PT Gramedia
- Gayatri Irine Hiraswari, *Gender dan Politik Lokal : Pemetaan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan di Empat Daerah*, 2009, Jakarta, LIPI
- Nurdjana Dkk, 2005, *Korupsi & Illegal Logging Dalam System Desentralisasi*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Tajuk Tajuk Mochtar Lubis di *Harian Indonesia Raya: Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda*, Hukum, ABRI, 1997, Yayasan Obor Indonesia.
- Evi, Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*.
- Freud, S (1983). *Sekelumit Sejarah Psikoanalisis*.

Tong, Rosemarie Putnam. (2004), *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Jakarta; Jalan Sutra. Hal 331

Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang Undang Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Internet :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/08082021/Perempuan.dalam.Bayang-bayang.Jerat.Korupsi?page=all>(Diunduh Kamis 16 Juni 2016, Pukul 09.13 WIB)

Afifuddin, Mohammad. *Feminisasi Korupsi*. Republika (15/2/2012) Diunduh Dari <http://17-081945.blogspot.com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.html> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2016 Pukul 22:17 WIB

“ *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank* , diunduh dari <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm> diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 20:01 WIB

Wardhani, Sri Budi Eko. (2012). *Puskapol UI: Politisi Perempuan Mudah Terjerat Korupsi*. Diunduh Dari [Http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-TerjeratKorupsi](http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-TerjeratKorupsi) Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2016 Pukul 09:58 WIB

Fawaidurrahman (2011). *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis (Melacak yang Terlupakan)*. Diunduh dari <http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/kepemimpinanperempuan-dalam-kajian-hadist-melacak-yang-terlupakan/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.42 WIB

Cinderella Complex diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_complex diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09:41 WIB

Rahmat.(2010).Problematika perempuan Mandiri dan Solusinya. Diunduh dari <http://bangrahmat.wordpress.com/2010/04/30/problematika-perempuan-mandiri-dan-solusinya/> diakses pada 10 Juni 2016 pukul 21:23 WIB

Ani Soetjipto. (21/4/2011). *Perempuan Agen Antikorupsi*. Diunduh dari http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20444:anisoetjipto-perempuan-agen-antikorupsi&catid=48:wawancara&Itemid=121&lang=id diakses pada tanggal 10 Juni 2016 Pukul 20.30 WIB

PERILAKU KONSUMSI PRODUK KOSMETIK DI KALANGAN MAHASISWA LAKI-LAKI UNSOED

Dinda Anisa Juliarty
F1A015027

Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed dindaanisa478@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif mahasiswa laki-laki Unsoed menggunakan kosmetik, dan yang kedua mendeskripsikan perilaku konsumsi produk kosmetik dikalangan mahasiswa laki-laki Unsoed. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam sebanyak enam informan utama dan 10 informan pendukung, dokumentasi, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan snowball sampling dan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa laki-laki Unsoed, berpenampilan menarik, menggunakan kosmetik dekoratif dan menggunakan produk perawatan kulit. Lokasi penelitian di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif dari Milles dan Huberman yang komponennya terdiri atas Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menemukan motif mahasiswa laki-laki Unsoed dalam menggunakan produk kosmetik dibagi menjadi dua yaitu motif dari dalam seperti meningkatkan percaya diri, menyamarkan noda pada jerawat, serta memiliki masalah pada kulit wajah. Sedangkan motif dari luar individu meliputi adanya dukungan dari orang tua dan adanya kasus *bullying*. Sebanyak empat informan utama menggunakan produk kosmetik dekoratif yang berupa *foundation*, *bedak*, *eyeliner*, *eyebrow*, *lipstik*, serta *eyeshadow*. Sedangkan dua informan utama lainnya menggunakan produk perawatan kulit atau *skin care*, seperti serangkaian produk dari klinik kecantikan dan produk dari Jepang. Alokasi dana oleh mahasiswa laki-laki Unsoed untuk membeli produk kosmetik dekoratif dan serangkaian perawatan kulit lainnya. Meskipun stereotipe masih melekat pada masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki menggunakan kosmetik dianggap tidak gagah, *macho*, dan menyimpang, akan tetapi seiring dengan orientasi dan kebutuhan akan perawatan, fenomena penggunaan kosmetik telah banyak digunakan oleh laki-laki.

Kata Kunci: Mahasiswa, Kosmetik, Motif, Perilaku.

Pendahuluan

Baby (nama samaran) merupakan salah satu mahasiswa Unsoed yang mengaku bahwa ia menggunakan kosmetik. Kosmetik yang dipakai biasa digunakan oleh perempuan yakni kosmetik dekoratif yang berupa *foundation*, *lipstik*, *eyeshadow*, *eyeliner*, *eyebrow*, dan sebagainya. Setiap hari, Baby menggunakan produk kosmetik tersebut. Dirinya mengaku menggunakan kosmetik agar lebih percaya diri lagi. Baby menghabiskan lebih dari Rp 1.500.000 setiap bulannya. Selain menggunakan kosmetik, Baby juga menghabiskan waktunya untuk perawatan disalah satu *beauty centre* di Purwokerto.

Selain Baby, Sisi (nama samaran) merupakan salah satu mahasiswa Unsoed yang juga menggunakan kosmetik. Sama halnya dengan Baby, Sisi menggunakan kosmetik dekoratif (*make up*) yang berupa *foundation*, *bedak*, *lipstik*. Sisi juga menggunakan produk krim perawatan wajah dari salah satu *beauty centre* yang ada di Purwokerto yaitu London

Beauty Center (LBC). Sisi mengaku menggunakan kosmetik agar terlihat lebih segar dan agar tampil beda. Alokasi dana membeli produk kosmetik ini ± Rp1.000.000 setiap bulan.

Bertolak belakang dengan Baby dan Sisi, justru Yavi (nama samaran) salah satu mahasiswa Unsoed yang menganggap perawatan yang dilakukan laki-laki memberikan stigma buruk. Stigma buruk yang dimaksudkan seperti laki-laki yang suka *facial* atau maskeran membuat laki-laki tersebut tidak *macho*, sehingga ia menekankan lebih baik laki-laki tidak perlu melakukan perawatan. Yavi mengaku bahwa ia hanya menggunakan sabun muka bermerk *Vaseline* atau *garnier* khusus pria agar wajahnya tidak terlihat kusam. Berbeda dengan Baby dan Sisi yang keduanya menggunakan kosmetik dan melakukan perawatan yang dianggap penampilan menjadi penting, sedangkan Yavi tidak terlalu mementingkan kosmetik dan perawatan lainnya.

Adanya fenomena laki-laki menggunakan kosmetik ini tidak selamanya diterima dengan baik oleh masyarakat, salah satunya terlihat pada Yavi yang menganggap kosmetik itu tidak penting, karena Yavi menganggap laki-laki yang melakukan hal tersebut tidak wajar. Sedangkan di sisi lainnya, Baby dan Sisi menganggap penting untuk laki-laki melakukan perawatan dan menggunakan kosmetik.

Produk kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) diantaranya digunakan untuk perawatan tubuh atau perbaikan penampilan yaitu serangkaian produk yang terdiri dari kosmetik pembersih seperti yang didasarkan pada air, surfaktan misalnya sabun, minyak, padat (*solid cleanser*), pengampelas atau penipis kulit, serta pembersih rambut dan kulit kepala yang berupa *creamshampoo*, *gelshampoo*, *dryshampo*; kosmetik pelembab yaitu berbagai macam pelembab; kosmetik dekoratif yang terdiri dari perona pipi, perona mata (*eyeshadow*), maskara, pensil alis, lipstik, cat kuku, bedak, krim dasar bedak, alas bedak, tataras penutup kulit keriput dan kosmetik dekoratif untuk rambut (Tranggono & Latifah, 2007).

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kepada masyarakat tentang adanya fenomena laki-laki menggunakan kosmetik, khususnya ditemukan pada mahasiswa laki-laki Unsoed. Konstruksi gender bahwa laki-laki perkasa, yang suka merawat diri atau berdandan identik dengan perempuan. Sedangkan jika laki-laki pandai merawat diri atau berdandan dianggap menyimpang dari konstruksi gender yang ada sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat tema ini. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mencoba focus pada bagaimana motif dan perilaku konsumsi produk-produk kosmetik mahasiswa laki-laki Unsoed.

Tinjauan Pustaka

1. Konsumerisme dan Gaya Hidup

Konsumsi menurut Rosyidi (2006) konsumsi sebagai penggunaan barang maupun jasa yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pendapat di atas dipertegas oleh Suharno (2007) bahwa konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan barang-barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang-barang yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun tergantung dari pendapatan yang diperoleh itu sendiri, semakin tinggi pendapatan, maka kebutuhan untuk hidupnya pun besar begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi adalah kegiatan membeli, memiliki, menggunakan barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing individu. Pendapat dari ahli di atas juga memiliki kemiripan namun bedanya pada pendapat Suharno yang menekankan apabila untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga didasarkan pada pendapatan masing-masing.

Menurut Baudrillard (dalam Bagong, 2013), masyarakat konsumen modern kita sudah bukan hanya mengonsumsi barang, namun juga jasa manusia dan hubungan antar manusia. Poin yang sangat penting adalah ketika kita sedang menonton iklan, orang akan mengonsumsi iklan-iklan itu sehingga merekam mengonsumsi apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar tentang konsumsi yang telah dijelaskan Baudrillard, penjelasannya tentang konsumsi tersebut dihubungkan dengan kapitalisme global dan media massa yang berperan dalam menyebarkan tanda-tanda tersebut yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.

Tanda dalam masyarakat konsumen pada dasarnya komoditas yang tidak lagi didefinisikan berdasarkan kegunaannya melainkan berdasarkan atas apayang nantinya dimaknai oleh masyarakat sendiri. Jadi Baudrillard mengembangkan tiga konsep tentang masyarakat konsumsi, diantaranya nilai guna yang berarti fungsi atau manfaat atas komoditas yang dikonsumsi. Nilai tanda merupakan suatu symbol yang melekat pada suatu komoditas, biasanya seperti status, *prestige*, dan sebagainya. Serta simulacra adalah ruang yang dihasilkan dari simulasi yang berisikan realitas semua tau tidak didasarkan pada realitas. Menurutnyapun bahwa mengonsumsi apapun yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan yang penting mengonsumsi dan yang penting berbelanja.

2. Motif Mahasiswa Laki-laki Menggunakan Kosmetik

Motif menurut Giddens (dalam Ghufroon & S, 2012) menjelaskan motif sebagai dorongan yang dapat memberi energi pada

tindakan manusia ke arah pemuasan kebutuhan. Sedangkan menurut Lindgren (Ghufron & S, 2012) motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain sehingga lingkungan individu akan berpengaruh dalam tindakannya. Jadi motif adalah suatu dorongan dan kekuatan, yang berasal dari dalam dan luar seseorang baik yang disadari maupun yang tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu.

Di dalam penelitian ini, motif mahasiswa laki-laki menggunakan kosmetik dibagi menjadi dua yaitu motif dari dalam individu (mahasiswa) seperti salah satunya lebih percaya diri. Sedangkan motif luar individu (mahasiswa) dari proses hubungan atau interaksi individu dengan lingkungan seperti pengaruh dari keluarga, teman sebaya, atau masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, perilaku tersebut dapat di kategorikan sebagai tindakan sosial.

Pada teori tindakan social rasional instrumental, Weber mengemukakan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan pertimbangan sadar yang artinya mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang ingin di capai (Ghufron & S, 2012). Atas dasar tindakan rasional tersebut, seseorang akan memilih mana yang benar dan mana yang salah dari keputusan yang sudah dibuatnya. Jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini, mahasiswa melakukan tindakan seperti menggunakan kosmetik dan melakukan perawatan didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadarnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti lebih percaya diri, dipandang lebih baik, ingin memiliki wajah yang bersih, dan sebagainya.

3. Perkembangan Kosmetik di Indonesia

Berbicara industry kosmetik, berdasarkan pengamatan BIZTEKA pada tahun 2015 lalu bahwa pasar kosmetik nasional tumbuh sekitar 8,3% dengan nilai mencapai Rp13,9 triliun, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar Rp12,8 triliun. Bahkan sepanjang periode 2010-2015 pasar industri kosmetik nasional meningkat rata-rata mencapai 9,67% pertahunnya. Besarnya potensi pasar yang dimiliki oleh industry kosmetik nasional, membuat pemerintah tergerak untuk menjaga industry tersebut untuk dapat bertahan. Salah satunya pemerintah melakukan modernisasi

mesin industry kosmetik yang dimulai sejak tahun 2016 (CCIIIndonesia.com).

Sedangkan pada tahun 2017, industry kosmetik nasional mencatat kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan ini didorong karena adanya permintaan besar dari pasar domestic dan ekspor seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh. Seperti diketahui bahwa biasanya target atau sasaran dalam industry kosmetik ini untuk perempuan, karena perempuan selalu ingin tampil cantik dalam berbagai situasi atau keadaan. Namun dengan perkembangan teknologi dan inovasi, belakangan mulai berinovasi dengan produk-produk untuk pria. Hal inipun didukung oleh pernyataan dari Menteri Perindustrian bahwa "saat ini produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, industry kosmetik juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak" (Kementerian Perindustrian, 2018).

Berkaitan dengan pernyataan Airlangga, saat ini tidak hanya perempuan saja yang melakukan perawatan, akan tetapi laki-laki juga melakukan hal yang sama. Konstruksi social yang tumbuh dalam masyarakat mengenai laki-laki itu gagah, macho, melakukan hal-hal yang bersifat maskulin, dan sebagainya yang saat ini justru tidak berlaku. Tidak semua perilaku dan tindakan harus sesuai dengan jenis kelamin tertentu. Masyarakat seringkali memaknai jenis kelamin dan gender adalah sama, padahal tidak demikian. Perbedaan jenis kelamin lebih mengarah pada biologis seperti memiliki penis, jakun, memproduksi sperma, dan sebagainya, tidak hanya itu, jenis kelamin juga lebih bersifat kodrat atau tidak bisa dirubah. Sedangkan istilah gender digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek social dan budaya. Gender terbentuk melalui proses sosial, sehingga gender dapat berubah sesuai dengan zamannya (Setiadi & Kolip, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam sebanyak enam informan utama dan 10 informan pendukung,

dokumentasi, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan *snowball Isampling* dan *purposive sampling* dengan kriteria mahasiswa laki-laki Unsoed, berpenampilan menarik, menggunakan kosmetik dekoratif dan menggunakan produk perawatan kulit. Lokasi penelitian di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif dari Milles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

1. Motif yang Mendorong Mahasiswa Laki-Laki Unsoed Menggunakan Produk Kosmetik

Seseorang dalam melakukan sebuah tindakan bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, tindakan yang dimaksud adalah menggunakan produk kosmetik yang khususnya dikalangan mahasiswa laki-laki Unsoed tentu didasari oleh motif-motif tertentu. Pada pembahasan motif kali ini peneliti membahas tentang awal mula menggunakan kosmetik, alasan menggunakan kosmetik, dan yang terakhir manfaat yang dirasakan setelah menggunakan produk kosmetik. Seseorang melakukan tindakan tidaklah instant, namun ada proses-proses di dalamnya. Menurut Max Weber (dalam Narwoko & Suyanto, 2007) tindakan social adalah suatu tindakan individu yang memiliki makna bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Salah satu tindakan sosial menurut Max Weber yang relevan dalam penelitian ini adalah tindakan rasional instrumental dimana seseorang melakukan tindakan didasarkan atas pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut sama halnya dengan informan dalam penelitian ini dimana mahasiswa laki-laki Unsoed mempunyai cara untuk mencapai tujuannya yaitu untuk memiliki wajah yang bersih dan putih ditempuh dengan cara menggunakan kosmetik dan juga perawatan kulit lainnya yang dapat menunjang kebutuhan kulit wajah. Mereka melakukan berbagai upaya agar kulit wajahnya terlihat bersih dan bebas dari masalah kulit. Perawatan di klinik kecantikan yang menawarkan berbagai *treatment* juga dapat dijadikan referensi untuk memiliki kulit wajah yang bersih.

Kaitannya dengan motif yang mendorong mahasiswa laki-laki Unsoed menggunakan kosmetik, peneliti akan membahas secara detail. Motif menurut

Giddens (dalam Ghufron & S, 2012) menjelaskan motif sebagai dorongan yang dapat member energy pada tindakan manusia ke arah pemuasan kebutuhan. Sedangkan menurut Lindgren (Ghufron & S, 2012) motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain sehingga lingkungan individu akan berpengaruh dalam tindakannya. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjelaskan motif mahasiswa laki-laki Unsoed menggunakan kosmetik.

a. Motif dari Dalam Individu

Saat ini, kebutuhan akan pentingnya merawat diri dilakukan oleh banyak orang. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga melakukan perawatan. Motif laki-laki membutuhkan perawatanpun bermacam-macam, yang pertama motif dari dalam individu seperti meningkatkan percaya diri, serta memiliki masalah pada kulit wajah. Berikut penjelasannya.

1) Tampil Lebih Percaya Diri

Meningkatnya rasa percaya diri dalam berpenampilan jika menurut teori dari Abraham Maslow termasuk ke dalam kebutuhan manusia akan pentingnya harga diri di hadapan orang lain (Putri S. K., 2015). Berdasarkan hal tersebut, seperti apa yang dialami oleh para informan dalam penelitian ini yang mengatakan alasan menggunakan kosmetik adalah untuk lebih percaya diri. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Risi bahwa motif menggunakan kosmetik yaitu untuk memiliki wajah yang bersih karena ia memiliki wajah yang hitam dan kurang bersih, sehingga akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Serupa dengan Risi, Baby juga memiliki wajah dan kulit yang hitam. Selain itu, Sisi mengatakan bahwa motif menggunakan kosmetik yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, ia juga merasa dengan menggunakan kosmetik menjadi tampil beda dari laki-laki pada umumnya. Sedangkan Coco dan Cipto menggunakan kosmetik untuk lebih percaya diri karena kesibukan di dunia *dancer* dan modeling membutuhkan penampilan yang sempurna salah satunya dengan menggunakan kosmetik.

Tindakan yang dilakukan oleh para informan tentu berkaitan dengan tindakan rasional instrumental, dimana mereka melakukan tindakan menggunakan kosmetik tentunya agar lebih percaya diri dihadapan

orang banyak. Para informan sudah mempertimbangkan dengan matang serta mempertimbangkan apa yang nantinya mereka peroleh. Tindakan tersebut didasarkan adanya motif-motif tertentu yang bersifat rasional (Narwoko & Suyanto, 2007).

2) Memiliki Kulit Wajah yang Bermasalah

Motif penggunaan kosmetik tidak hanya untuk tampil percaya diri, akan tetapi untuk mengobati luka yang ada di wajah. Seperti yang dialami oleh Noval yang mengatakan bahwa ia sebenarnya menggunakan kosmetik motifnya untuk membersihkan wajahnya dikarenakan ia memiliki wajah yang sensitif dan dipenuhi bekas jerawat.

Noval mengaku bahwa ia memiliki wajah yang sensitive sehingga ada banyak luka di wajahnya. Tidak ingin mempunyai wajah yang bermasalah, akhirnya iapun memutuskan melakukan berbagai cara untuk mengobati luka yang ada di wajahnya. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan menggunakan perawatan wajah atau *skin care* untuk menghilangkan bekas- bekas luka jerawat yang bersarang di wajahnya. Motif tersebut yang mendorong Noval untuk menggunakan produk kosmetik.

b. Motif dari Luar Individu

Motif mahasiswa laki-laki Unsoed dalam menggunakan kosmetik tidak hanya didasari pada motif dari dalam, melainkan ada hal lain di luar individu. Hal tersebut berkaitan dengan informan dalam penelitian ini, yang mengaku menggunakan kosmetik juga didasari motif dari luar individu seperti adanya dukungan dari orang tua serta adanya kasus *bully-an*.

1) Adanya Dukungan dari Orang tua

Menggunakan produk kosmetik tidak hanya didasari untuk tampil percaya diri, melainkan juga adanya peran orang tua di dalamnya. Ibu adalah salah satunya dalam mendukung anaknya untuk menggunakan kosmetik. Hal tersebut seperti apa yang dialami Baby. Baby mengatakan bahwa ibunya mendukung ia menggunakan berbagai produk *makeup*. Namun, tetap dalam menggunakannya harus terlihat natural tidak berlebihan. Dukungan dari ibunya tidak hanya disitu, bahkan ketika Baby menginjak usia remaja awal sudah diperkenalkan berbagai

produk kosmetik. Kebiasaan tersebut bermula ketika sedang berjalan-jalan di seputaran mall di Jakarta. Sejak saat itu pula, Baby mulai mencoba-coba berbagai kosmetik. Baby mulai mencoba membeli produk kosmetik saat ia memasuki bangku SMP. Selepas SMP, ia mulai rutin untuk menggunakan kosmetik seperti *BB cream* dan bedak setiap hari ketika menginjak bangku SMA. Oleh sebab itu, Baby merasa penampilannya telah didukung oleh berbagai macam kosmetik sehingga kosmetik menurutnya dianggap menjadi kebutuhan utama.

Keputusan Baby untuk menggunakan kosmetik hingga saat ini tidak lain adalah karena adanya dukungan dari orang tuanya, salah satunya yaitu ibunya. Ibunya turut memanjakan Baby terutama dalam hal penampilan. Melihat Baby yang juga seorang model di sekolahnya ketika SMA, ibunya menjadi lebih memperhatikan penampilan Baby. Seringkali ibunya dan Baby menjalani serangkaian perawatan di klinik kecantikan. Selain itu, ibunya juga membebaskan Baby untuk belanja berbagai kosmetik untuk menunjang penampilannya. Mulai dari berbelanja perawatan kulit atau kita kenal *skin care* hingga kosmetik dekoratif.

Tidak hanya Baby, Coco mendapat dukungan dari orang tua salah satunya seorang Ibu yang mengarahkan anaknya untuk merawat diri. Coco menceritakan seringkali ia melakukan perawatan bersama ibunya. Sewaktu Coco SMP, ia memang belum melakukan perawatan wajah, hanya saja melihat ibunya yang kerap kali melakukan perawatan di klinik kecantikan. Melihat ibunya sering melakukan perawatan, akhirnya ia tertarik untuk mencoba melakukan perawatan saat menginjak bangku SMA. Apalagi ketika itu Coco mengikuti grup khusus *dancer* dimana penampilan adalah nomor satu. Tidak ingin memiliki wajah yang kusam dan jerawat, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak ibunya yang melakukan perawatan disalah satu klinik kecantikan di Purbalingga. Keseriusan untuk mengubah penampilannya tidak hanya melakukan perawatan di klinik kecantikan saja, akan tetapi ia juga melakukan perawatan lainnya seperti sering menggunakan masker wajah yang ialakukan di rumahnya. Pada akhirnya perjuangan yang Coco inginkanpun menuai hasil, wajah yang bersih dan juga putih. Bahkan ia pernah dicurigai melakukan operasi plastic oleh teman-teman SMA-nya.

Perihal diatas sesuai dengan teori tindakan sosial yang di cetuskan Weber. Tindakan sosial adalah tindakan yang diarahkan kepada orang lain sehingga menghasilkan makna atau arti. Adanya interaksi social juga mengarah pada tindakan sosial, itu artinya tindakan social tersebut proses pengambilan keputusan individu dalam melakukan tindakannya. Tindakan social yang dilakukan para informan diatas, didasarkan atas pertimbangan yang sadar. Menggunakan kosmetik agar memiliki wajah yang lebih baik juga didorong oleh factor lingkungan yaitu salah satunya orang tua. Orang tua salah satunya Ibu memaknai anaknya menggunakan kosmetik karena tidak ingin anaknya memiliki penampilan yang kurang baik. Dengan demikian peran Ibu juga mendorong anaknya untuk menggunakan kosmetik.

2) Adanya kasus Pembully-an

Penggunaan kosmetik sejak usia remaja awal Baby lakukan karena ketika ia duduk di bangku SMP, pernah di *bully* oleh teman sebayanya. Saat itu, Baby memiliki tubuh yang gemuk dan juga hitam, sehingga teman-temannya membully-nya. Berangkat dari kejadian tersebut, ia mencoba untuk mengubah penampilannya dengan cara diet untuk mengecilkan tubuhnya dan juga mulai menggunakan *handbodylotion*. Seiring dengan bertambahnya usia dan menginjak bangku SMA, ia mulai merawat diri dan rajin melakukan perawatan agar tidak terjadi pembully-an lagi terhadap dirinya. Diet yang ia jalani sejak saat itu, akhirnya menuai hasil. Saat ini, ia memiliki tubuh yang kurus sesuai dengan keinginannya.

Adanya kasus pembully-an bukan hanya terjadi pada Baby, hal tersebut juga dirasakan oleh Risi sehingga ia memutuskan untuk menggunakan kosmetik. Risi menceritakan pada mulanya ia ragu untuk menggunakan perawatan kulit, akan tetapi ia memutuskan perawatan karena adanya kasus pembully-an yang ia alami di sekolahnya. Kasus *bully* tersebut tidak hanya dialami oleh Baby, namun juga dialami oleh Risi. Risi mengaku kerap kali di *bully* karena memiliki wajah yang kurang bersih dan juga hitam. Hal tersebut membuat Risi terpuruk dan akhirnya memutuskan untuk mulai merubah penampilannya. Risi mengatakan bahwa mayoritas teman-teman sebayanya ketika SMA, mereka memperhatikan penampilannya dan juga kerap melakukan perawatan sehingga memiliki penampilan

yang menarik. Melihat teman-temannya memiliki penampilan yang modis, membuat Risi berpikir dan mengambil tindakan untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan, salah satunya *naavagreen*. Berkaitan dengan kasus *bullying* di sekolah, *bullying* menurut ahli yaitu Sejiwa dalam bukunya yang berjudul *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* menjelaskan bahwa *bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan fisik maupun mental yang kerap dilakukan oleh seseorang maupun kelompok sehingga korban tidak mampu mempertahankan dirinya (Sejiwa, 2008).

Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia merupakan anggota masyarakat yang akan berinteraksi dengan orang lain, sehingga akan berpengaruh terhadap tindakan seseorang. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini, dimana motif informan melakukan tindakan menggunakan kosmetik tentu dipengaruhi juga dari lingkungannya (Ghufron & S, 2012). Orang tua maupun teman sebaya merupakan aktor dibalik tindakan informan. Tindakan tersebut juga termasuk ke dalam tindakan sosial karena para informan tentu dalam berinteraksi akan menghasilkan makna. Para informan menggunakan kosmetik bertujuan agar memiliki kulit yang bersih sehingga akan meningkatkan rasa percaya diri.

2. Perilaku Konsumsi Produk Kosmetik di Kalangan Mahasiswa Laki-Laki Unsoed

Menggunakan kosmetik tentu masuk kedalam tindakan sosial. Hal tersebut dikarenakan kosmetik digunakan untuk memberikan penampilan yang menawan dihadapan orang lain. Sesuai dengan pengertian tindakan social yang berarti tindakan individu yang memiliki makna bagi orang lain (Narwoko & Suyanto, 2007). Menurut Encyclopedia of Industrial Chemistry (dalam Sariroh, 2018) bahwa kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Pembahasan ini meliputi produk kosmetik yang digunakan informan serta alokasi dana untuk membeli produk kosmetik.

a. Produk Kosmetik yang Digunakan Oleh Para Informan

Pembahasan mengenai produk kosmetik yang digunakan informan meliputi kosmetik dekoratif atau *make up* dan

perawatan kulit atau *skincare*. Selain itu, alokasi dana atau *budget* yang dikeluarkan untuk membeli produk kosmetik tersebut.

1) Penggunaan Kosmetik Dekoratif pada Mahasiswa Laki-laki Unsoed

Mengutip Tranggono & Latifah (2007) bahwa kosmetik dekoratif terdiri dari perona pipi, peronamata (*eye shadow*), maskara, pensilalis, lipstik, catkuku, bedak, krim dasar bedak, alas bedak. Produk kosmetik tersebut yang biasa digunakan oleh perempuan ternyata sangat disarankan oleh dr. Kevin Maharis. Berkaitan dengan hal tersebut, para informan dalam penelitian ini, para informan menggunakan kosmetik dekoratif atau *make up*.

Cipto mengaku menggunakan kosmetik seperti layaknya perempuan digunakan sehari-hari, mulai dari *primer* hingga yang terakhir adalah *lipstik*. Melihat profesi yang

saat ini ia kerjakan, membuat ia harus mempersiapkan berbagai macam produk kosmetik untuk keperluan panggung. Ia juga memilah-milah manayang cocok untuk acara resmi dan mana yang cocok untuk acara santai namun tetap harus menggunakan kosmetik salah satunya *make up*. Keinginannya memiliki wajah bersih dan mulus tidak hanya mengandalkan kosmetik wajah yang hanya untuk menyamarkan noda pada wajah, akan tetapi ia juga memilah untuk menggunakan produk *skin care* yang cocok untuk kulitnya. Tidak ingin menggunakan perawatan kulit yang mengandung bahan kimia, akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan perawatan kulit dari bahan alami seperti salah satunya kunyit atau lemon. Tidak hanya itu, ia juga membiasakan untuk menggunakan masker wajah serta toner untuk menyegarkan wajahnya. Produk yang digunakan Cipto akan ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Produk Kosmetik Dekoratif yang Digunakan Cipto



Sedangkan produk yang digunakan Baby, Sisi, dan Coco dapat dilihat pada gambar 2, 3, dan 4 Gambar 2 Produk Kosmetik Dekoratif yang Digunakan Baby



Gambar 3. Produk Kosmetik Dekoratif yang Digunakan Coco



Gambar 4. Produk Kosmetik Dekoratif yang Digunakan Sisi



2) Alokasi Dana yang Dikeluarkan Mahasiswa Laki-Laki Unsoed Untuk Membeli

Produk Kosmetik Dekoratif

Alokasi dana bulanan yang dikeluarkan oleh Cipto dan Coco berbeda-beda. Jika Cipto mengeluarkan dana kisaran ± Rp 600.000 yang dibagi untuk keperluan membeli *make up* dan perawatan di klinik kecantikan. Coco mengaku mengeluarkan dana hampir Rp 1.000.000. Sedangkan Sisi dan Baby yang mengakui pengeluaran bulanan untuk membeli kosmetik hingga lebih dari Rp1.000.000.

Baby mengaku mengeluarkan lebih dari Rp 1.000.000. Ia mengungkapkan ketertarikannya menggunakan produk dari luar negeri. Ia juga menceritakan ketertarikannya dengan produk luar negeri karena lebih cocok dipakaikan di kulitnya. Beberapa diantaranya yaitu Korea, Thailand, Inggris. Menyadari produk yang digunakan dari luar negeri dan jarang tersedia di toko kosmetik, sehingga iapun membelinya melalui online dan memilih *shopee* sebagai jasa *e-commerce*. Baby membeli produk-produk kosmetik di *online shop* karena lebih mudah dan jarang ada *store* terdekat karena sebagian besar produk yang ia beli berasal dari luar negeri. Dalam hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Yasraf Amir Piliang dalam bukunya yang berjudul "Dunia Yang Dilipat" bahwa saat ini kemajuan teknologi

yang semakin modern mengindikasikan adanya sebuah pelipatan sosial yaitu bagaimana penaklukan ruang oleh waktu lewat kemajuan teknologi, informasi dan virtualitas yang telah memungkinkan dilakukan berbagai aktivitas sosial. Pelipatan social ini adalah aktivitas social yang tidak lagi memerlukan perpindahan fisik seperti salah satunya belanja *online*. Kemudahan belanja *online* ini memberikan dampak baik itu positif dan negatif bagi para konsumen. Seperti kita ketahui bahwa belanja *online* memudahkan kita dalam berbelanja tanpa harus ke toko yang ingin dituju (Piliang, 2004).

3) Penggunaan Produk Perawatan Kulit atau *Skin Care* di Kalangan Mahasiswa Laki-laki Unsoed

Produk kosmetik tidak hanya melulu dengan kosmetik dekoratif atau *make up*, akan tetapi juga tentang produk perawatan kulit. Berbeda halnya dengan informan di atas yang menggunakan kosmetik dekoratif, hal lain dialami Risi dan Noval yang hanya menggunakan produk perawatan kulit. Keinginan Risi untuk memiliki wajah yang bersih, ia percayakan pada serangkaian produk dari salah satu klinik kecantikan yaitu *naavagreen*. Produk tersebut berupa krim pagi dan malam, serta toner. Sedangkan Noval hanya rutin menggunakan produk *skincare* dari *hada labo* dan masker bubuk alami. Perawatan kulit yang digunakan Noval dan Risi terlihat pada gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Produk Perawatan Kulit yang Digunakan Risi



Gambar 6. Produk Perawatan Kulit yang Digunakan Noval



4) Alokasi Dana yang Dikeluarkan Mahasiswa Laki-Laki Unsoed Untuk Membeli

Produk *SkinCare*

Pengeluaran Risi dan Noval tidak jauh berbeda. Risi hanya mengeluarkan *budget* ± Rp100.000, informan lainya itu Noval juga mengerluarkan *budget* yang sama. Noval mengatakan bahwa ia perbulan hanya mengeluarkan kurang dari Rp 100.000 untuk membeli *cleanser*. Rutinnya ia menggunakan produk kosmetik berupa *cleanser* mengakibatkan sering habis sehingga ia harus membelinya lagi.

Di dalam teori tindakan social rasional instrumental terkandung makna rasional yang berarti tindakan tersebut sudah dipikirkan sebelumnya dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini para informan sudah menyadari betul mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membeli kosmetik agar sesuai dengan tujuan mereka (Ritzer, 2004).

3. Manfaat yang Dirasakan Mahasiswa Laki-Laki Unsoed Setelah Menggunakan Kosmetik

Tindakan rasional instrumental menekankan pada pilihan sadar atas pertimbangan yang telah dipikirkannya. Dalam hal ini, tentunya tindakan para informan menggunakan kosmetik atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Tidak hanya itu,

para informan juga mempertimbangkan dampak atau manfaat setelah menggunakan kosmetik. Menggunakan produk kosmetik tidak hanya memberikan tampilan menjadi lebih percaya diri, akan tetapi produk kosmetik juga dirasa memberikan sumbangan terbesar atau manfaat bagi kulit wajah seseorang. Peranan kosmetik begitu penting untuk menjaga kulit wajah tetap bersih dan sehat. Efeknya memang tidak langsung dan instant, akan tetapi perlu kesabaran dan ketelatenan untuk hasil yang lebih maksimal.

Manfaat penggunaan kosmetik begitu juga dirasakan oleh para informan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beragam manfaat yang dirasakan para informan, Mulai dari mendapatkan kepuasan tersendiri, noda jerawat pada wajah tersamarkan, mengobati luka yang ada pada wajah, dan mendapatkan perhatian.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa motif mahasiswa laki-laki Unsoed menggunakan kosmetik didasari oleh motif dari dalam dan luar individu. Motif dari dalam seperti meningkatkan percaya diri, menyamarkan noda pada jerawat, serta memiliki masalah pada kulit wajah. Sedangkan motif dari luar individu meliputi adanya dukungan dari orang tua dan adanya

kasus *bully-an*. Peneliti menemukan perilaku informan dalam menggunakan kosmetik, bahwa para informan menggunakan kosmetik dekoratif atau *makeup* seperti *foundation*, *eyeliner*, *eyebrow*, *lipstik*, maskara, dan bedak serta menggunakan serangkaian produk perawatan kulit atau *skincare* seperti serangkaian produk perawatan dari klinik kecantikan, dan serangkaian produk keluaran Jepang yaitu *hadalabo*.

Peneliti juga menemukan beragam pengeluaran atau *budget* yang dikeluarkan untuk membeli produk kosmetik, mulai dari Rp 100.000 hingga lebih dari Rp.1.000.000 setiap bulannya. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh adanya motif-motif tertentu. Teori tindakan *social rasional instrumental* relevan dengan hasil penelitian ini, karena para informan melakukan tindakan didasarkan atas pertimbangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun walaupun demikian, adanya laki-laki menggunakan kosmetik menimbulkan pro-kontra. Jika dilihat dari sudut pandang laki-laki yang menggunakan kosmetik, mereka menganggap tidak masalah dengan adanya mereka menggunakan kosmetik untuk digunakan sehari-hari. Namun, disisi lainnya masih adanya stereotip bahwa laki-laki menggunakan kosmetik terutama yang melakukan perawatan dianggap tidak pantas. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang dari dokter kecantikan, bahwa laki-laki yang melakukan perawatan dianggap wajar karena sama-sama manusia yang membutuhkan kesehatan kulitnya.

Daftar Pustaka

Ghufron, M. N., & S, R. R. (2012). *Teori-Teori Psikologi*.

Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis*

Marx, Durkheim dan Max Weber. (S.Kramadibrata, Trans.) Jakarta: UI Press.

Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada

Media Group.

Piliang, Y. A. (2004). *Dunia Yang dilipat: tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Jalasutra.

Radtya, A. (2014). *Sosiologi Tubuh: Membentang Teori di Ranah Aplikasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Ritzer, G.&. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala*

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group.

Tranggono, R.I., & Latifah, F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PEDOMAN PENULISAN DI JURNAL INTERAKSI PRODI SOSIOLOGI FISIP UNSOED

Lingkup Jurnal.

Tulisan yang dapat dimuat di Jurnal Interaksi (JI) adalah tulisan yang mengkaji masalah-masalah sosial-humaniora dipandang dari perspektif sosiologi.

Jenis Tulisan.

Redaksi JI menerima artikel ilmiah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku, dan hasil diskusi untuk keperluan publikasi suatu hasil penelitian yang dipandang penting, dan secara cepat perlu segera diterbitkan. Artikel belum pernah diterbitkan dalam jurnal manapun.

Sistematika penulisan artikel hasil penelitian.

1. Judul artikel (ditulis dengan huruf kapital. Bila ada subjudul, huruf kapital pada subjudul hanya digunakan untuk huruf awal setiap kata, kecuali kata sambung)
2. Nama penulis (tanpa gelar), asal institusi, alamat email penulis utama.
3. Abstrak Bahasa Inggris
4. Abstrak Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata)
(abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3-5 kata)
5. Pendahuluan (10%), meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian.
6. Kajian Pustaka (20%), berisi deskripsi atau pengembangan teori dan konsep, hasil analisis literatur, review studi terdahulu (bila ada), serta hipotesis (bila ada).
7. Metode Penelitian (10%), meliputi: penjelasan mengenai objek penelitian, lokasi penelitian (bila ada), teknik pengumpulan data, metode penelitian yang digunakan, sampel, metode analisis data.
8. Hasil dan pembahasan (45%), berisi deskripsi mengenai hasil penelitian serta analisis hasil penelitian.
9. Simpulan dan saran (15%).
10. Daftar Pustaka

Sistematika ini hanya sebagai pedoman umum, penulis dapat mengembangkan sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini.

Sistematika penulisan artikel gagasan konseptual

1. Judul artikel (ditulis dengan huruf kapital. Bila ada subjudul, huruf kapital pada subjudul hanya digunakan untuk huruf awal setiap kata, kecuali kata sambung)
2. Nama penulis (tanpa gelar), asal institusi, alamat email penulis utama.
3. Abstrak Bahasa Inggris
4. Abstrak Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata)
(abstrak dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3-5 kata)
5. Pendahuluan (10%), meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan.
6. Kajian Pustaka (20%), berisi deskripsi atau pengembangan teori dan konsep, hasil analisis literatur.
7. Pembahasan (60%), berisi deskripsi mengenai hasil penelitian serta analisis hasil penelitian.
8. Simpulan dan saran (10%).
9. Daftar Pustaka

Sistematika artikel resensi buku

1. Judul Buku
2. Deskripsi buku, meliputi:
 - a. Judul buku
 - b. Penulis (atau nama editor)
 - c. Judul asli dan penerjemah (untuk buku terjemahan)
 - d. Penerbit
 - e. Jumlah halaman, termasuk halaman romawi.
3. Ulasan mengenai isi buku, keunikan (kelebihan), serta kelemahan buku. Penulis juga dapat membandingkannya dengan buku lain yang memiliki tema yang sama.

Pedoman umum:

1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan memerhatikan kaidah sesuai Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan dan penulisan istilah asing, disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang dapat diunduh di <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanv42/>.
2. Setiap penulis tidak diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu naskah dalam bentuk tulisan apa pun, baik secara individu atau dalam kelompok untuk satu edisi yang sama.
3. Naskah diketik pada kertas kuarto (A4) satu kolom dengan margin 4433, diketik menggunakan fontasi Times New Roman 12, 1,5 spasi (kecuali abstrak, 1 spasi). Nomor halaman terletak di kanan atas naskah.
4. Panjang artikel antara 10 sampai 15 halaman. Untuk resensi buku, panjang tulisan antara 6-10 halaman.
5. Tabel dan gambar harus diberi nomor dan judul lengkap, disertai sumbernya.
6. Setiap kutipan harus dituliskan sumbernya menggunakan *bodynote* dengan menuliskan nama-belakang penulis dan tahun (tanpa nomor halaman). *Footnote* hanya digunakan apabila ada informasi penjas dalam artikel, bukan untuk menuliskan sumber kutipan.
7. Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dan hanya memuat pustaka yang benar-benar dikutip dalam tulisan. Format penulisan daftar pustaka:

Buku teks:

Haralambos dan Holborn. 2004. *Sociology: Themes and Perspectives Sixth Edition*. Harper Collins Publisher, London.

Buku kumpulan tulisan:

Bourdieu, Pierre. 2004. "The Forms of Capital", *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*. Stephen J. Ball (ed.). The Routledge Falmer, London.

Buku terjemahan:

Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta (diterjemahkan dari *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation* oleh Fuad).

Literatur dari jurnal:

Singh, Rajendra. 2002. Teori-teori Gerakan Sosial Baru, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Transformatif Wacana*, edisi 11, tahun III. Insist, Yogyakarta.

Literatur dari internet:

Haryatmoko. 2008. *Sekolah: Untuk Semua atau Alat Seleksi Sosial? Reproduksi Kesenjangan Sosial Lewat Sekolah Perspektif Pierre Bourdieu*, situs: <http://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/handoutseminar/haryatmoko.doc>. diakses tanggal 1 September 2009

8. Naskah dikirim dalam format word (*doc* atau *docx*) melalui email ke: jurnal_interaksi@yahoo.com, dengan dilampiri curriculum vitae penulis yang berisikan nama lengkap, alamat (rumah dan kantor), nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi, riwayat pendidikan, aktivitas, dan kegiatan yang sedang dijalani, dan lain-lain.
9. Apabila naskah dinyatakan layak untuk diterbitkan, penulis akan dihubungi redaksi dan harus segera mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tulisan tersebut belum pernah diterbitkan dalam jurnal apapun dan bebas dari unsur plagiasi. Surat ditandatangani di atas materi Rp 3000.00.
10. Redaksi berhak melakukan editing terhadap semua tulisan yang dikirim tanpa mengurangi makna tulisan.

11. JI terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember), dan memuat 10 artikel untuk setiap edisi. Penulis yang artikelnya dimuat dalam JI, akan mendapatkan 1 eksemplar JI per orang. Artikel juga akan diunggah di web JI sehingga dapat dibaca secara online.